



Republik Indonesia



# LAPORAN KINERJA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2020



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2020 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2021

Inspektur Utama,



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA

NIP 19630225 199003 1 003

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### TAHUN 2020

#### Capaian Indikator Kinerja Utama:

#### IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



Tercapai **93,55** dari **75**

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diukur dari (1) Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; dan (3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.
- Capaian IKU telah berhasil 100% terhadap target IKU** tetapi belum tercapai indeks 100. Hal ini dikarenakan belum optimalnya keselarasan dan sinergit perencanaan pembangunan prioritas nasional di pusat dan daerah.
- Upaya peningkatan capaian IKU melalui meningkatkan koordinasi dengan Mitra K/L/D melalui pemanfaatan teknologi daring/online pada masa pandemi Covid-19.

- IKU baru yang bertujuan untuk mengukur pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional
- Hasil capaian kinerja diukur dari: (1) % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi; (2) % jumlah karyawan yang lulus program pendidikan; (3) % jumlah peserta terlatih; dan (4) % tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP.
- Upaya perbaikan kedepan: Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan kurikulum dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP.

#### IKU 2 : Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi



Tercapai **99,19%** dari **85%**

#### IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional



Tercapai **100%** dari **84%**

- Wabah pandemic Covid-19 mengakibatkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia serta terjadi *refocusing* anggaran pembangunan yang dialihkan untuk penanganan penyebaran dampak Covid-19.
- Capaian kinerja sasaran PN RKP 2020 hingga Triwulan IV tercapai dengan BAIK.** Hal ini disebabkan tidak tercapainya 9 dari 12 indikator pada PN 3 sehingga berkategori kinerja "kurang".
- Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya pengendalian di tingkat pusat dan daerah melalui penyampaian **rekomendasi peningkatan capaian kinerja PN RKP 2020 yang telah ditindaklanjuti oleh K/L/D sebesar 100%**.
- Kedepan, meningkatkan koordinasi dengan mitra K/L/D dan meningkatkan kegiatan pengendalian dan monev RKP.

- Capaian Kinerja IKU ini diukur melalui besaran kebijakan yang dihasilkan dari penugasan Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait isu strategis pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L
- Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen meningkatkan kinerja untuk terus menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan nasional, baik penugasan dari Presiden dan Wakil Presiden RI maupun respon cepat terhadap isu permasalahan pembangunan terkini

#### IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Tercapai **100%** dari **85-87,9%**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### TAHUN 2020

#### Capaian Indikator Kinerja Utama:

#### IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



- Capaian Kinerja IKU ini diukur melalui besaran rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas terkait kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dan belum ada di tahun sebelumnya
- Walaupun capaian kinerja sudah optimal, Kementerian PPN/Bappenas akan terus berinovasi untuk menciptakan kebijakan perencanaan pembangunan yang inovatif guna percepatan capaian target Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 maupun Prioritas Nasional tahunan

- Capaian Kinerja Indeks RB mengalami **peningkatan dari 82,48 (2019) menjadi 85,01 (2020)**
- Capaian Kinerja IKU Indeks RB diukur dari penilaian oleh Kementerian PANRB
- Upaya peningkatan: meningkatkan peran Agen Perubahan RB Kementerian PPN/Bappenas dan meningkatkan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB

#### IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



#### IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



- IKU ini merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya
- Capaian Kinerja IKU Indeks Kepuasan ini diukur melalui survei kepuasan stakeholder, terkait bidang ekonomi (tahun 2020)
- Kedepan, akan dilaksanakan survei pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

- Capaian Kinerja IKU ini diukur melalui telaah terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional
- IKU ini merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya
- Kedepan, akan dilaksanakan penyempurnaan data dan informasi renbang berbasis Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial (THIS)

#### IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional



Tercapai **88,89%** dari **85%**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

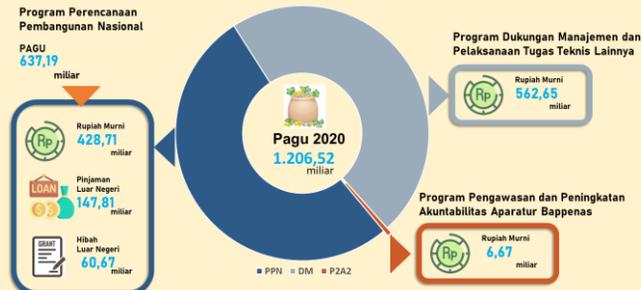
## LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### TAHUN 2020

#### Capaian Kinerja Anggaran:

#### Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

##### BERDASARKAN PROGRAM



##### BERDASARKAN JENIS BELANJA



#### Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



##### BERDASARKAN JENIS BELANJA



- ✓ Tingkat efisiensi capaian realisasi anggaran terhadap capaian kinerja sebesar **1,09**
- ✓ Berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran Pagu DIPA terhadap capaian kinerja kelembagaan

#### Permasalahan Capaian Kinerja Anggaran:

- Wabah pandemik Covid-19 berakibat kegiatan yang sudah dianggarkan tidak terlaksana
- Pembatasan kegiatan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional secara tatap muka
- Belum optimalnya kinerja Koordinator Kegiatan di masing-masing unit kerja untuk percepatan realisasi anggaran yang akuntabilitas
- Pengelolaan kegiatan dan anggaran PHLN belum optimal

#### Upaya Perbaikan Capaian Kinerja Anggaran kedepan:

- Mengoptimalkan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional secara *daring* atau *on-line*
- Meningkatkan koordinasi PPK, Koordinator Kegiatan, dan Pimpinan Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengoptimalkan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dan anggaran dalam rangka percepatan realisasi anggaran
- Menyusun SOP terkait pengelolaan kegiatan dan anggaran PHLN

#### Tindak Lanjut Kedepan:

Upaya meningkatkan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas ke depannya, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- Meningkatkan peran koordinasi dan kerjasama berkelanjutan antar sektor guna mempercepat pembangunan prioritas nasional di pusat maupun daerah melalui salah satunya peningkatan kegiatan bersama lintas sektor dengan melihat langsung implementasi kegiatan *mayor project* dan pencapaian proyek prioritas dalam RKP. Hal ini guna meningkatkan pengendalian pembangunan RKP.
- Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi bersama lintas sektor pada program dan kegiatan PN-PP-KP-Pro.P dan Mayor Project sehingga tercapai target optimal sesuai dengan rencana pembangunan dalam RKP.
- Merumuskan kebijakan pengelolaan dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk terwujudnya Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah,
- Merumuskan kebijakan revitalisasi pengelolaan pegawai ASN diantaranya melalui pemutakhiran data seluruh pegawai PNS maupun PPNPN, revitalisasi manajemen SDM, pengembangan pola karir, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan ASN.
- Merumuskan kebijakan tata kelola kinerja pegawai yang terintegrasi dengan sasaran kerja pegawai berbasis aplikasi sehingga memudahkan melakukan monitoring kinerja pegawai secara berkala.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-2
1.2. Kedudukan dan Peran Kementerian PPN/Bappenas.....	I-2
1.2.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas.....	I-2
1.2.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas .....	I-5
1.3. Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas .....	I-8
1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis .....	I-10
1.4.1. Potensi Strategis .....	I-10
1.4.2. Permasalahan Strategis.....	I-11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.....	II-1
2.2. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Prioritas Pembangunan Nasional .....	II-5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	II-7
2.4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 .....	II-8
2.5. Alokasi Anggaran .....	II-25
2.5.1. Alokasi Anggaran 2020 .....	II-25
2.5.2. Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2019-2020.....	II-27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Capaian Kinerja 2015-2019.....	lii-1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020 .....	lii-3
SS-1: Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	
IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional .....	III-8

	IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi .....	III-36
SS-2:	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional .....	
	IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional .....	III-43
SS-3:	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner	
	IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-57
	IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-60
SS-4:	Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	
	IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas .....	III-62
	IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional .....	III-70
	IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional .....	III-72
3.3.	Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2020 .....	lii-79
3.3.1.	Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional .....	III-79
3.3.2.	Perencanaan Strategis Pindahan Ibu Kota Negara.....	III-81
3.3.3.	Trilateral Meeting Kinerja.....	III-82
3.3.4.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.....	III-83
3.3.5.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	III-86
3.3.6.	Penyelenggaraan ICCTF .....	III-88
3.3.7.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs).....	III-93
3.3.8.	Pengelolaan Program Kerjasama Bilateral dan Multilateral ....	III-94
3.3.9.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).....	III-96
3.3.10.	Dukungan Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN) .....	III-99
3.3.11.	Perkuatan Clearing House Pembangunan dalam RKP 2022 .....	III-101

3.4.	Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	lii-104
3.4.1.	Pagu Anggaran.....	III-104
3.4.2.	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	III-106
3.4.3.	Analisis Efisiensi Capaian Realisasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja.....	III-111
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>IV-1</b>
4.1.	Simpulan .....	IV-1
4.2.	Tindak Lanjut.....	IV-4

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas .....	I-6
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Level Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	II-4
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas .....	II-7
Tabel 2.3.	Pemetaan <i>Cascading</i> IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	II-8
Tabel 2.4.	Pemetaan IKU Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.5.	Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP dalam Perencanaan dan Pengendalian.....	II-12
Tabel 2.6.	Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	II-17
Tabel 2.7.	Alokasi Anggaran dan Perubahannya Tahun 2020 .....	II-25
Tabel 2.8.	Program dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	II-26
Tabel 2.9.	Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	II-28
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.....	III-1
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	III-4
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas .....	III-6
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 .....	III-8
Tabel 3.5.	Rincian Detail Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020.....	III-10
Tabel 3.6.	Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 .....	III-13
Tabel 3.7.	Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 .....	III-15
Tabel 3.8.	Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 .....	III-17
Tabel 3.9.	Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan Renja K/L 2021 .....	III-20
Tabel 3.10.	Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021.....	III-22
Tabel 3.11.	Pengukuran Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi .....	III-36

Tabel 3.12. Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana .....	III-37
Tabel 3.13. Perbandingan Tingkat Kelulusan Karyasiswa Pendidikan 2019 dan 2020 ..	III-39
Tabel 3.14. Perbandingan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 .....	III-40
Tabel 3.15. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP Tahun 2020.....	III-40
Tabel 3.16. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan.....	III-41
Tabel 3.17. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan Tahun 2019 dan 2020 .....	III-41
Tabel 3.18. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020 .....	III-42
Tabel 3.19. Capaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2020 hingga Triwulan IV...	III-44
Tabel 3.20. Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional..	III-49
Tabel 3.21. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat .....	III-50
Tabel 3.22. Perhitungan Indikator Persentase Jumlah K/L/D yang Menindaklanjuti Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan.....	III-56
Tabel 3.23. Rekapitulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-58
Tabel 3.24. Rekapitulasi Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.....	III-61
Tabel 3.25. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2020 .....	III-63
Tabel 3.26. Jenis Peraturan yang Telah Dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 Berdampak Langsung pada Perencanaan Pembangunan Nasional .....	III-79
Tabel 3.27. Pagu dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas.....	III-105
Tabel 3.28. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	III-107
Tabel 3.29. Pagu dan Realisasi Anggaran .....	III-109
Tabel 3.30. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	III-110
Tabel 3.31. Analisis Efisiensi Capaian Realisasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja	III-111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas .....	I-6
Gambar 1.2.	Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas .....	I-7
Gambar 1.3.	Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.....	I-8
Gambar 2.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra 2020-2024 .....	II-3
Gambar 2.2.	Konsep Bridging I IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024 .....	II-10
Gambar 2.3.	Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas.....	II-11
Gambar 2.4.	Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi.....	II-11
Gambar 2.5.	Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 .....	II-15
Gambar 2.6.	Pemetaan Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021.....	II-16
Gambar 2.7.	Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020.....	II-26
Gambar 2.8.	Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018-2020.....	II-27
Gambar 2.9.	Perkembangan Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2018-2020.....	II-29
Gambar 3.1.	Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 .....	III-3
Gambar 3.2.	Alur Kerja Kerangka Ekonomi Makro .....	III-31
Gambar 3.3.	Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro.....	III-31
Gambar 3.4.	Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha .....	III-33
Gambar 3.5.	Keterkaitan KEM, RKP, dan RPJMN.....	III-35
Gambar 3.6.	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2020 .....	III-67
Gambar 3.7.	Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas .....	III-68
Gambar 3.8.	Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Proses Perencanaan dan Penetapan Sasaran Inflasi .....	III-71
Gambar 3.9.	Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Pengendalian dan Monev Kebijakan Pengendalian Inflasi .....	III-71
Gambar 3.10.	Kementerian PPN/Bappenas Memberikan Pelayanan Prima (Cepat dan Berintegritas) .....	III-72

Gambar 3.11. Capaian Program COREMAP-CTI WB Tahun 2020 .....	III-89
Gambar 3.12. Paket Program COREMAP-CTI WB yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Mitra Pelaksana .....	III-90
Gambar 3.13. Capaian Program COREMAP-CTI ADB Tahun 2020 .....	III-91
Gambar 3.14. Capaian Program Blended Finance Tahun 2020.....	III-91
Gambar 3.15. Capaian Program Blue Carbon Tahun 2020 .....	III-92
Gambar 3.16. Capaian Program Bioeconomic Tahun 2020 .....	III-93
Gambar 3.17. Tahapan Penilaian PPD Tahun 2020 .....	III-97
Gambar 3.18. Skema Penerapan Clearing House Proyek.....	III-102
Gambar 3.19. Alur Penerapan Proses Clearing House Proyek Pada RKP Tahun 2022.....	III-102
Gambar 3.20. Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022.....	III-103
Gambar 3.21. Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 - 2020 .....	III-104
Gambar 3.22. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 - 2020 ..	III-105
Gambar 3.23. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas.....	III-108
Gambar 3.24. Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 - 2020 .....	III-109

1

## Pendahuluan



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menjalankan fungsi untuk melakukan perencanaan pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan nasional. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan serta Pemutakhiran; serta dokumen perencanaan internal berupa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun demikian, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan Indonesia juga cukup besar termasuk menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia dan menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Secara tidak langsung berdampak pada tugas Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan tersebut membuat Bappenas harus tetap menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan yang berkualitas dan kredibel.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan capaian atas pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2020 dimana masih menggunakan IKU 2015-2019. Namun demikian, pencapaian kinerja menggunakan metode *bridging* ke IKU 2020-2024. Hal ini disebabkan karena perubahan struktur organisasi melalui pelantikan Pejabat Tinggi Pratama dan Perencana di akhir tahun anggaran 2020.

## 1.2. KEDUDUKAN DAN PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### 1.2.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 3 Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappenas mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;

- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara;
- e. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- f. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas;
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penguatan peran perencanaan dan pembangunan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Merujuk RPJMN 2020-2024, Bappenas ingin menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip *"Structure Follow Strategy"*. Penataan arsitektur kelembagaan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas telah dan sedang melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan kebijakan inovasi pembangunan, pengembangan kapasitas ASN rencana pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, kebijakan strategis nasional dan mendorong kerja sama multi pihak (termasuk non pemerintah). Hal tersebut sesuai dengan Renstra Kementerian 2020-



2024 yang memiliki peran baru. Secara rinci peran dan fungsi baru Kementerian PPN/Bappenas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas**

<b>Perencanaan</b>	<b>Alokasi</b>	<b>Pengendalian</b>	<b>Enabler</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan ekonomi makro</li> <li>▪ Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan</li> <li>▪ Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana</li> <li>▪ Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D</li> <li>▪ Kesepakatan global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan</li> <li>▪ Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan</li> <li>▪ Melakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya</li> <li>▪ Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi <i>baseline</i> kondisi terkini</li> <li>▪ Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (<i>outcome</i>)</li> <li>▪ Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional</li> <li>▪ Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko</li> <li>▪ Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan</li> <li>▪ pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi <i>vocal point</i> untuk koordinasi penanganan isu global tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional</li> <li>▪ Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya.</li> <li>▪ Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif</li> <li>▪ Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai</li> <li>▪ Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko</li> <li>▪ Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko</li> <li>▪ Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>think-tank</i> untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner</li> </ul>
Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, <i>Think-tank</i> , dan Administrator		Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan <i>Think-tank</i>	Pelaksanaan dari peran <i>Enabler</i> dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>Think-tank</i>

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Merujuk pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, pada tahun 2020 ini Bappenas mulai dengan kebiasaan yang baru dan semangat kerja baru pula. Bappenas sedang menjalankan penguatan peran sebagai *Clearing House* untuk lebih mengefektifkan Perencanaan, Pengalokasian, Pengendalian, dan *Enabler* dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI.

Peran *Clearing House* ini Bappenas tetap diorientasikan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N), terutama dalam memastikan proyek-proyek prioritas yang telah ditetapkan dalam koridor Prioritas Nasional (PN) *terdelivered*. Dengan demikian berarti Bappenas mengkondisikan perencanaan yang semakin berkualitas.

Untuk memastikan perencanaan yang semakin berkualitas dan memperkuat pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial (THIS), Bappenas terus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan untuk menjalankan peran *Clearing House*, seperti:

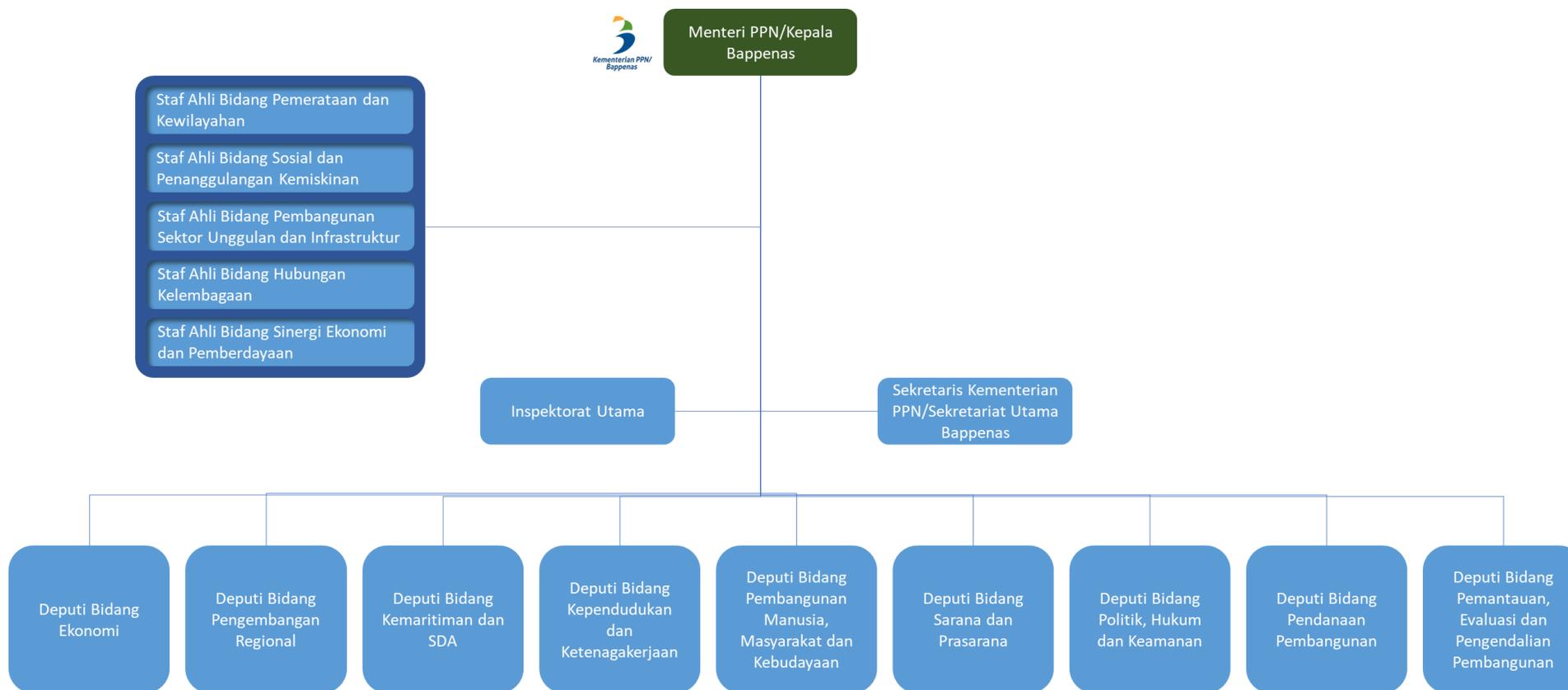
1. penetapan proyek prioritas yang paling strategis dan memerlukan harmonisasi lintas proyek K/L untuk dibahas dan dikawal oleh Bappenas untuk memastikan pencapaian sasaran/target PN;
2. perbaikan mekanisme dan *output* tiap tahapan proses perencanaan terutama proses bilateral, rakortek, multilateral, trilateral, musrenbangprov, multilateral/multipihak, musrenbangnas, penelaahan Renja dan RKA K/L;
3. penambahan aktivitas perencanaan diantaranya kunjungan kerja di 34 provinsi pada awal perencanaan, rakorgub, hingga tahapan trilateral kinerja Renja K/L.

Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentunya menjadi modal bagi perbaikan kinerja organisasi selanjutnya, sebagaimana *quick wins* Reformasi Birokrasinya (RB) Kementerian PPN/Bappenas salah satunya adalah Revitalisasi Pelaksanaan PP 17 tahun 2017.

### 1.2.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Inspektur Utama, 9 (sembilan) Deputi, dan 5 (lima) Staf Ahli. Selain itu, terdapat 5 (lima) unit kerja Biro, 2 (dua) unit kerja Inspektorat, dan 42 (empat puluh dua) unit kerja Direktorat. Disamping itu, terdapat 3 (tiga) pusat, yaitu (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren); (2) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang); dan (3) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK). Namun demikian, struktur organisasi tersebut baru diterapkan melalui pelantikan pejabat terkait pada 18 September 2020 (secara efektif). Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas



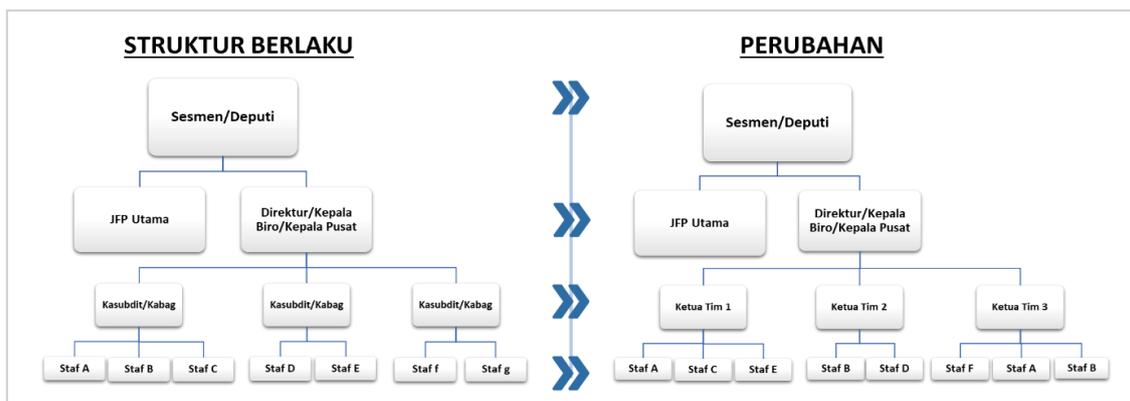
Keterangan: setiap UKE I memiliki beberapa UKE II

Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019

Menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk melakukan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon guna menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efisien, sehingga birokrasi berjalan lebih dinamis, *agile*, dan profesional, tindak lanjut arahan tersebut dengan melakukan pengalihan Jabatan Administrasi (abatan struktural eselon III, IV, dan V) menjadi Jabatan Fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Dan arahan Wakil Presiden RI pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi tanggal 11 Agustus 2020, bahwa birokrasi harus mampu bekerja secara efektif dan efisien sekaligus proaktif dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dapat bergerak secara dinamis apabila memiliki struktur yang proporsional sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Hal tersebut berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme kerja *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office*. Penerapan mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Kemudian, Bappenas melakukan perubahan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dan telah dilakukan pelantikan terhadap beberapa pejabat terkait pada 23 Desember 2020. Adapun skema perubahan alut kerja dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.2. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas**



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

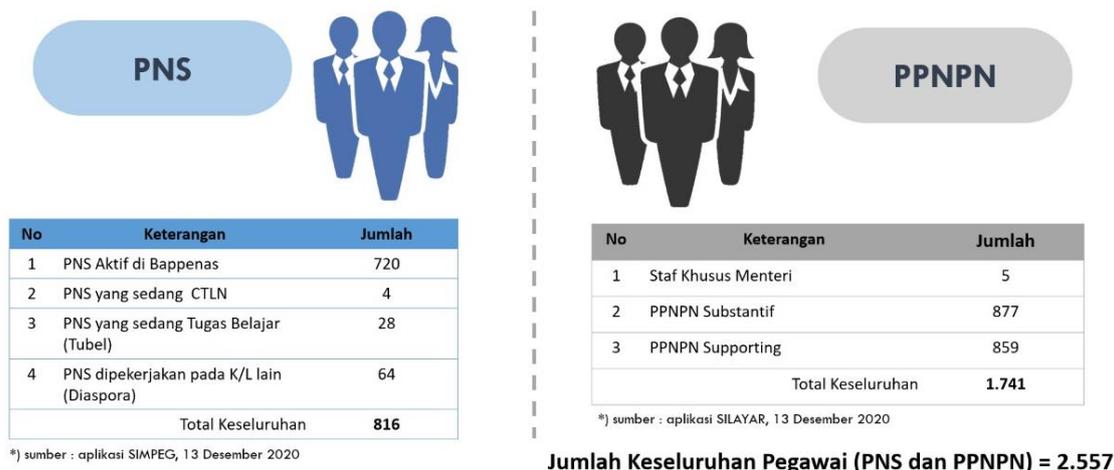
Penataan dimaksud guna penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya.

Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas adalah (1) Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial; (2) Staf Ahli akan berperan sebagai *quality assurance* dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus; dan (3) Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi *think-tank* berdasarkan keahlian bidangnya.

### 1.3. SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memahami proses bisnis serta didukung oleh kuantitas, kualitas dan kompetensi.

Gambar 1.2. Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2020

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah pegawai ASN Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 2.557 orang terdiri atas pegawai PNS sebanyak 816 orang (31,91%) dan pegawai PPNP sebanyak 1.741 orang (68,09%). Namun demikian, jumlah pegawai PNS yang aktif di Kementerian PPN/Bappenas hanya 720 orang (28,16%) sisanya 28 orang PNS sedang Tugas Belajar dan 64 orang PNS dipekerjakan pada K/L lain. Sementara itu, terdapat tambahan hasil CPNS 2019 sebanyak 103 orang atau masih di bawah target kebutuhan PNS sebesar 287 orang (Data Biro SDM, 2020). Selanjutnya untuk mendapatkan rencana kebutuhan SDM yang tepat baik jumlah maupun kompetensinya, saat ini sedang disusun Analisis jabatan dan Analisis Beban kerja, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengisian ASN PNS maupun PPNP.

Seiring dengan penambahan dan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam revitalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dibutuhkan sumber daya untuk mencapai tantangan tersebut diantaranya dilakukan dengan penambahan SDM dan pengembangan kompetensi, serta perbaikan tata kelola kegiatan dan anggaran.

Selain itu, kejadian wabah pandemik Covid-19 sejak awal tahun 2020 mendesak Kementerian PPN/Bappenas mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan Covid-19. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH). Hal ini mengakibatkan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Penyesuaian sistem kerja tersebut tidak membuat ASN Kementerian PPN/Bappenas patah arang dalam menjalankan pelayanan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, Kementerian PPN/Bappenas mempersiapkan sarana dan prasarana mitigasi serta penyesuaian sistem kerja bagi pegawai. Penyesuaian sistem kerja pegawai dalam transisi menuju tatanan normal baru di Kementerian PPN/Bappenas tetap dilaksanakan melalui mekanisme *Integrated Digital Workspace dan Smart Office* sebagaimana telah dijalankan sejak Desember 2019. Implementasi *Integrated Digital Workspace dan Smart Office* (IDW dan SO) tersebut diintegrasikan dengan sistem kerja yang telah diatur oleh Kementerian PPN/Bappenas serta penerapan protokol kesehatan dan keamanan selama bekerja.

Sistem kerja IDW-SO ini merupakan terobosan inovasi Kementerian PPN/Bappenas yang dirancang untuk memungkinkan ASN Kementerian PPN/Bappenas berperan aktif sebagai *clearing house* program, juga memperkuat kerja sama di antara para perencana, serta sebagai sarana *knowledge sharing* dan penguatan metode analisis perencanaan pembangunan, sehingga produk perencanaan pembangunan semakin berkualitas. IDW-SO tidak merubah kultur kerja menjadi lebih fleksibel waktu dan tempat namun target tercapai. Implementasi sistem IDW-SO ini mendapat kunjungan Presiden RI pada 16 Januari 2020. Presiden meninjau langsung bagaimana sistem IDW diimplementasikan, juga berbagai fungsi yang dapat digunakan untuk menunjang produktivitas dan kinerja ASN Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas di bidang penganggaran, perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Penyelenggaraan IDW-SO yang bertujuan untuk peningkatan efektifitas pegawai bekerja dari rumah akibat dampak wabah Covid-19. Kedepan, penyelenggaraan sistem IDW - SO terus ditingkatkan. Adanya kondisi restrukturisasi yang di mulai September 2020, sistem IDW justru membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas karena struktur IDW telah mendukung skema penugasan sesuai arahan penyederhanaan birokrasi.

## 1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

### 1.4.1. Potensi Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas memiliki potensi strategis, antara lain:

1. **Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* perencanaan dan pembangunan prioritas nasional.** Sesuai amanat Presiden RI dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024 untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* yang memastikan: (1) konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam RKP 2021; (2) seluruh rencana pembangunan prioritas nasional dijalankan oleh K/L maupun di daerah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020, termasuk kegiatan *Major Project*, dan (3) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan RKP 2020. Peran *clearing house* tersebut termasuk memastikan sasaran pokok serta prioritas nasional sampai level proyek prioritas terintegrasi dengan rencana strategis setiap kementerian sesuai kewenangan Bappenas dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2. **Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta pelaksanaan pembangunan nasional.** Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
3. **Penyelenggaraan penguatan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.** Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, baik di Pusat maupun Daerah, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
4. **Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang telah cukup memadai** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.
5. **Penerapan mekanisme kerja melalui *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)*.** Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yang lebih transparan dan terukur melalui sistem teknologi informasi sehingga pegawai lebih produktif menjalankan WFH (*Work from Home*) di masa pandemi Covid-19.

#### 1.4.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

1. **Belum optimalnya koordinasi antar sektor untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang tematik, holistik, terintegrasi dan spasial (THIS).** Hal ini menyebabkan sasaran dan target Prioritas Nasional belum sepenuhnya tercapai.
2. **Adanya peran dan kewenangan besar dari lembaga legislatif dalam mengarahkan alokasi anggaran** yang berpotensi mengurangi keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.
3. **Belum terintegrasinya seluruh sistem data dan informasi perencanaan pembangunan di masing-masing K/L dan daerah.** Hal ini yang ditunjukkan oleh belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah.
4. **Masih lemahnya pengelolaan SDM** yang ditunjukkan oleh (i) belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum diterapkannya hasil analisis potensi ASN sehingga penempatan sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian; dan (iii) belum terpenuhinya jumlah ASN yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
5. **Belum optimalnya pengelolaan *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)*** masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.



2

## Perencanaan Kinerja



## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

**“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Berkualitas* : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

*Kredibel* : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang, *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi oganisasi).

Seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terlibat dalam pencapaian outcome IKU dimaksud, namun pengukuran sasaran terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional dengan indikator indeks RB dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan target kinerja tahun 2020 berdasarkan Renstra 2020-2024 dengan mempertimbangkan capaian tahun 2019 serta kesepakatan seluruh pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Mengingat penetapan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 serta adanya pelantikan beberapa Pimpinan Tinggi Pratama sesuai SOTK baru menjelang akhir tahun 2020, maka telah ditetapkan melalui rapat pimpinan bahwa pengukuran capaian IKU 2020 berdasarkan PK 2020 dengan menggunakan IKU 2015-2019 yang di-*bridging* ke IKU 2020-2024, artinya seluruh pengukuran IKU 2020 menggunakan kamus IKU 2015-2019 tetapi penyajiannya dikonversi ke IKU 2020-2024.

Pada tahun 2020 ini merupakan tahun transisi/transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dikarenakan adanya perubahan antara IKU 2015-2019 dengan IKU 2020-2024. Secara substansi IKU tersebut masih berkaitan namun lebih ditingkatkan supaya terwujud IKU yang SMART dan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional serta menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal.

Pada tahun 2020 terdapat perubahan/penambahan sasaran dan IKU yang tujuannya untuk mempertajam kinerja Kementerian PPN/Bappenas, Perubahan dimaksud sebagai berikut:

- Perubahan sasaran strategis dari “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergi, dan kredibel” dengan 3 (tiga) IKU, yakni: IKU 1 “Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah; IKU 2 “Rancangan Perpres RKP”; dan IKU 3 “Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L” menjadi sasaran strategis “Terwujudnya integrase, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional” dengan 5 (lima) IKU, yaitu: IKU 1 “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional”; IKU 2 “Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi”; IKU 3 “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional”; IKU 4 “Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L”; dan IKU 5 “Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L”.
- Perubahan sasaran strategis dari “Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih” dengan 1 (satu) IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas” menjadi sasaran strategis “Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM” dengan 3 (tiga) IKU, yakni IKU 1 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas”; IKU 2 “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional”; dan IKU 3 “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional”.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra 2020-2024**

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong								
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong								
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa						Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.		
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.			Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan			Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.		
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional		Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner			Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	

Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Sementara itu, rincian IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) level Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Unit Penanggungjawab
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Semua Kedeputan, kecuali Staf Ahli Menteri, Kedeputan Pendanaan Pembangunan dan Kedeputan PEPP
		IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
	2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Kedeputan PEPP
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputan dan Staf Ahli Menteri
		IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Semua Kedeputan dan Staf Ahli Menteri
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, termasuk Inspektorat Utama
		IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas
		IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2020)

## 2.2. PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Proses penyusunan RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan penyusunan yang *money follows program* berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Artinya bahwa perencanaan pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan tersebut Kementerian PPN/Bappenas menggunakan peran dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 1.

Dalam RKP 2021, pemerintah mencanangkan 7 Prioritas Nasional dan 39 Program Prioritas serta beberapa *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) yang selanjutnya dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menjadi lembaga integrator yang mampu mengintegrasikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selain itu, Bappenas punya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan RKP 2020 terdiri atas 5 Prioritas Nasional dan 25 Program Prioritas. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran *clearing house* program pembangunan sesuai arahan Presiden, penugasannya untuk memastikan:

- Seluruh rencana pembangunan (K/L dan instansi lainnya) sesuai dengan RPJMN/RKP dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, Daerah dan lainnya.
- Memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarnya dengan bersama Kemenkeu mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP.
- Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan dengan mengintegrasikan sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas.

Berkaitan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dalam RPJMN 2020-2024 dimana telah menjadi fokus dalam penyusunan perencanaan dan pendanaan RKP 2021, maka peran *clearing house* program pembangunan Kementerian PPN/Bappenas hadir untuk:

- Memastikan tindak lanjut prioritas hasil pembahasan Menteri dan Gubernur.
- Memastikan kesiapan Pemerintah Daerah tentang lahan, perijinan, dan lainnya.
- Mendorong sinergi pendanaan melalui K/L, DAK, BUMN dan masyarakat.
- Memperkuat pengendalian dan evaluasi (*safeguarding*) untuk menjamin manfaat nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Hal tersebut di atas telah dibuktikan Kementerian PPN/Bappenas salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2020 di 6 (enam) Provinsi. Kunjungan kerja tersebut terobosan baru yang dilakukan guna mewujudkan penguatan peran *enabler* dan *clearing house* Kementerian PPN/Bappenas dalam pengendalian pembangunan RKP 2020 sekaligus persiapan pelaksanaan pembangunan RKP 2021

Selain penguatan peran baru Bappenas dalam hal perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan *enabler* dan implementasi *clearing house*, Bappenas juga mempunyai peran dalam hal penguatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pertemuan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur sebagai salah satu *milestone* RKP 2021 untuk membahas proyek prioritas nasional dan *major project* yang akan menjadi fokus pembangunan dan berfungsi sebagai ajang sinergi perencanaan pusat dan daerah dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas pertemuan tersebut

Kondisi di atas merupakan salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kemudian, dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan pertimbangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman dalam rangka Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini diwujudkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri dimana Kementerian PPN/Bappenas menjadi inisiator.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun petunjuk pelaksanaan penyelarasan Perencanaan Jangka Menengah Daerah terhadap Perencanaan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 bertujuan untuk: (1) Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah; (2) Mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN 2020-2024; (3) Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN 2020-2024; dan (4) Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional. Upaya penyelarasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Penyelarasan Target Indikator Makro**

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Target Indikator Makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional.

- **Penyelarasan Program Prioritas**

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan/atau mendukung program prioritas nasional.

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja tingkat kementerian tahun 2020 telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kementerian PANRB berisi indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1.1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
	1.2. Rancangan Perpres RKP 2020	1 dokumen
	1.3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	2.1. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas Tahun 2020 (diolah, 2020)

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas ditandatangani pada bulan Januari 2020 yang kemudian diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon I, II, III dan IV yang isinya merupakan penjabaran (*cascading*) dari IKU Kementerian PPN/Bappenas.



Perlu diketahui bahwa IKU 2020 tersebut masih menggunakan IKU 2015-2019 sampai akhir anggaran tahun 2020 namun pelaporan kinerja di-*bridging* ke IKU 2020-2024. Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 disajikan dalam **Lampiran-1**.

Sebagai bentuk akuntabilitas, IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 telah diturunkan menjadi indikator kinerja di tingkat Unit Kerja Eselon I dan II sesuai bidangnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2 Pemetaan *Cascading* IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Nb	Indikator Kinerja Utama	Target	IKU UKE I/II	Target						
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan RKP Provinsi dengan RKP (Khusus Dep Regional/ Dit PWK)	80%						
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kemen. PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingkup bidang...	1 Dok						
					3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%			
								4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor RB K/L	A
											Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik
Tersedianya Sarpras Aparatur Pelaks Tusi Kemen PPN/Bappenas	Terlaksananya Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemen PPN/Bappenas	4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor evaluasi AKIP	A						
					% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup Perencanaan pembangunan nasional	100%						
					% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					% Penyelesaian Program kerja Pengawasan Tahunan (melalui peran Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas	Level 3						
					Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kemen PPN/Bappenas	Baik						

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 (diolah, 2020)

#### 2.4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Sejak tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perencanaan secara optimal melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran perencanaan pembangunan nasional khususnya pada Prioritas Nasional-Proyek Prioritas-Kegiatan Prioritas (PN-PP-KP) dan bidang yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah. Penyempurnaan ini didasari atas kondisi bahwa: 1) IKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang

dihasilkan belum/tidak dapat dijelaskan kinerja capaiannya; 2) kinerja sulit untuk diukur; serta 3) belum adanya *cascading* indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Mengingat IKU tahun 2020 sebagian masih menggunakan IKU Tahun 2015-2019, namun secara substansi pengukuran kinerjanya telah diarahkan atau dilakukan penajaman terhadap IKU periode 2020 - 2024. Adapun pemetaan IKU tahun 2020 menuju rancangan IKU Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3. Pemetaan IKU Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024**

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi
	2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4	SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
			b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
			c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

Berdasarkan pemetaan IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2. Konsep *Bridging* I IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015-2019			INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024							
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2015-2019	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	
SS-1: Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%	Masuk IKU UKE 1 dan UKE 2	SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.					
	2. Rancangan Perpres RKP	1 dok			a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	75	80	85	90	95
	3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%			b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat dan Daerah					
SS-2: Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik		SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional					
					a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
				SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah					
			3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L		85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100%	
				SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
			a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		83,00	86,00	90,00	90,50	91,00	
			b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional		85	88	90	92	95	
					c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

Dari pemetaan tersebut dapat dijelaskan *bridging* dari IKU 2015-2019 ke IKU 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah yang diterjemahkan dalam indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional** dan diukur melalui 3 (tiga) penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pelaksanaannya.

IKU 1.1 merupakan IKU yang dirancang untuk menunjukkan ukuran terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat inisiatif strategis/prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan.

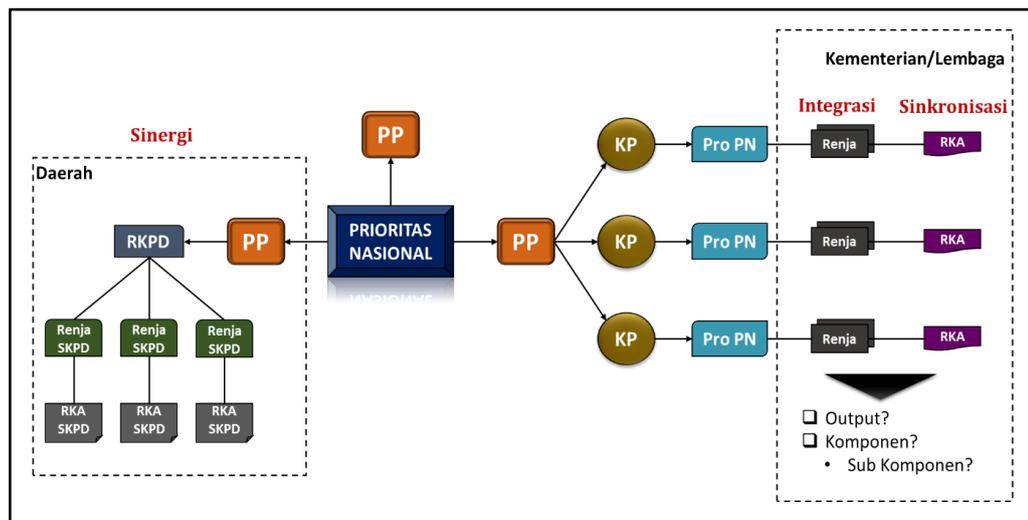
Indeks ini akan berimplikasi pada menguatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, melalui:

- a. Pengukuran kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional (tiap PN).
- b. Pengukuran kualitas perencanaan K/L dan Daerah dengan kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
- c. Penyusunan indeks yang akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

d. Penyusunan *cascading* IKU sebagai alat ukur kinerja individu/tiap pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mengukur integrasi dan sinkronisasi, dilakukan pemetaan dari PN ke PP, kemudian ke KP, Pro-PN dan Renja dan RKA K/L. Sedangkan sinergitas dapat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

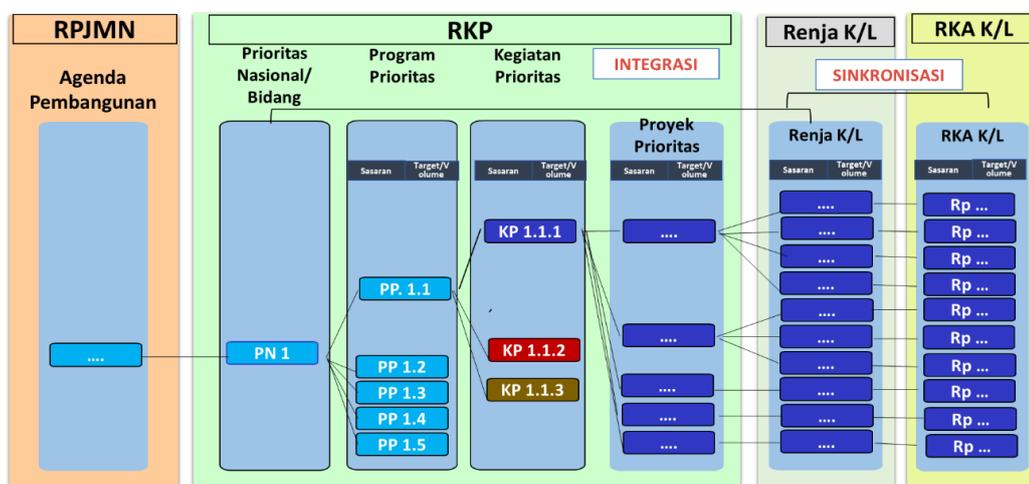
**Gambar 2.3. Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas**



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi, dan Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana terlampir pada gambar berikut.

**Gambar 2.4. Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi**



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Dengan adanya *bridging* IKU 2015–2019 ke IKU 2020–2024, proses *cascading* dan mekanisme kerja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas pun berubah menggunakan koridor PN/PP/KP. *Cascading* dan mekanisme tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi dan peranan tiap Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4. Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP dalam Perencanaan dan Pengendalian**

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2021	Pengendalian RKP 2020
<b>PJ PN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PN</li> <li>2. Menentukan PP</li> <li>3. Menentukan KP bersama dengan penanggung jawab PP</li> <li>4. Mengendalikan penanggung jawab PP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level PP</li> <li>5. Menghitung indeks perencanaan PN masing-masing yang berasal dari penanggung jawab PP (integrasi, sinkronisasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur realisasi sasaran/ target PN masing-masing</li> <li>2. Menyusun laporan kinerja PN dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisa realisasi PN berdasarkan laporan realisasi PP (penjelasan tentang realisasi PN)</li> <li>b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya</li> <li>c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024</li> </ol> </li> </ol>
<b>PJ PP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PP bersama penanggung jawab PN</li> <li>2. Menentukan KP bersama penanggung jawab PN</li> <li>3. Mengendalikan penanggung jawab KP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level KP</li> <li>4. Menghitung indeks perencanaan PP masing-masing yang berasal dari penanggung jawab KP (integrasi, sinkronisasi)</li> <li>5. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan PP kepada penanggung jawab PN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur realisasi sasaran/target PP masing-masing</li> <li>2. Menyusun laporan kinerja PP dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisa realisasi PP berdasarkan laporan realisasi KP (penjelasan tentang realisasi PP)</li> <li>b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya</li> <li>c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024</li> </ol> </li> <li>3. Menyampaikan laporan kinerja PP kepada penanggung jawab PN</li> </ol>

Penanggung Jawab	Perencanaan RKP 2021	Pengendalian RKP 2020
<b>PJ KP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan sasaran, indikator dan target KP</li> <li>2. Mengendalikan pelaksanaan KP di dalam proses integrasi dan sinkronisasi</li> <li>3. Menghitung indeks perencanaan KP masing-masing (integrasi, sinkronisasi)</li> <li>4. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan KP kepada penanggung jawab PP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun laporan kinerja KP dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisa realisasi KP (penjelasan tentang realisasi KP)</li> <li>b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya</li> <li>c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024</li> </ol> </li> <li>2. Menyampaikan laporan kinerja KP kepada PJ PP</li> </ol>

Sumber: Biro Renortala, 2020

2. Indikator kinerja ke-2, Rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan lagi, dan akan menjadi output di tingkat Unit Kerja Eselon II serta bagian dari **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional**.
3. Selain itu, untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional pada Sasaran Strategis ke-2 ditentukan oleh kualitas SDM Perencana. Oleh karena itu, IKU 2020-2024 dimasukan IKU baru, yaitu **Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi** yang diampu oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas.
4. Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diubah menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) IKU, yakni:
  - a. Sasaran Strategis ke-2:
 

**IKU: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.**

merupakan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP tahun berjalan (RKP Tahun 2020) dengan proses pemantauan, evaluasi, serta rekomendasi perbaikan. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun berjalan. Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh kepada K/L pelaksana lain menggunakan koridor PN.

b. Sasaran Strategis ke-3:

**IKU: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; dan**

**IKU: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.**

Kedua IKU tersebut adalah merupakan IKU baru yang digunakan untuk mewujudkan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai peran Alokasi dan peran Enabler. Pelaksanaan dari peran Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, *Think-tank*, dan Administrator. Sedangkan pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Think-tank*.

5. IKU terakhir adalah Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas pada Sasaran Strategis ke-2: Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih diubah menjadi lebih rinci, yakni Sasaran Strategis ke-4: Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Professional dan didukung oleh Kapabilitas SDM dengan 3 (tiga) IKU, yaitu: (a) **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas**; (b) **Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional**; dan (c) **Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional**.

Sebagian besar IKU ini berfokus pada indeks dan nilai kinerja yang akan dievaluasi, salah satunya oleh Kementerian Keuangan (Nilai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB (Nilai Kinerja RB) dan BPK (Opini BPK), serta penilaian pemangku kepentingan terhadap pelayanan dan proses perencanaan pembangunan nasional.

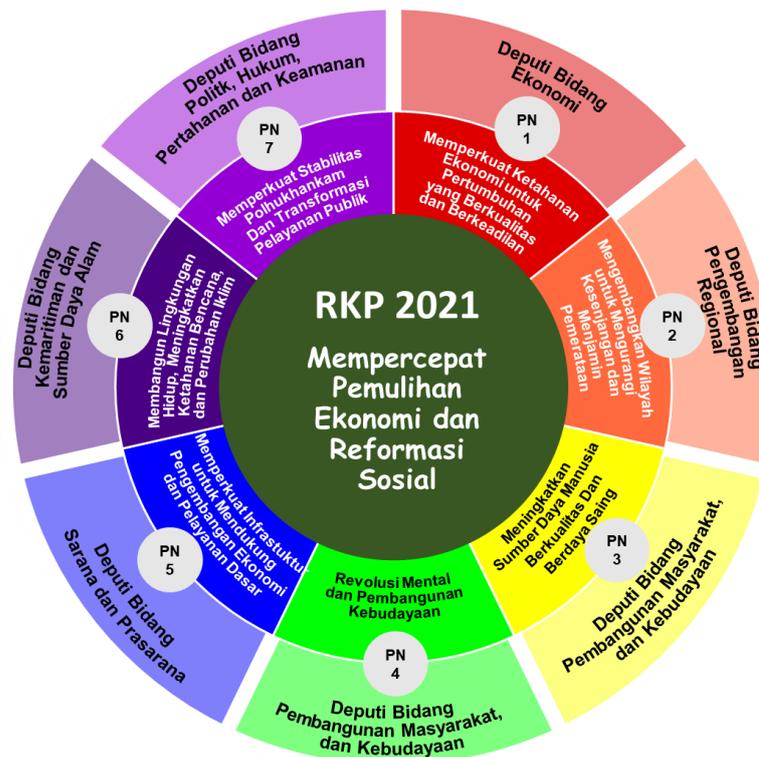
Mengingat pada tahun 2020 ini merupakan masa transisi struktur organisasi mengacu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dimana de facto pelantikan dilaksanakan tanggal 18 September 2020 sehingga ada perubahan organisasi di UKE II serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024 ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2020. Namun, kegiatan dan anggaran masih menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang lama.

Dengan demikian, dasar pengukuran capaian kinerja tahun 2020 menggunakan metoda *bridging*, yaitu menggunakan IKU 2020-2024 (IKU baru) tetapi isinya menstrukturkan variabel IKU lama (IKU 2015-2019) kedalam IKU baru sehingga formula pengukuran masih menggunakan formula IKU lama yang disesuaikan dengan target IKU baru.

Pemetaan *bridging* IKU 2015-2019 ke dalam IKU 2020-2024 terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan, pengukuran serta pendekatan dengan menggunakan koridor PN/PP/KP, terutama pada IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyajian pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini berbasis Prioritas Nasional (PN) RKP 2021. Maksudnya adalah setiap PN RKP 2021 terdapat Penanggung Jawab oleh Deputi terkait. Capaian kinerja Unit

Kerja, khususnya capaian IKU UKE I/uke II terkait keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah capaian kinerja keselarasan PN RKP 2021 dan pendukungnya. Berikut gambaran Deputi penanggung jawab dalam PN RKP 2021.

Gambar 2.5. Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021



Sumber:  
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 17/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, (diolah, 2020)

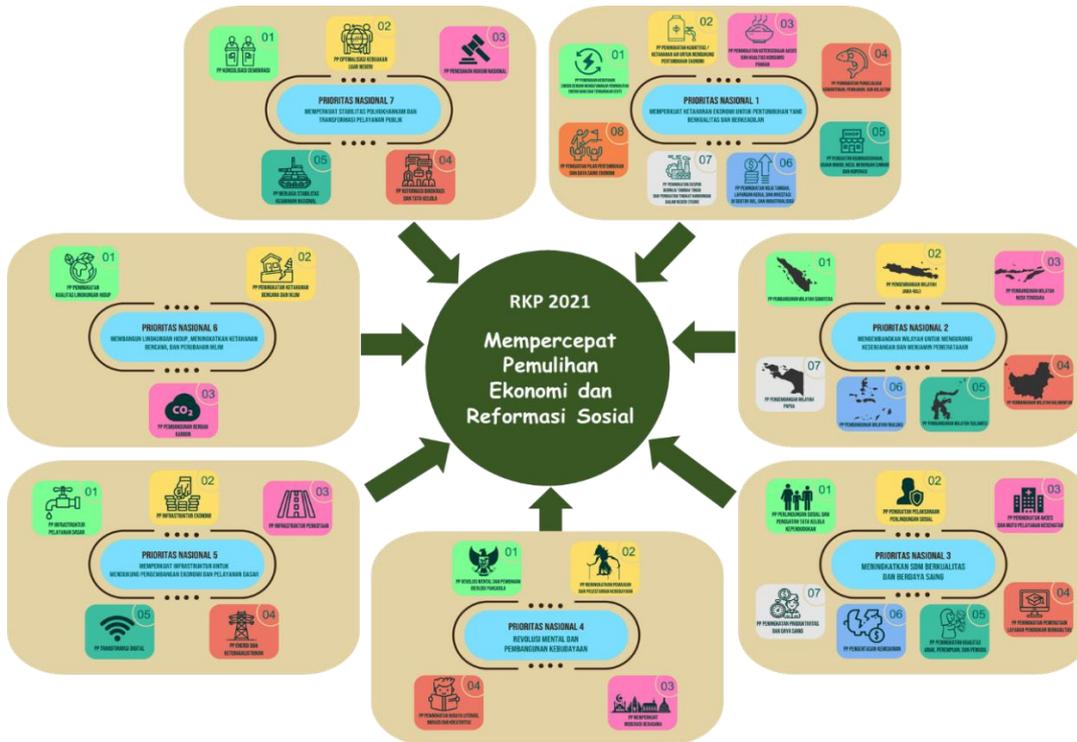
Dalam penyusunan RKP 2021, terdapat 3 (tiga) Kedeputusan yang tidak secara langsung menjadi penanggung jawab penyusunan Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menjadi wakil penanggung jawab (pendukung) PN 3;
- Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan bertugas memastikan alokasi pendanaan pembangunan (PN, PP, KP, ProP) dan alokasi anggaran K/L.
- Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menjadi ketua tim penyusunan RKP 2021 sekaligus bertugas melakukan evaluasi terhadap capaian RKP 2020 sebagai dasar perencanaan Rancangan RKP 2022.



Sedangkan untuk gambaran Program Prioritas (PP) yang mendukung Prioritas Nasional (PN) yang menjadi tanggung jawab unit kerja Kedeputusan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6. Pemetaan Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021



Sumber: RKP 2021 (diolah, 2020)

Secara keseluruhan penilaian capaian kinerja keselarasan berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa dari semua indikator dalam PN, PP, KP, dan ProP telah terpetakan berdasarkan RKP 2021. Sedangkan untuk output kegiatan K/L dalam Renja K/L dan RKA K/L dipetakan berdasarkan data pada aplikasi KRISNA RKP 2021. Semua output K/L yang telah tercatat pada aplikasi KRISNA tersebut akan dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2021.

Adapun Kamus indikator kinerja Tahun 2020 yang secara substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

Tabel 2.5. Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	<b>IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b>  <b>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</b> = Pembobotan nilai [(Nilai Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat X 0,40) + (Nilai Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat X 0,40) + (Nilai Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah X 0,20)]</li> <li>▪ <b>Tipe perhitungan: kumulatif</b></li> <li>▪ <b>Sumber data: Dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RKP 2021 Pemutakhiran, Renstra K/L 2020-2024, Renja K/L 2021, RKA K/L 2021, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi 2021</b></li> </ul>
	<b>a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b>  <b>Nilai Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat</b> = (% Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025 X 0,20) + (% Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 X 0,25) + (% Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 X 0,20) + (% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021 X 0,35)</li> <li>▪ <b>Tipe perhitungan: kumulatif</b></li> <li>▪ <b>Sumber data: Dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RKP 2021 Pemutakhiran, Renstra K/L 2020-2024, Renja K/L 2021</b></li> </ul>

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p><b>Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Formulasi pengukuran</b> </li> </ul> $\% \text{ Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025} = \frac{\text{Jumlah Sasaran dalam tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang selaras Dengan Sasaran RPJPN 2005-2025}}{\text{Jumlah Total Sasaran dalam tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Tipe perhitungan: kumulatif</b> </li> <li> <b>Sumber data: Sasaran RPJPN 2005-2025 dan Sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024</b> </li> </ul> <hr/> <p><b>Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Formulasi pengukuran</b> </li> </ul> $\% \text{ Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024} = \frac{\text{Jumlah Sasaran/Indikator Renstra K/L 2020-2024 yang selaras dengan Sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024}}{\text{Jumlah Total Sasaran/Indikator Renstra K/L 2020-2024}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Tipe perhitungan: kumulatif</b> </li> <li> <b>Sumber data: Sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dan Sasaran/Indikator Renstra K/L 2020-2024</b> </li> </ul>

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p><b>Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formula pengukuran</b></li> </ul> $\% \text{ Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024} = \frac{\text{Jumlah muatan PP (Program Prioritas) dalam RKP yang selaras dengan RPJMN lingkup bidangnya}}{\text{Jumlah total muatan PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tipe perhitungan: kumulatif</b></li> <li><b>Sumber data: Indikator dan target PP-KP-ProP dalam PN RKP 2021 Pemutakhiran dan Indikator dan target PP-KP-ProP dalam Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024</b></li> </ul> <hr/> <p><b>Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formula pengukuran</b></li> </ul> $\% \text{ Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021} = \frac{\text{Jumlah muatan Renja K/L yang selaras dengan output K/L dlm RKP (penterjemahan sasaran PP/KP)}}{\text{Jumlah total muatan output RKP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tipe perhitungan: kumulatif</b></li> <li><b>Sumber data: Kegiatan dan RO Renja K/L 2021 dan Indikator dan target PP-KP-ProP dalam PN RKP 2021 Pemutakhiran</b></li> </ul>
	<p><b>b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formula pengukuran: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat diukur melalui Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021</b></li> </ul> $\text{Nilai Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat} = (\% \text{ Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021} \times 1,00)$

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p><b>% Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021</b> = <math display="block">\frac{\text{Jumlah muatan Renja K/L yang dianggarkan dalam RKA- K/L dan selaras/sesuai dengan bidang RKP (Program Prioritas)}}{\text{Jumlah PP RKP yang di bawah PN yang diampu}} \times 100\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: RO-Target RO dan ALokasi RO RKA K/L 2021 dan RKP 2021 Pemutakhiran</li> </ul>
	c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formula pengukuran: Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah diukur melalui Pengukuran melalui perhitungan keselarasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RPJMN) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Provinsi (RPJMD)</li> <li>▪ Sinergi Sasaran/Target Pembangunan Makro Nasional (RKP) terhadap Sasaran/Target Pembangunan Makro Daerah (RKPD Provinsi)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah</b> = <math display="block">\text{Pembobotan Nilai } [(\% \text{ Keselarasan Muatan RPJMD Provinsi dengan RPJMN } \times 0,50) + (\% \text{ Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKP } \times 0,50)]</math></p> <p><b>% Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKP</b> = <math display="block">\frac{\text{Jumlah Provinsi Mengusulkan Kegiatan Mendukung PP ke-}n \text{ dalam PN ke-}n}{\text{Jumlah Provinsi Lokus Prioritas PP ke-}n \text{ dalam PN ke-}n} \times 100\%</math></p> <p><b>% Keselarasan Muatan RPJMD Provinsi dengan RPJMN</b> = <math display="block">\frac{\text{Jumlah Provinsi Mengusulkan Kegiatan Mendukung PP ke-}n \text{ dalam Agenda Pembangunan ke-}n}{\text{Jumlah Provinsi Lokus Prioritas PP ke-}n \text{ dalam Agenda Pembangunan ke-}n} \times 100\%</math></p>

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: aplikasi e-Musrenbang dan RKP 2021 Pemutakhiran</li> </ul>
	<b>IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formula pengukuran: Persentase Rata-rata (jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi + jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan + jumlah peserta terlatih + tingkat Kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP)</li> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)</li> </ul>
SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	<b>IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formula pengukuran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian Kinerja PN RKP 2020</li> </ul> <math display="block">KPNi = (0,5 \times KSPNi) + (0,5 \times KOPNi)</math> <p>dimana:</p> <p>KPNi adalah rata-rata kinerja PN ke-i;                KSPNi adalah kinerja berdasarkan capaian sasaran PN ke-i;                KOPNi adalah kinerja berdasarkan dukungan output K/L PN ke-i.</p> </li> <li>▪ Capaian Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional                Diukur dari: Rata-rata Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat dan Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</li> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: Laporan Evaluasi Kinerja PN RKP 2020 oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li> </ul>

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
	<b>a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b> <math display="block">\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi dalam mendukung capaian PN RKP yang Ditindaklanjuti K/L}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi yang dihasilkan untuk pengendalian capaian PN RKP}} \times 100\%</math> </li> <li>▪ <b>Tipe perhitungan: kumulatif</b></li> <li>▪ <b>Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</b></li> </ul>
	<b>b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dicapai melalui jumlah K/L/D yang menindaklanjuti rencana percepatan pelaksanaan pembangunan.</b> <math display="block">\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah} = \frac{\text{Jumlah Realisasi K/L/D Pelaksana Penugasan Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan}}{\text{Jumlah K/L/D Pelaksana Penugasan Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan}} \times 100\%</math> </li> <li>▪ <b>Tipe perhitungan: kumulatif</b></li> <li>▪ <b>Sumber data: hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan dan hasil pengukuran dari Kedeputusan Pengembangan Regional.</b></li> </ul>
SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	<b>IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b> <math display="block">\% \text{ Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L}}{\text{Jumlah Total rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan yang dihasilkan Bappenas utk dijalankan K/L}} \times 100\%</math> </li> </ul>

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: Laporan Kinerja UKE I (hasil pengukuran kajian/kebijakan yang dilakukan oleh Unit Kerja Kedeputan)</li> </ul>
	<p><b>IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b> <math display="block">\% \text{ Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan K/L}}{\text{Jumlah Total rekomendasi inovasi pembangunan yang dihasilkan Bappenas untuk dijalankan K/L}} \times 100\%</math> </li> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: hasil pengukuran kajian/kebijakan/kegiatan inovatif yang dilakukan oleh Unit Kerja Kedeputan</li> </ul>
<p>SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM</p>	<p><b>IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil pengukuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> </ul> <p>Masing-masing dari penilaian ini dibobot secara merata sehingga didapat nilai dan dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. (Baik Sekali = 91 - 100%; Baik = 81 - 90%; Cukup baik = 71 - 80%; Kurang baik = &lt; 70%).</p>
	<p><b>IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b> metode survei kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) melalui pengisian kuesioner</li> <li>▪ Tipe perhitungan: kumulatif</li> <li>▪ Sumber data: Laporan Kinerja UKE I (hasil survei kepuasan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) di bidang perencanaan pembangunan nasional di unit kerja Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
	<p><b>IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formula pengukuran:</b> melakukan telaah aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kemudian diformulasi dalam rumus:</li> </ul>



Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU 2020-2024	Kamus
		<p><b>% Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</b> = <math>\frac{\text{Jumlah aplikasi data dan informasi yang saling/berpotensi berintegrasi}}{\text{Jumlah total aplikasi data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas harus diintegrasikan}} \times 100\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tipe perhitungan: non kumulatif</b></li> <li>▪ <b>Sumber data:</b> hasil pengukuran yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan</li> </ul>

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 (diolah, 2020)

## 2.5. ALOKASI ANGGARAN

### 2.5.1. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.

Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.797.574.025.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.618.149.102.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 141.024.923.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 38.400.000.000,-. Namun pada bulan April terdapat kebijakan Kementerian Keuangan perihal pemotongan anggaran dalam rangka penanggulangan pademik covid-19, sehingga Kementerian PPN/Bappenas mengalami pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.206.521.004.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 998.035.305.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 147.818.412.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 60.667.287.000,-. Secara rinci perubahan alokasi anggaran tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6. Alokasi Anggaran dan Perubahannya Tahun 2020**

NO	PROGRAM	PAGU		SELISIH
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	907.887.289.000	637.185.373.000	270.701.916.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	878.986.736.000	562.659.605.000	316.327.131.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.700.000.000	6.676.026.000	4.023.974.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.797.574.025.000</b>	<b>1.206.521.004.000</b>	<b>591.053.021.000</b>

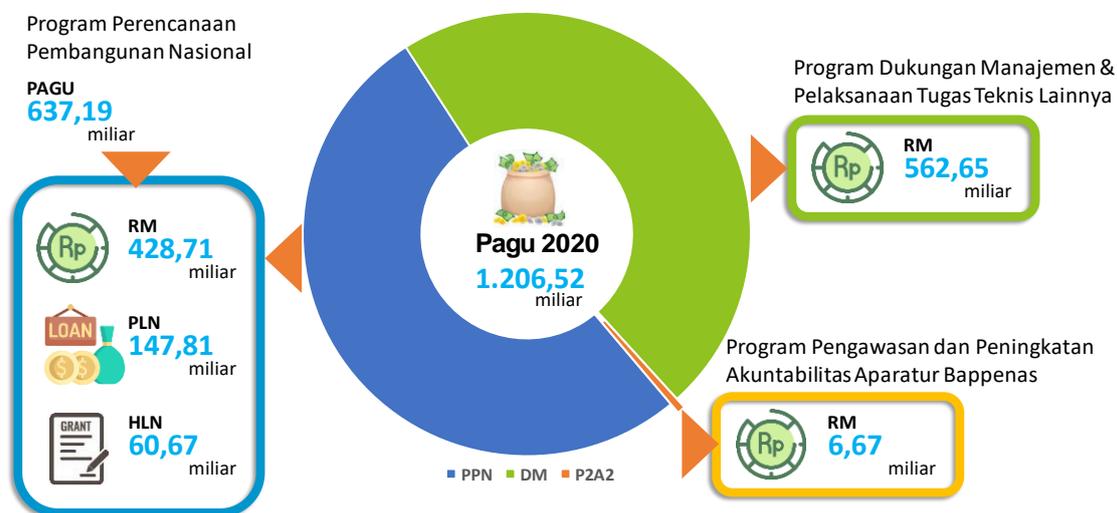
Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 3 (tiga) Program, seperti yang terlihat pada tabel 2.9 dan gambar 2.6.

Tabel 2.7. Program dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU RM	PAGU PLN	PAGU HLN	JUMLAH
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	428.699.674.000	147.818.412.000	60.667.287.000	637.185.373.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	562.659.605.000	-	-	562.659.605.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	6.676.026.000	-	-	6.676.026.000
<b>JUMLAH</b>		<b>998.035.305.000</b>	<b>147.818.412.000</b>	<b>60.667.287.000</b>	<b>1.206.521.004.000</b>

Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

Gambar 2.7. Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020



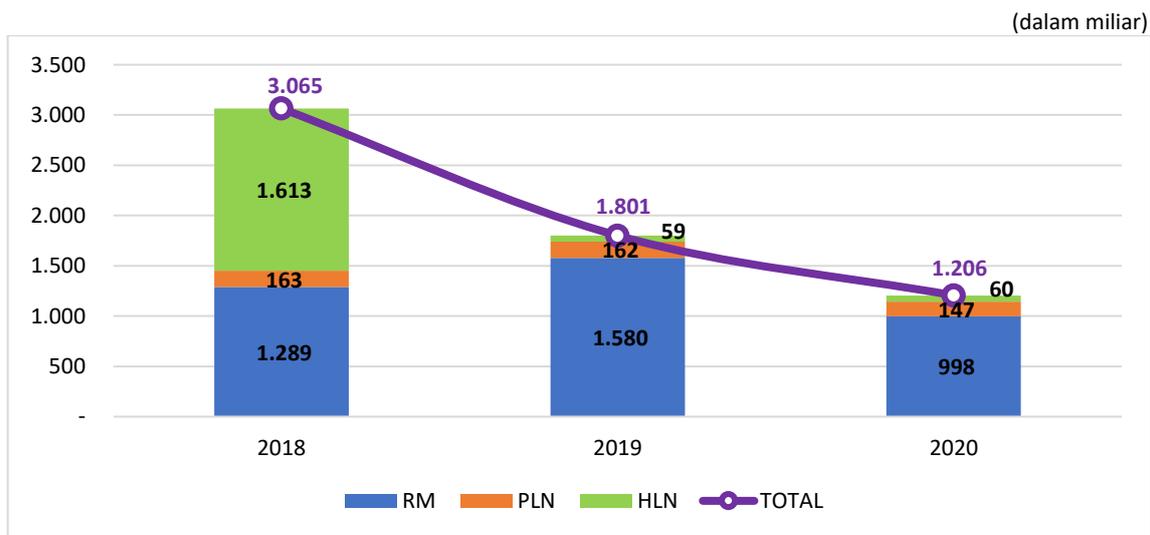
Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

Anggaran pada tahun 2020 tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis, money follows program dan lintas bidang/sector serta difokuskan pada penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, antara lain melalui kegiatan kajian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Secara keseluruhan, alokasi anggaran tahun 2020 meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini sejalan dengan meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan pertambahan lingkup tugas baru, diantaranya seperti: Kajian Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Rendah Karbon, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan Indonesia Development Forum (IDF).

### 2.5.2. Perbandingan Alokasi anggaran Tahun 2019-2020

Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan pada bulan April tahun 2020 adanya kebijakan Kementerian Keuangan perihal pemotongan anggaran dalam rangka penanggulangan pademik covid-19. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8. Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018-2020



Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

### SATKER DEKONSENTRASI

Satker ini terdiri dari 31 Provinsi dan dikelola oleh 31 PPK. Menurut PP No 7 Tahun 2008 Pasal 1, Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional serta fungsi yang mencakup antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

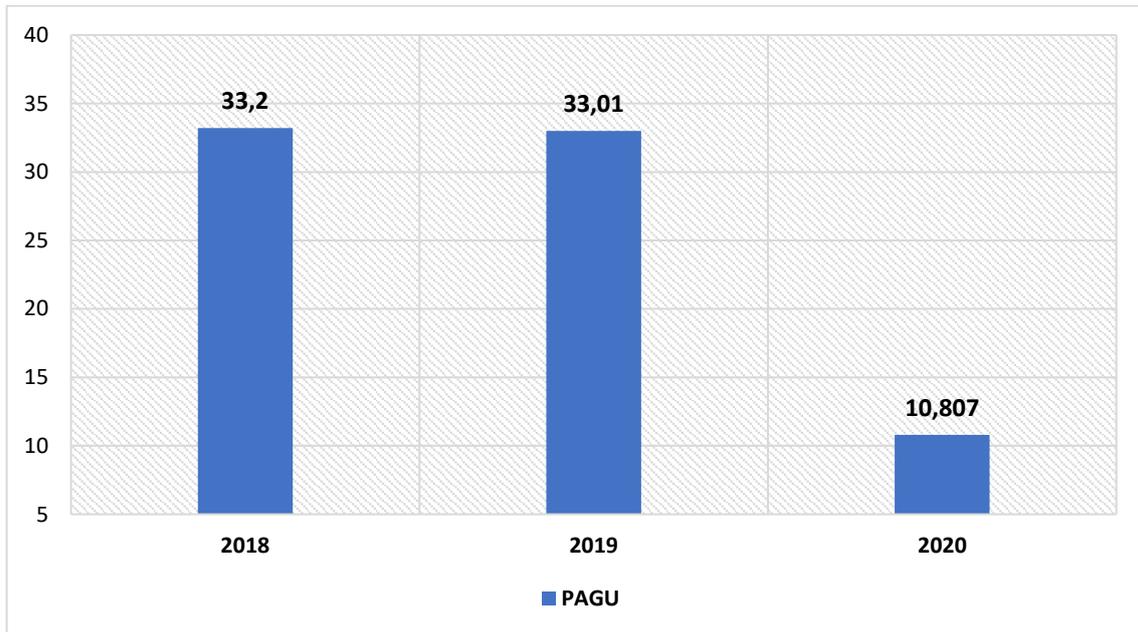
**Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020**

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN
1	Provinsi Jawa Tengah	572.216.000
2	Provinsi DIY	271.924.000
3	Provinsi Jawa Timur	235.822.000
4	Provinsi Aceh	261.320.000
5	Provinsi Sumatera Utara	103.704.000
6	Provinsi Sumatera Barat	385.727.000
7	Provinsi Riau	290.934.000
8	Provinsi Jambi	239.700.000
9	Provinsi Sumatera Selatan	383.051.000
10	Provinsi Lampung	555.717.000
11	Provinsi Kalimantan Barat	278.522.000
12	Provinsi Kalimantan Tengah	248.740.000
13	Provinsi Kalimantan Selatan	355.794.000
14	Provinsi Kalimantan Timur	383.103.000
15	Provinsi Sulawesi Utara	600.776.000
16	Provinsi Sulawesi Tengah	292.896.000
17	Provinsi Sulawesi Selatan	106.088.000
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	261.903.000
19	Provinsi Maluku	683.884.000
20	Provinsi Bali	395.145.000
21	Provinsi NTB	425.577.000
22	Provinsi NTT	328.320.000
23	Provinsi Bengkulu	466.219.000
24	Provinsi Maluku Utara	361.123.000
25	Provinsi Banten	226.395.000
26	Provinsi Bangka Belitung	249.113.000
27	Provinsi Gorontalo	604.624.000
28	Provinsi Kepulauan Riau	243.999.000
29	Provinsi Papua Barat	260.448.000
30	Provinsi Sulawesi Barat	277.340.000
31	Provinsi Kalimantan Utara	457.146.000
<b>JUMLAH</b>		<b>10.807.270.000</b>

Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

Gambar 2.9. Perkembangan Alokasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2018-2020

(dalam miliar)



Sumber: Biro Renortala (diolah, 2021)

3

## Akuntabilitas Kinerja



## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan Daerah, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 memuat 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat kementerian yaitu:

1. Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja kementerian/lembaga/daerah;
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (Perpres RKP);
3. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;
4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai kedua tujuan tersebut.

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Kementerian	Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	96,05%	98,54%	99,70%	99,91%	100%
2	Rancangan Perpres RKP	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Kementerian	Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	92,38%	90,35%
4	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

Capaian kinerja pertama yang diukur dari keselarasan muatan sasaran RKP terhadap RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L terlihat dari tren peningkatan kualitas keselarasan perencanaan pembangunan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L setiap tahun. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan antara RKP terhadap Renja K/L dan RKA K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai pelaksana perencanaan.

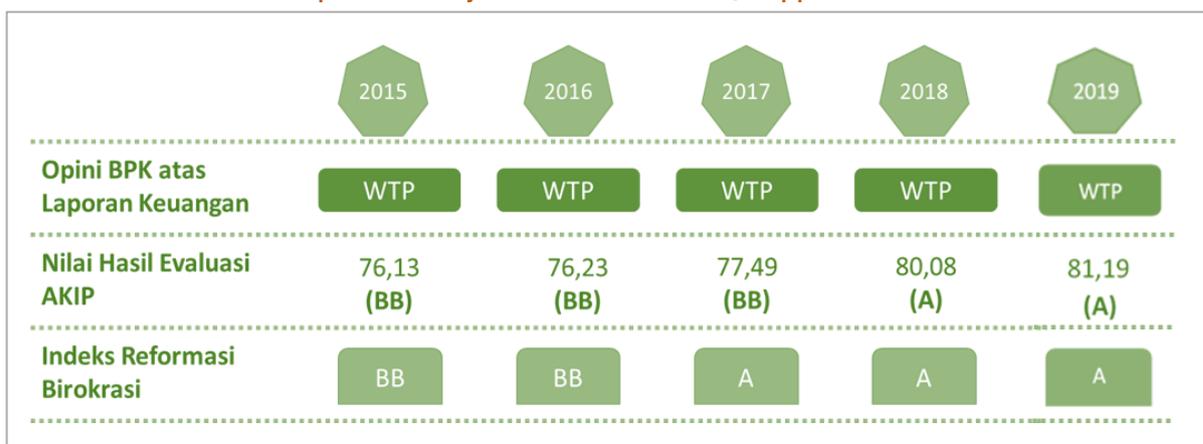
Terkait dengan pencapaian kinerja kedua, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu 2015-2019 telah menghasilkan beberapa produk perencanaan seperti: (i) dokumen Visi Indonesia 2045 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJP 2025-2045; (ii) Rancangan RPJMN 2020-2024; (iii) pengembangan sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)); serta (iv) penerapan prinsip *money follows program* serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan perencanaan tersebut berimplikasi kepada dimulainya proses perencanaan dalam koridor Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN). Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/ target/indikator PN secara bersama-sama oleh K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai sasaran PN yang tersebut pada tingkat kewilayahan.

Capaian kinerja yang ketiga “Persentase Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” dilakukan dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan RKP 2019 terlihat telah mencapai 90,35%. Pencapaian kinerja ini menghadapi kendala terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/sub komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam Prioritas Nasional RKP 2019. Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di masa mendatang diharapkan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan sinergitas program pembangunan K/L/D; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP; dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas nasional RKP.

Capaian kinerja ke empat terkait peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan "Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang terlihat pada Gambar 3. Selama periode tahun 2015-2019 secara konsisten dicapai Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Selain itu, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu meningkat dan hasil penilaian tahun 2019 berhasil mencapai predikat "A", sedangkan Indeks RB juga konsisten meningkat dan hingga 2019 juga mencapai predikat "A".

**Gambar 3.1. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019**



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

### 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020

Pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan realisasinya. IKU 2020-2024 berbeda dengan IKU 2015-2019 dari segi indikator kinerja, target dan perhitungan sehingga tidak bisa diperbandingkan perkembangannya. Namun, IKU 2020-2024 merupakan keberlanjutan IKU 2015-2019 yang dielaborasi indikator dan pengukurannya lebih detail dan akurat. Dengan demikian, diharapkan IKU 2020-2024 dapat lebih SMART daripada IKU 2015-2019 serta dapat meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dokumen RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Selain itu, pada bulan September tahun 2020 terdapat penetapan restrukturisasi organisasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 dapat dikatakan sebagai masa transisi dikarenakan pengukuran capaiannya masih berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020 IKU 2015-2019 di-*bridging* ke IKU 2020-2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2020.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 ini menggunakan elaborasi PK 2020 (IKU 2015-2019) di-*bridging* ke IKU 2020-2024. Hal ini dikarenakan PK 2020 masih menggunakan struktur, nomenklatur dan anggaran berdasarkan IKU 2015-2019. Namun, capaian kinerja harus mencerminkan capaian target IKU 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Adapun capaian IKU PK 2020 yang di-*bridging* ke IKU 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020  
(*Bridging* IKU PK 2020 ke IKU 2020-2024)**

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU Perjanjian Kinerja 2020		IKU Renstra 2020-2024	Capaian 2020	
	IKU PK 2020	Penjelasan Bridging		Target	Realisasi
SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKU 1: Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	IKU 1 PK 2020 mengalami penajaman menjadi IKU 1 Renstra 2020-2024	IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	93,55
			IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	99,19%
	IKU 2: Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020	IKU 2 PK 2020 tetap dimunculkan dalam Laporan Kinerja 2020		1 dokumen	1 dokumen
SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKU 3: Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana	IKU 3 PK 2020 mengalami penajaman menjadi IKU 3, 4, 5 di dalam IKU Renstra 2020-2024	IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	80-83,9%	100%

Sasaran Strategis (SS) 2020-2024	IKU Perjanjian Kinerja 2020		IKU Renstra 2020-2024	Capaian 2020	
	IKU PK 2020	Penjelasan Bridging		Target	Realisasi
	Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L		b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah		
SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner			IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%
			IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%
SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	IKU 4: Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	IKU 4 PK 2020 mengalami penajaman menjadi IKU 2, 6, 7 di dalam IKU Renstra 2020-2024	IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas	83,00	85,01
			IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	91,17
			IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88,89%

Sumber: Hasil Analisa Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 dapat dikatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya sudah sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun secara keseluruhan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya masih perlu ditingkatkan. **Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%** yang dihitung dari capaian dari seluruh sasaran kinerja.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, untuk mengetahui adanya peningkatan capaian kinerja IKU di tahun 2020 perlu disandingkan capaian kinerja IKU tahun 2020 dengan capaian kinerja IKU tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja IKU tahun 2019 dengan IKU tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas  
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%	100%	100%	100%
		Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	90,35%	100%	100%
2	Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas dan Laporan Kinerja UKE I, 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja IKU dalam Perjanjian Kinerja 2020 telah tercapai dengan baik 100% serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun pada IKU Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah yang belum terpenuhi sesuai target IKU Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (jika dibandingkan dengan tabel sebelumnya). Hal ini dikarenakan IKU dan PK 2020-2024 berbeda dengan IKU dan PK 2015-2019 dalam hal indikator, target dan perhitungan. Adapun capaian IKU ke-1 2020-2024 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 93,55 (belum mencapai Indeks 100) tetapi sudah bisa dielaborasi tercapai indeks 100 dikarenakan telah melebihi kategori indeks >100.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi diantaranya seperti:

1. Terjadinya wabah pandemik Covid-19 yang dampaknya menghambat pembangunan di berbagai sektor pembangunan nasional dan mengakibatkan terkontraksi capaian indikator pembangunan makro.
2. Ketidakselarasan sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah disebabkan: (a) adanya muatan RKP 2020 tidak sesuai dengan PP-KP-ProP RKP 2020; dan (b) adanya muatan RPJMD 2020 tidak sesuai dengan PP-KP-ProP RPJMN 2020-2024. Akhirnya berakibat tidak langsung pada capaian pembangunan tahun 2020.
3. Ketidakselarasan nomenklatur dan anggaran: (1) muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan muatan RKP 2021; dan (2) muatan RKA K/L dengan muatan RKP 2021. Keselarasan tidak

dapat maksimal dengan adanya kebijakan penanganan pandemi dan *refocusing* anggaran K/L.

4. Belum optimalnya peran pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terhadap pelaksanaan Output Kegiatan K/L yang mendukung tercapainya sasaran/target Prioritas Nasional RKP 2020.

Upaya peningkatan yang akan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas kedepan guna tercapai kinerja IKU sesuai target sehingga terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berkualitas dan kredibel diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan soliditas dan koordinasi internal unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Meningkatkan hubungan dan koordinasi yang lebih baik dengan Mitra K/L dan daerah.
3. Memperkuat peran penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2020, terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) IKU yang selanjutnya akan dilakukan pengukuran menggunakan *bridging* IKU 2020-2024 melalui koridor Prioritas Nasional (PN). Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja akan diuraikan sebagai berikut:



## Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian sasaran strategis merupakan wujud dari penguatan peran *enabler* Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya percepatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat maupun daerah. Secara umum, **Sasaran Strategis (SS) ke-1 ini tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (ii) Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi. Kedua IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 di dalam IKU 1 dan sesuai dengan *bridging* IKU 1 Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

## IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” telah dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan bridging IKU 2020–2024 yang dikonversi dari satuan persen ke satuan nilai sehingga mendapat nilai capaian kinerja IKU sebesar 93,55 dari 75. Bisa dikategorikan tercapai 100% karena telah melebihi target.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur melalui 3 (tiga) indikator penilaian dari: (1) aspek Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; dan (3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini ditujukan untuk mendukung terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel. Adapun cara pengukuran ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Capaian Kinerja  
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020**

No.	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	99,85	0,40	39,94
2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat	99,29	0,40	39,72
3	Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	69,48	0,20	13,90
<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</b>				<b>93,55</b>

Sumber: Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020) dan Hasil Analisa Bappenas (diolah, 2020)

Keterangan:

1. Komponen Nilai kolom 3 secara rinci detail dapat dilihat pada Tabel 3.4.
2. Kolom 5 = (Kolom 3 x Kolom 4)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator integrasi dan sinkronisasi belum mencapai nilai 100. Hal ini dikarenakan ketidakselarasan nomenklatur dan anggaran Renja K/L 2021 dan RKA K/L 2021 terhadap RKP 2021 akibat adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran K/L.

Selain itu capaian kinerja indikator sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah masih belum mencapai target 100. Belum sinergi perencanaan pusat dan daerah ini terjadi dikarenakan belum terwujudnya keselarasan muatan RPJMN terhadap muatan

RPJMD dan keselarasan muatan RKP dan RKPD Provinsi, serta beberapa penyebab lainnya, antara lain:

1. Belum optimalnya pendampingan maupun bimbingan teknis dalam penyusunan RPJMD maupun RKPD Provinsi.
2. Belum optimalnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Pemerintah Provinsi tidak mengusulkan Proyek Prioritas (ProP) dalam Prioritas Nasional yang menjadi kewenangan pembangunan daerah di aplikasi e-Musrenbang.

Upaya peningkatan pencapaian kinerja Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Regional akan melakukan diantaranya menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pada pertengahan tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas berinisiasi menyusun regulasi tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 dalam bentuk Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani bersama pada bulan Januari 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keselarasan antara pembangunan daerah dengan pembangunan Nasional dan guna menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan pedoman dalam perubahan RPJMD yang perodesasinya di bawah Tahun 2024.

Berkaitan dengan upaya perbaikan keselarasan RKPD Provinsi terhadap RKP, Kementerian PPN/Bappenas akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, utamanya Desk Pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan untuk penyusunan RKP 2022. Hal ini akan ditindaklanjuti pada penyusunan RKP tahun 2022.

Apabila dilihat secara keseluruhan penilaian capaian kinerja keselarasan berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa dari semua indikator dalam PN, PP, KP, dan ProP telah terpetakan berdasarkan RKP 2021. Sedangkan untuk output kegiatan K/L dalam Renja K/L dan RKA K/L dipetakan berdasarkan data pada aplikasi KRISNA RKP 2021. Semua output K/L yang telah tercatat pada aplikasi KRISNA tersebut akan dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2021.

Guna terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel perlu didukung pula keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional mulai dari RPJPN, RPJMN, RKP hingga RKA K/L. Untuk mengetahui capaian keselarasan dokumen perencanaan nasional dimaksud dapat dilihat pada rincian capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Tabel 3.3, capaian kinerja secara detail terkait capaian kinerja IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.5. Rincian Detail Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020

NO	IKU PK Menteri 2020	Bridging Pengukuran IKU 2020-2024	IKU 2020	Capaian Keselarasan per Prioritas Nasional (PN) RKP 2021							Rata- rata Capaian PN	Bobot	Nilai Capaian PN	Nilai Capaian per Komponen
				PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IKU 1	Persentase % Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005- 2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,20	20	99,85
			Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020- 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,25	25	
			Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020- 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,20	20	
			Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99,57%	0,35	34,85	

NO	IKU PK Menteri 2020	Bridging Pengukuran IKU 2020-2024	IKU 2020	Capaian Keselarasan per Prioritas Nasional (PN) RKP 2021							Rata- rata Capaian PN	Bobot	Nilai Capaian PN	Nilai Capaian per Komponen
				PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			dengan Muatan RKP 2021											
		<b>Sinkronisasi Perencanaan dan Panganggaran Pembangunan Pusat</b>	Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	99,29%	1,00	99,29	99,29
		<b>Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah</b>	Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMD dengan Muatan RPJMN 2020- 2024	-	67,16%	-	-	-	-	-	67,16%	0,50	33,58	69,48
			Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP Provinsi 2021 dengan Muatan RKP 2021	-	71,79%	-	-	-	-	-	71,79%	0,50	35,90	

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Keterangan:

1. Kolom 12 berasal dari rata-rata Kolom 5+6+7+8+9+10+11
2. Kolom 14 berasal dari (Kolom 12 x Kolom 13)
3. Kolom 15 berasal dari penjumlahan Kolom 14 dalam lingkup yang sama di Kolom 3
4. tanda "-" maksudnya hasil capaian kinerja Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah hanya diukur pada PN 2 "Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" yang diampu oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional

Tabel di atas merupakan rekapitulasi untuk mengukur elaborasi IKU PK 2020 di-*bridging* ke IKU 2020-2024 “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” yang menunjukkan keselarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional mulai dari RPJPN, RPJMN, Renstra K/L, RKP hingga RPJMD/RKPD pada masing-masing penanggungjawab PN RKP 2021 guna terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel. Berikut penjelasan singkat ketiga indikator penilaian pada tabel di atas:

#### A. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT

##### 1) Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007, penyusunan RPJMN disusun sesuai dengan RPJP Nasional dengan tujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (5 tahunan). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan indikator yang harus dicapai yaitu keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN 2005-2025. Indikator keselarasan antara RPJMN dan RPJPN menjadi penting karena dapat memberi gambaran kegiatan-kegiatan jangka menengah berjalan secara berkelanjutan/konsistensi untuk mendukung percepatan rencana jangka Panjang.



Berdasarkan Perjajinan Kinerja dan kamus Indikator 2020, muatan RPJPN dengan RPJMN dikatakan selaras jika arah kebijakan/sasaran pokok RPJMN 2020-2024 secara substansi sesuai dengan sasaran di RPJPN 2005-2025. Secara keseluruhan, **Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025 telah tercapai 100%**, sehingga dapat diartikan bahwa seluruh sasaran dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 telah terpetakan langsung/relevan dengan sasaran dan arah kebijakan RPJPN 2005-2025.

Capaian keselarasan tersebut dapat dicapai melalui proses iterasi dengan cara memetakan program prioritas, kegiatan prioritas, beserta sasaran dan indikatornya memiliki keselarasan antara RKP 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu dengan harapan setiap periode pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dapat menyelesaikan permasalahan fundamental pembangunan di Indonesia sehingga dapat menjadi negara berpenghasilan tinggi sebagaimana cita-cita yang dimuat di dalam Visi 2045 dan konteks tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.

Berikut ini disajikan secara rinci hasil rekapitulasi keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan muatan RPJPN 2005-2025 dari seluruh Penanggung Jawab Prioritas Nasional guna terwujudnya kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang berkualitas dan kredibel, pengukuran keselarasan IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6. Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025**

Prioritas Nasional RKP 2021	Jumlah Muatan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJPN 2005-2025	Jumlah Total Muatan RPJMN 2020-2024	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	2	2	100%
PN 2	1	1	100%
PN 3	6	6	100%
PN 4	6	6	100%
PN 5	5	5	100%
PN 6	3	3	100%
PN 7	5	5	100%
<b>TOTAL</b>			
<b>Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025</b>			<b>100%</b>

Sumber: Laporan Kinerja UKE I, RPJPN 2005-2025, dan RPJMN 2020-2024 (diolah, 2020)

Keterangan:

Kolom 1: Struktur PN RKP 2020-2024 sama dengan struktur Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Kolom 2: Jumlah Muatan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJPN 2005-2025 adalah: **jumlah sasaran setiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **Sasaran RPJPN 2005-2025**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan RPJMN 2020-2024 adalah jumlah total sasaran setiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa keselarasan tersebut telah mengalami pencapaian yang optimal. Hal ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dari masa ke masa, sehingga permasalahan pembangunan nasional dapat secara diatasi.

Sebagai contoh keselarasan Keselarasan Muatan RPJMN 2020-2024 dengan Muatan RPJPN 2005-2025 adalah terkait "Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia" terpetakan langsung/relevan ke dalam sasaran RPJMN 2020-2024 terkait "Meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian; Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi; Melanjutkan

pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif; dan Peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir".

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat **secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputian.**

## 2) Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Kementerian/Lembaga harus menyusun Renstra yang berpedoman dan selaras dengan RPJMN. Penyelarasan antara RPJMN dengan Renstra K/L menjadi sangat penting untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan dalam RPJMN.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Kamus Indikator 2020, muatan substansi dalam Renstra K/L 2020-2024 telah selaras dengan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian secara keseluruhan, **Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 telah tercapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh sasaran RPJMN 2020-2024 telah terpetakan langsung/relevan dengan indikator Renstra K/L 2020-2024 atau dapat diartikan bahwa seluruh Renstra K/L telah sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan RPJMN 2020-2024.

Keselarasan dalam pencapaian tersebut diperlukan adanya aspek integrasi yang ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat, salah satunya dilihat dari keselarasan muatan RPJMN/Renja K/L dengan Renstra K/L (diukur hanya untuk 1 tahun pertama). Dikarenakan tahun 2020 adalah tahun pertama penyusunan rencana jangka menengah, sehingga indikator ini perlu dilihat keselarasannya.

Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi tantangan besar yang mempengaruhi keselarasan indikator tersebut. Mayoritas dari K/L mitra PN 1 melakukan penyesuaian Renstranya pada tahun 2020 dan berencana akan melakukan lagi penyesuaian di tahun 2021 untuk dapat mengakomodir goncangan yang terjadi akibat pandemi. Oleh karena itu, penelaahan keselarasan dilakukan terhadap dokumen Renstra K/L baseline, yaitu Renstra K/L sebelum memasukan dampak pandemi dengan pertimbangan bahwa dokumen RPJMN 2020-2024 juga tidak direvisi dan tidak menggambarkan kondisi setelah adanya pandemi COVID-19.

Keselarasannya mengalami konsistensi capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Koordinasi yang semakin intensif dengan mitra K/L;
2. Komitmen bersama terhadap arahan Presiden RI yang dituangkan di dalam agenda pembangunan 2020-2024.

Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas akan terus berupaya menyelaraskan Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024 melalui pemanfaatan teknologi supaya tidak ada *barrier* dalam hal koordinasi dan komunikasi. Keselarasan tersebut harus terus dijaga terutama dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19, serta mengawal K/L/D mitra untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Berikut ini disajikan secara singkat hasil rekapitulasi keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan muatan RPJPN 2005-2025 dari seluruh Penanggung Jawab Prioritas, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7. Rekapitulasi (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024**

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024 (K/L)	Jumlah Total Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 (K/L)	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	10	10	100%
PN 2	9	9	100%
PN 3	20	20	100%
PN 4	14	14	100%
PN 5	7	7	100%
PN 6	7	7	100%
PN 7	31	31	100%
<b>TOTAL</b>			
<b>Persentase (%) Keselarasan Muatan Renstra K/L 2020-2024 dengan Muatan RPJMN 2020-2024</b>			<b>100%</b>

Sumber: Daftar Mitra K/L (diolah, 2021) dan Laporan Kinerja UKE I, 2020

Keterangan:

Kolom 1: Struktur PN RKP 2020-2024 sama dengan struktur Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Kolom 2: Jumlah Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024 adalah **jumlah Renstra Mitra K/L 2020-2024** dilihat dari indikator dan target yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **sasaran tiap Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan Renstra Mitra K/L 2020-2024 adalah Jumlah Total Indikator Renstra Mitra K/L 2020-2024

Sebagai contoh keselarasan tabel di atas, adalah sasaran RPJMN 2020-2024 terkait “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian” telah terpetakan langsung/relevan kedalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 dalam indikator kinerja seperti: Rasio perpajakan terhadap PDB; Rasio perpajakan terhadap PDB; dan Persentase penyelesaian proyek strategis TIK.

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat **secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputian.**

### 3) Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024

Sesuai kamus indikator pengukuran aspek integrasi keselarasan RPJMN dan RKP perlu di ukur untuk setiap PN nya. Sedangkan capaian level PP, KP hingga ProP telah diukur pada tingkat UKE I dan UKE II.

Indikator persentase keselarasan muatan antara RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024 digunakan untuk mengukur keselarasan muatan antara RKP 2021 yang telah disusun dengan muatan RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini capaian kinerja organisasi diukur dengan melihat keselarasan muatan (prioritas nasional, program sasaran dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa muatan dokumen RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024



Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. RPJMN harus selaras dengan RPJP.

Secara keseluruhan, **keselarasan muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024 mencapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh muatan dalam Sasaran dan Arah Kebijakan Agenda 1 RPJMN 2020-2024 telah terpetakan langsung/relevan ke dalam muatan seluruh koridor Prioritas Nasional (PN) 1 RKP 2021 level PN-PP-KP-ProP termasuk *Major Project*. Perlu diketahui bahwa penyusunan setiap level Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek dalam RKP 2021 telah sama strukturnya dengan level PP/KP/ProP/Proyek dalam RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran Matrik Pembangunan dan *Major Project* pada masing-masing Peraturan Presiden tentang Pemutahiran RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020, maka terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dapat dibuktikan dari indikator persentase (%) keselarasan muatan RKP Tahun 2021 dengan RPJMN 2020-2024.

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024. Untuk memastikan keselarasan antara RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024 dilakukan reviu secara bersama-sama untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalam RPJMN benar-benar dioperasionalkan di kementerian dan lembaga.

Capaian keselarasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Artinya didalam penyusunan RKP 2021, baik dalam koridor PN, PP, KP, ProP selalu mengacu kepada RPJMN 2020-2024 sebagai panduan penyusunan perencanaan.

Keselarasan RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024 (Prioritas Nasional) mengalami konsistensi capaian. Hal ini disebabkan oleh:

1. Koordinasi yang baik dan rutin dengan mitra K/L
2. Penyelarasan RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian keselarasan RKP dan RPJMN dalam koridor PN/PP/KP adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait dalam penyelarasan RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L

Hasil pengukuran indikator kinerja ini berdasarkan pengukuran keselarasan muatan RKP 2021 dengan muatan RPJMN 2020-2024 di level Prioritas Nasional (PN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8. Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024**

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan RKP 2021 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024	Jumlah Total Muatan RKP 2021	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	2	2	100%
PN 2	2	2	100%
PN 3	6	6	100%
PN 4	6	6	100%
PN 5	5	5	100%
PN 6	3	3	100%
PN 7	5	5	100%
<b>TOTAL</b>			
<b>Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2021 dengan Muatan RPJMN 2020-2024</b>			<b>100%</b>

Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021, Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)



Keterangan:

Kolom 2: Jumlah Muatan RKP 2021 yang selaras dengan Muatan RPJMN 2020-2024 adalah: **Jumlah Sasaran di level PN RKP 2021** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **Sasaran di level Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan RKP 2021 adalah Jumlah Sasaran di level PN RKP 2021

Sebagai contoh, keselarasan sasaran di level PN 7 RKP 2021 "Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal" relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan 7 RPJMN 2020-2024 "Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, melalui Konsolidasi Demokrasi". Contoh lainnya, keselarasan sasaran di level PN 5 RKP 2021 "Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar" sesuai/terpetakan dengan sasaran Agenda Pembangunan 5 RPJMN 2020-2024 "Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar".

Contoh berikutnya di level KP, Agenda Pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Sasaran Pembangunan "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian" yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah terpetakan dalam dokumen RKP 2021 melalui Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital dengan Sasaran Kegiatan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dari segi keselarasan *Major Project* RKP 2021 dengan *Major Project* RPJMN 2020-2024, *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dengan indikasi target Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo telah terpetakan langsung ke dalam *Major Project* 10 Destinasi Pariwisata Prioritas RKP 2021 akan dilaksanakan dengan proyek: (1) Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (2) Penataan Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo; (3) SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (4) Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (5) Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun; (7) Bandara Labuan Bajo; dst.

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada **dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan untuk capaian keselarasan muatan RKP 2021 dengan muatan RPJMN 2020-2024 di level PP, KP, dan ProP.**

#### 4) Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021

Realisasi pencapaian indikator kinerja persentase keselarasan muatan Renja K/L 2021 dengan RKP 2021 dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa sasaran atau target RKP 2021 dengan target pada Renja seluruh K/L yang berbasis PN-PP-KP.



Secara keseluruhan, **keselarasan muatan Renja K/L 2021 dengan RKP 2021 dapat tercapai 99,57%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh K/L telah menyusun kegiatan dalam Renja K/L 2021 sesuai/relevan dengan Prioritas Nasional (PN) 1 RKP 2021 level PN-PP-KP-ProP.

Pada bagian ini akan dilihat keselarasan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan dokumen Rencana Kerja (Renja K/L) 2021 yang nantinya diharapkan dapat menunjang tercapainya Agenda Pembangunan. Rencana kerja yang akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebagai acuan melakukan kegiatan harus sesuai dan selaras dengan RKP tahun 2020, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tidak keluar dari prioritas tujuan yang sudah ditentukan sehingga dapat mencapai Agenda Pembangunan dalam RPJMN. Indikator ini dikatakan selaras apabila kegiatan yang ada pada Rencana Kerja K/L secara substansi selaras dan dapat mendukung ketercapaian indikator yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.

Belum optimalnya keselarasan tersebut disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya pendampingan dalam penyusunan Renja K/L 2021 melalui Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting agar selaras dengan RKP 2021; dan
2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan mitra K/L.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian keselarasan Renja dan RKP (Prioritas Nasional) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait dalam penyelarasan Renja K/L 2021 dan RKP 2021; dan
2. Menggunakan teknologi dan informasi dengan mitra K/L secara intensif dan efisien.

Berdasarkan masing-masing koridor PN RKP 2021 tersebut, maka hasil pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan Renja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021**

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan Renja Mitra K/L 2021 yang selaras dengan Muatan RKP 2021	Jumlah Total Muatan Renja Mitra K/L 2021	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	10	10	100%
PN 2	9	9	100%
PN 3	20	20	100%
PN 4	14	14	100%
PN 5	7	7	100%
PN 6	6	7	97%
PN 7	31	31	100%
<b>TOTAL</b>			
<b>Persentase (%) Keselarasan Muatan Renja K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021</b>			<b>99,57%</b>

Sumber: Daftar Mitra K/L (diolah, 2021) dan Laporan Kinerja UKE I, 2020

Keterangan:

Kolom 2: Jumlah Muatan Renja Mitra K/L 2021 yang selaras dengan Muatan Mitra RKP 2021 adalah **jumlah Renja K/L 2021 dilihat dari Kegiatan-RO** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **Indikator dan target PN-PP-KP-ProP RKP 2021**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan Renja K/L 2021 adalah jumlah total Renja Mitra K/L 2021

Sebagai contoh keselarasan tabel di atas, Kegiatan Prioritas (KP) Penanggulangan Bencana dengan sasaran kegiatan meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana di RKP 2021 selaras dengan kegiatan dalam Renka Kementerian Keuangan 2021 yaitu Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan. Output kajian tersebut adalah berupa Kajian Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana. Capaian ini diakomodir melalui forum *Trilateral Meeting* yang melibatkan Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, BKF dan DJA Kementerian Keuangan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dalam forum *Trilateral Meeting*, ketiga pihak melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara RKP dan usulan K/L yang hasilnya dituangkan di dalam dokumen kesepakatan *Trilateral Meeting* dan menjadi bahan penyusunan Renja K/L.

Penyelenggaraan *Trilateral Meeting* disesuaikan dengan periodisasi perhitungan ketersediaan pagu anggaran sehingga proses penyesuaian Renja K/L dan RKP minimal dilakukan dua kali yaitu pada saat pagu indikatif dan pagu anggaran. Hasil penyusunan Renja K/L berdasarkan pagu anggaran menjadi bagian dari Nota

Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR RI. Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan.

## B. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PUSAT

### 1) Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021

Realisasi pencapaian indikator kinerja persentase keselarasan muatan RKA K/L 2021 dengan RKP 2021 dilakukan dengan cara menyandingkan dan menganalisa sasaran RKP 2021 dengan RKA seluruh K/L. K/L menyusun RKA K/L dengan mengacu Renja K/L yang telah diinput di dalam Sistem Informasi Krisna dan telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.



Secara keseluruhan, **Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021 telah mencapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 telah dianggarkan oleh seluruh K/L sesuai/relevan dengan kegiatan di masing-masing K/L pada Tahun Anggaran 2021.

Indikator terakhir yang diukur untuk memastikan terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional tahun 2021 adalah memastikan capaian kinerja pengalokasian diukur dari muatan keselarasan antara RKA K/L 2021 dengan RKP 2021. Keselarasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa Prioritas Nasional (PN) yang sudah digariskan di dalam RKP 2021 mendapat alokasi anggaran yang sesuai, supaya dapat diimplementasikan K/L mitra kerja untuk mencapai target pembangunan nasional yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja keselarasan tersebut belum optimal dikarenakan beberapa kondisi yang belum optimal dalam hal:

1. Komitmen K/L mitra sektor terhadap amanat PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Sistem Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2. Persepsi yang sama terhadap urgensi Prioritas Nasional (PN) yang merupakan arahan Presiden RI sebagaimana dicantumkan dalam RKP 2021.
3. Adanya sistem KRISNA yang terus dikembangkan guna keselarasan RKP dan RKA K/L mitra sektor.
4. Digitalisasi cara kerja yang terjadi di tahun 2020 telah memudahkan koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan mitra kerja, sehingga proses iterasi penyesuaian dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Ke depan, konsistensi ini akan terus dijaga dengan cara:

1. Perkuatan koordinasi antara sektor dengan semua mitra K/L/D.
2. Pengembangan kompetensi penelaah Renja K/L dan RKA K/L lingkup bidang.
3. Optimalisasi sistem informasi dan teknologi untuk menghilangkan barrier dalam melakukan koordinasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat secara singkat sebagai berikut.

**Tabel 3.10. Rekapitulasi Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021**

Koridor PN RKP 2021	Jumlah Muatan RKA Mitra K/L 2021 yang selaras dengan Muatan RKP 2021	Jumlah Total Muatan RKA Mitra K/L 2021	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	10	10	100%
PN 2	9	9	100%
PN 3	20	20	100%
PN 4	14	14	100%
PN 5	7	7	100%
PN 6	5	7	95%
PN 7	31	31	100%
<b>TOTAL</b>			
<b>Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2021 dengan Muatan RKP 2021</b>			<b>99,29%</b>

Sumber: Hasil Analisa Bappenas, 2020

Keterangan:

Kolom 2: Jumlah Muatan RKA K/L 2021 yang selaras dengan Muatan RKP 2021 adalah **Jumlah RKA Mitra K/L 2021 dilihat dari Kegiatan-RO-Alokasi** yang sesuai/terpetakan langsung/relevan dengan **indikator dan target-alokasi PN-PP-KP-ProP tiap PN RKP 2021**

Kolom 3: Jumlah Total Muatan RKA K/L 2021 adalah jumlah total RKA Mitra K/L 2021 dilihat dari Kegiatan-RO-Alokasi

Sebagai contoh keselarasan tabel di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengalokasikan anggaran ke dalam RKA K/L 2021 melalui RO Rekomendasi Kebijakan telah terpetakan langsung/relevan dengan RKP 2021 level Kegiatan Prioritas (KP) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan.

Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat **secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan.**

### C. SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

Berdasarkan PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dinyatakan perlunya Daerah mengidentifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah (Pasal 34 Ayat 1). Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan harus mengacu dan selaras dengan perencanaan pembangunan pusat. Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini mengukur ketercapaian sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.



Secara keseluruhan **capaian kinerja sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah berhasil tercapai sebesar 69,48%**. Penilaian sinergi ini diukur melalui rata-rata 2 (dua) indikator, yaitu: (1) **Persentase Keselarasan Muatan RPJMD dengan Muatan RPJMN 2020-2024 sebesar 67,16%**; dan (2) **Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi 2021 dengan Muatan RKP 2021 sebesar 71,79%**.

Indikator ini bertujuan untuk melihat keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Hal ini penting karena pada dasarnya hampir seluruh urusan pembangunan merupakan urusan konkuren yaitu urusan yang dikerjakan bersama antara pusat dan daerah. Keberhasilan dan keberlanjutan suatu program/kegiatan akan ditentukan dari dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Capaian kinerja sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh unit kerja Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional.

Berikut penjelasan pencapaian kinerja sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

#### 1) **Persentase (%) Keselarasan Muatan RPJMD dengan Muatan RPJMN 2020-2024**

Keselarasan RPJMD dengan RPJMN diperlukan agar prioritas nasional dapat dilaksanakan dengan berkesinambungan dan didukung secara sinergis baik oleh pusat maupun daerah. RPJMD Provinsi dan RPJMN diselaraskan antara lain melalui forum Konsultasi Regional RPJMN dan Musrenbang RPJMN. Pemerintah daerah menyampaikan usulan kegiatan, antara lain melalui Surat kepala Daerah, Konsultasi Regional RPJMN, dan Rapat Terbatas Setkab.

Indikator ini hanya dikontribusikan dari Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, khususnya Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan mengoordinasikan dan menganalisis kebutuhan dan keselarasan usulan daerah tersebut dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 untuk dapat diakomodir dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan usulan daerah yang dinilai mendukung

RPJMN 2020-2024, **keselarasan RPJMD Provinsi dan RPJMN yaitu sebesar 67,16%**. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum ada mekanisme yang jelas dalam pengusulan kegiatan daerah yang mendukung RPJMN 2020-2024. Selain itu, target yang ditetapkan terlalu tinggi, karena tidak semua daerah menyusun RPJMD baru dikarenakan masih dalam periode pemerintahan, sehingga daerah tersebut tidak menyampaikan usulan kegiatan daerahnya. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi periode RPJMN dengan RPJMD. Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedepujian Pengembangan Regional.

## 2) Persentase (%) Keselarasan Muatan RKPD Provinsi 2021 dengan Muatan RKP 2021

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan berbagai forum perencanaan, antara lain Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan/Rakortek Renbang (bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang ditujukan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan melalui sinkronisasi rencana kerja kementerian/lembaga di pusat dengan usulan kegiatan dan pendanaan dari daerah.

Keselarasan antara RKPD Provinsi 2021 dengan RKP 2021 dihitung dengan membandingkan usulan pemerintah provinsi untuk seluruh PN dalam RKP 2021 yang disampaikan dalam forum Musrenbangnas melalui aplikasi Krisna-Selaras, dengan usulan pemerintah provinsi yang disepakati dan tidak/belum dibahas oleh K/L dalam Musrenbangnas. Usulan yang tidak/belum dibahas dimasukkan dalam perhitungan, dikarenakan tidak ada waktu untuk pembahasan, atau merupakan kewenangan daerah sehingga seharusnya diusulkan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan capaian kinerja Kedepujian Bidang Pengembangan Regional, persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP yaitu **sebesar 71,79%**, belum mencapai target PK 2020 sebesar 100%. Target PK tahun 2020 yang ditetapkan terlalu tinggi, karena tidak semua prioritas nasional merupakan prioritas daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan isu strategis daerah yang mungkin berbeda dengan isu nasional atau daerah lainnya. Contoh hasil pengukuran keselarasan tersebut lainnya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dilihat secara lengkap pada Laporan Kinerja UKE I Kedepujian Pengembangan Regional.

Capaian persentase keselarasan yang tidak terlalu tinggi dikarenakan antara lain: (i) usulan pemerintah provinsi dibatasi maksimal 20 usulan dalam Krisna-Selaras, untuk kemudian dibahas dalam Musrenbangnas; dan (ii) usulan pemerintah provinsi dinilai pusat belum sesuai dengan PN dan kebutuhan daerah. Dengan struktur Kementerian PPN/Bappenas, terutama pada Kedepujian Bidang Pengembangan Regional yang baru, ke depan, masing-masing Direktorat, khususnya Direktorat Regional I, II, dan III akan melakukan

analisis sebagai standpoint, dan dapat memberikan arahan/usulan kepada Direktorat Sektor Bappenas dan Pemerintah Daerah terkait Program/Kegiatan Prioritas Daerah yang selaras dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional.

Sementara itu, Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana ke depannya akan memperkuat analisis makro wilayah dan koordinasi dengan Direktorat terkait di Bappenas dan pemerintah daerah dalam perumusan target lima sasaran utama pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, Rasio Gini, dan IPM), sehingga dapat meningkatkan keselarasan Sasaran Utama Pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

#### D. CAPAIAN KINERJA PENYUSUNAN “RANCANGAN PERPRES RKP 2021” MERUPAKAN IKU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 YANG BERDASARKAN IKU RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015-2019

Capaian kinerja penyusunan Rancangan Perpres RKP merupakan amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan hasil koordinasi dan Pertemuan Tiga Pihak, untuk digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Pemutakhiran RKP 2021 hingga terbit Peraturan Presiden.



Capaian kinerja IKU “Rancangan Peraturan Presiden RKP 2021” telah dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Kementerian PPN/Bappenas **hingga tercapai 100%**. Hal ini dibuktikan oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021 dan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021.

IKU Rancangan Perpres RKP 2021 tidak masuk dalam IKU Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020-2024 melainkan masuk pada IKU level UKE I dan UKE II. Namun demikian, dalam PK Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2020 masih menggunakan IKU 2015-2019. Dengan demikian capaian kinerja Rancangan Perpres RKP 2021 akan dijelaskan capaian kerjanya. Berikut uraian singkat capaian kinerja IKU Rancangan Perpres RKP 2021.

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah perlu menyusun RKP. RKP memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen



Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP Tahun 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup.

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan RKP 2021 sesuai dengan tema, sasaran dan arah kebijakan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memberikan penugasan bagi Deputi Bidang PEPP salah satunya adalah sebagai Koordinator Penyusunan RKP 2021 dengan para Deputi Penanggung Jawab Bab/Subbab/PN pada dokumen RKP 2021. Sementara itu, Direktur PEPPS ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana Tim Penyusun Substansi RKP 2021 yang melakukan koordinasi dengan para Direktur Penanggung Jawab/Penulis Bab/Subbab/PN.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan RKP 2021, terlebih dahulu dibentuk Tim Penyusun RKP 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.17/M.PPN.HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Tahun 2021.

Selanjutnya, Proses penyusunan RKP Tahun 2021 dibagi ke dalam empat tahapan besar, yaitu:

- Tahap Rancangan Awal RKP dimulai dari penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sampai dengan Penyelenggaraan Rakorbangpus.
- Tahapan Rancangan RKP dimulai dari Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional, sampai dengan penetapan Permen Rancangan RKP.
- Tahapan Perpres RKP dimulai dari pertemuan pendahuluan dengan DPR sampai dengan Penetapan Perpres RKP.
- Tahapan Pemutakhiran RKP yang untuk pertama kalinya diinisiasi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.

Terdapat beberapa output pada penyusunan RKP 2021 di antaranya adalah (1) dokumen Rancangan Awal RKP 2021; (2) dokumen Rancangan RKP 2021; (3) dokumen Rancangan Akhir RKP 2021; (4) dokumen Pemutakhiran RKP 2021; (5) laporan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RKP 2021 yang meliputi (i) Laporan Pelaksanaan Kick Off RKP 2021, (ii) Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur Tahun 2020, dan (iii) Laporan Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2020; serta (6) laporan evaluasi penyusunan RKP 2021.

#### **a. Dokumen Rancangan Awal RKP 2021**

Penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RKP 2021 dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2020. Tahapan penyusunan Ranwal RKP 2021 dimulai dengan penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, yang kemudian diikuti dengan Kick Off Penyusunan RKP 2021, Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub), dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek). Seluruh hasil pembahasan dalam setiap kegiatan tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Rancangan Awal RKP 2021. Sebagai salah satu bentuk respon Pemerintah terhadap kondisi pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian terhadap outline yaitu penambahan Subbab 2.2 Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi COVID-19. Selain itu, berbeda dengan RKP 2020, perubahan mendasar pada Ranwal RKP 2021 yaitu tidak terdapat Bab Pembangunan Bidang.

#### **b. Dokumen Rancangan RKP (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5/2020 tentang Rancangan RKP 2021)**

Setelah penyusunan dokumen Ranwal RKP 2021 selesai dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan penyusunan dokumen Rancangan RKP 2021 yang disahkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5/2020 tentang Rancangan Awal RKP 2021, yang terdiri dari 3 Lampiran yaitu Lampiran I Narasi, Lampiran II Matriks Pembangunan, dan Lampiran III Matriks Major Project. Untuk Matriks Pembangunan dan

Matriks Major Project diolah berdasarkan Lampiran B Pagu Indikatif. Secara garis besar, dokumen narasi Rancangan RKP 2021 dengan dokumen narasi Ranwal RKP 2021 tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh mundurnya timeline penyusunan Ranwal RKP 2021 dalam penentuan tema yang hamper bersamaan dengan timeline penyusunan Rancangan RKP 2021.

**c. Dokumen Rancangan Akhir RKP (Peraturan Presiden Nomor 86/2020 tentang RKP 2021)**

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, setelah Permen tentang Rancangan RKP 2021 ditetapkan selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKP 2021. Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2021 ini didasarkan pada hasil Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, hingga ditetapkan melalui Perpres No. 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Dokumen Rancangan Akhir RKP 2021 ini terdiri dari 3 Lampiran yaitu (i) Narasi RKP 2021 yang tercantum dalam Lampiran I; (ii) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang tercantum dalam Lampiran II; serta (iii) Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran III.

**d. Dokumen Pemutakhiran RKP (Peraturan Presiden Nomor 122/2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021)**

Selanjutnya, dokumen RKP tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, selanjutnya dimutakhirkan dengan mengacu pada UU No. 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, hasil trilateral meeting, dan hasil penelaahan RKA K/L. Berbeda dengan pemutakhiran RKP pada tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, untuk pertama kalinya Pemutakhiran RKP 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 122/2020 tentang Pemutakhiran RKP 2021. Dokumen Pemutakhiran RKP 2021 memuat pemutakhiran narasi dokumen RKP, matriks pembangunan, dan matriks major project, yang dilakukan secara utuh (bukan matriks substansi semula-menjadi). Dokumen Pemutakhiran RKP 2021 ini terdiri dari 3 Lampiran yaitu (i) Narasi RKP 2021 yang tercantum dalam Lampiran I; (ii) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, serta alokasi pendanaannya, yang tercantum dalam Lampiran II; serta (iii) Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran.

**e. Laporan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RKP 2021, meliputi (i) Laporan Pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP 2021; (ii) Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur Tahun 2020; dan (iii) Laporan Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2020.**

Sebagai bentuk inovasi “New Features” dari penyusunan RKP, dalam hal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub) Tahun 2020, yang sebelumnya diawali dengan pertemuan Kick Off Penyusunan RKP 2021.

Laporan Pelaksanaan Kick Off Penyusunan RKP 2021, memuat penjelasan tujuan utama dari pertemuan Kick Off Penyusunan RKP 2021 ini adalah untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas dokumen RKP. Pemahaman mengenai RPJMN 2020-2024 menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu disampaikan dalam Kick Off Penyusunan RKP 2021 ini. Sebagai inti acara disampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP 2021. Penyampaian tema pembangunan yang telah disepakati antara Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan. Selain itu, ditambahkan pula sesi khusus persiapan pelaksanaan koordinasi selanjutnya yaitu Rapat Koordinasi Gubernur 2020.

Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Tahun 2020, memuat penjelasan inovasi baru yang tidak saja sebagai bentuk upaya meningkatkan efektivitas sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun juga sebagai upaya akselerasi pembangunan nasional menyongsong tahun emas kemerdekaan pada tahun 2045 mendatang. Secara spesifik, tujuan pelaksanaan Rakorgub adalah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan proyek lainnya dalam RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan di daerah pada tahun 2021. Oleh karena itu tema yang diangkat dalam Rakorgub adalah “Memperkokoh Sinergi Pusat-Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024”. Walaupun dilaksanakan di awal masa pandemi COVID-19, namun pelaksanaan rapat berhasil dilaksanakan secara fisik, dengan kehadiran fisik yang sangat baik, yaitu sebanyak 27 Gubernur, 5 Wakil Gubernur (Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Barat, Banten, dan Sumatera Selatan), serta 2 Sekretaris Daerah (Provinsi Papua dan Provinsi Kepulauan Riau). Secara substansial, tujuan pelaksanaan Rakorgub 2020 telah terlaksana dan tercapai dengan baik, hal ini ditandai dengan penyampaian usulan proyek dari daerah yang sudah sesuai dengan kriteria dan disertai dengan rencana dukungan dan komitmen daerah.

Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2020, yang memuat penjelasan bentuk koordinasi pembangunan di tingkat pusat dan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021. Hal-hal yang disampaikan pada Rakorbangpus adalah (1) Substansi dokumen Rancangan Awal RKP 2021 yang berisi tentang tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, pokok-

pokok kebijakan; dan (2) kebijakan fiskal, pagu indikatif, dan kebijakan pengelolaan anggaran tahun 2021. Agenda pokok Rakorbangpus 2020 adalah (1) sesi pembukaan dengan pemaparan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Awal RKP 2021 sekaligus membuka acara Rakorbangpus 2020, dan arahan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Fiskal Tahun 2021 (diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan); serta (2) sesi diskusi panel dengan lima panelis dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas.

#### **f. Laporan Evaluasi Penyusunan RKP 2021**

Laporan ini memuat penjelasan terkait proses pelaksanaan penyusunan RKP 2021 mulai dari persiapan, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan, dan rekomendasi/saran perbaikan untuk pelaksanaan penyusunan RKP tahun mendatang. Hal besar yang dapat diambil dari proses penyusunan RKP 2021 adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi mekanisme kinerja dan ketepatan waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Namun demikian, Tim Penyusun tetap adaptif dan menjaga kualitas dokumen RKP 2021 melalui kegiatan quality assurance (QA) sesuai dengan pendekatan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS).

Ruang lingkup QA penyusunan RKP 2021 yaitu (1) menelaah ketepatan hierarki sasaran dan indikator sasaran kinerja yang tercantum pada tiap level: impact/ultimate outcome, outcome, dan output (Prioritas Nasional–Program Prioritas–Kegiatan Prioritas–Proyek Prioritas); (2) memastikan ketersediaan dan kesesuaian informasi kementerian/lembaga (K/L) pelaksana/penanggung jawab (PJ) pada setiap level sasaran PN-PP-KP-ProP; serta (3) menjaga keselarasan tata bahasa dan penulisan narasi RKP termasuk koherensi antarbab.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki *core business* dalam perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP, Kementerian PPN/Bappenas diberi mandat untuk melakukan perhitungan proyeksi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Misalnya pada RKP 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun KEM sejak bulan Desember 2019 dan ditetapkan pada Februari 2020 melalui Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) RKP 2021, terdapat proses dan tahapan yang diampu oleh Kedeputusan Ekonomi dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.2. Alur Kerja Kerangka Ekonomi Makro



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2021

Sementara itu, untuk alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dalam rangka penyusunan RKP 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.3. Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2021

Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan KEM RKP 2021 telah dilakukan sejak akhir tahun 2019, tepatnya sejak bulan November. Pada bulan ini, tim KEM yang anggotanya bersifat lintas direktorat dan kedeputian melakukan exercise pertama terhadap KEM RKP 2021. Exercise pertama ini dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini dan outlook untuk tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021. Exercise terus dilakukan dan diupdate setiap triwulan, disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika ada perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat.
2. Pada bulan yang sama, koordinasi dengan kementerian lain, dilakukan melalui mekanisme rapat interdep asumsi makro yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2019. Tim asumsi makro melibatkan:
  - Kementerian PPN/Bappenas (Deputi Bidang Ekonomi dan PMK)
  - Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR)
  - Bank Indonesia
  - Kemenko Bidang Perekonomian
  - Kementerian ESDM
  - SKK Migas

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyepakati asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SPN, harga minyak dunia, dan lifting migas) untuk tahun 2019-2023.

Rapat tim asumsi makro terus dilakukan setiap triwulan, selepas publikasi resmi pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, meski penyusunan KEM RKP selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi yang dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan juga melalui mekanisme rapat tim asumsi makro, dimana angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

3. Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM diikuti oleh rapat koordinasi teknis untuk membreakdown lebih detail asumsi makro dan arah kebijakan keseluruhan. Rapat koordinasi teknis bisa dilakukan sewaktu waktu sesuai kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.
4. Setelah KEM disepakati lintas kementerian, termasuk sasaran PDB sisi lapangan usaha, koordinasi penyusunan KEM dilakukan di dalam internal Bappenas. Sasaran PDB lapangan usaha didiskusikan bersama direktorat sektor dan mitra KL terkait, seperti gambar berikut:

**Gambar 3.4. Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha**

	<b>Pertanian</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian.
	<b>Pertambangan</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian ESDM
	<b>Industri</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian
	<b>Listrik</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat ETI dan Kementerian ESDM
	<b>Perdagangan</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dan Kementerian Perdagangan
	<b>Konstruksi</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian.
	<b>Infokom</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Energi, Teknologi, dan Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi
	<b>Jasa Keuangan</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat dengan Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan
	<b>Transportasi</b>	<input type="checkbox"/> Direktorat Transportasi dan Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber: Tim Penyusunan RKP 2021 (diolah, 2020)

5. Hasil KEM disampaikan kepada Kedepatian PMK untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Direktorat PMAS menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan disampaikan ke Kedepatian SDM untuk menghitung sasaran IPM.
6. Tim KEM menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan provinsi) untuk dijadikan acuan oleh Kedepatian Regional dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah.
7. Koordinasi juga dilakukan terkait target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor non migas dan PMA/PMDN. Untuk sasaran pertumbuhan ekspor non migas, rapat koodinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Untuk sasaran PMA/PMDN, rapat koodinasi dilakukan dengan BKPM, direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
8. Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika ada data ekonomi terbaru.
9. Tim KEM juga kerap mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan outlook ke depan.



**Tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat menyusun KEM** di antaranya:

1. Penyusunan KEM dilakukan pra-pandemi COVID-19, sehingga belum mempertimbangkan dampak persebaran COVID-19 terhadap sasaran makro nasional. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.
2. Strategi dan kebijakan nasional yang telah disusun dalam RKP 2020 perlu disesuaikan dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19, seperti menurunnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan.
3. Penyusunan KEM dilakukan dua tahun sebelumnya, sementara dinamika perekonomian dapat terjadi sangat cepat. Sebagai perbandingan, lembaga internasional IMF dapat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya 4 kali dalam setahun, bahkan lebih akibat tingginya ketidakpastian.
4. Perbedaan asumsi dan model ekonomi yang digunakan antar kementerian/lembaga.
5. Perbedaan pendekatan yang digunakan tim KEM yang bersifat makro dengan direktorat sektor yang sangat mikro.

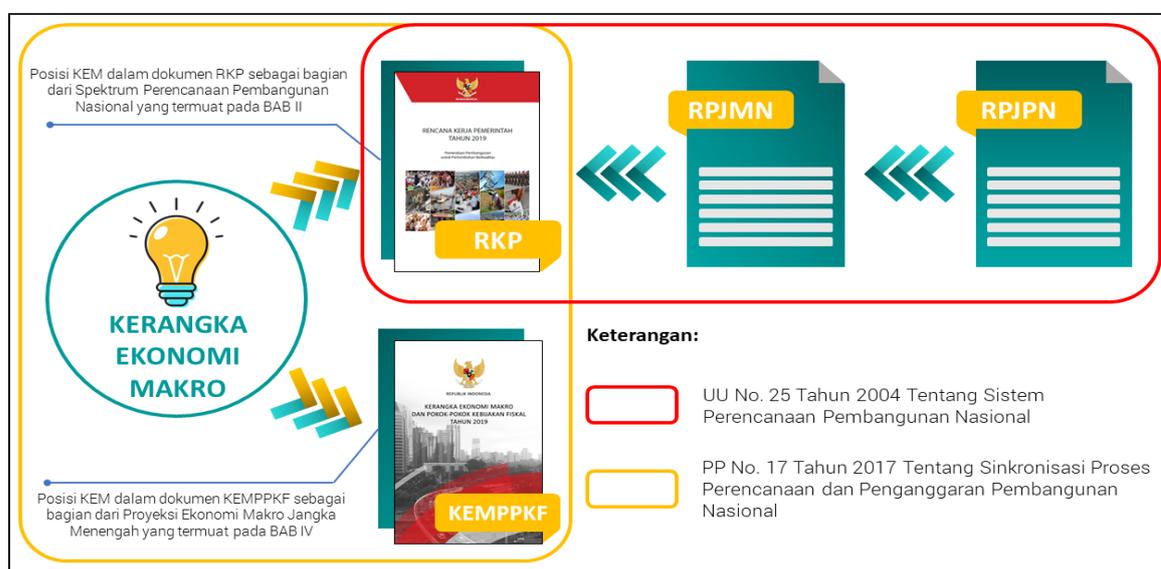
Adapun upaya pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi risiko dari tantangan yang dihadapi pada saat penyusunan KEM RKP 2021, adalah:

1. Melakukan *exercise* KEM secara berkala untuk menyesuaikan sasaran ekonomi dengan situasi dan kondisi domestik terkini. Sebagai contoh, pemberlakuan kebijakan PSBB ketat sepanjang bulan Maret – Juni 2020 menyebabkan terjadinya penurunan mobilitas masyarakat secara drastis sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 berkontraksi dalam, kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam *exercise* KEM karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2020.
2. Penguatan *capacity building* staf di Kedeputan Bidang Ekonomi untuk memahami alat analisis untuk melakukan proyeksi dan basis data yang digunakan. Selama 2020, banyak sekali pelatihan yang dilakukan, diantaranya: training mingguan penggunaan Oxford Economics, training Model Input-Output, dan ekonometrik.
3. Perbedaan pendekatan yang bersifat makro dengan mikro coba diatasi dengan melengkapi kajian-kajian yang sifatnya makro dengan kajian yang lebih mikro. Hasil kajian tersebut digunakan untuk memperlancar komunikasi dengan direktorat sektor. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
4. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/D. Pergeseran fokus strategi dan kebijakan nasional, salah satunya yaitu penyaluran stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak COVID-19 melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

### Keterkaitan KEM, RKP, dan RPJMN

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Kerangka Ekonomi Makro merupakan bagian dari RKP dan RPJMN. Maka dari itu, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro diperlukan untuk menjadi panduan bagi pencapaian sasaran RKP dalam rangka mengejar target yang sudah tertuang dalam RPJMN. Keterkaitan antara KEM, RKP dan RPJMN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.5. Keterkaitan KEM, RKP, dan RPJMN



Sumber: Laporan Kinerja UKE I Kedeputan Bidang Ekonomi Tahun 2020

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara utuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program kementerian/lembaga.

## IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi



Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU “Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi” telah dilaksanakan sesuai *bridging* IKU dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan hasilnya **tercapai 99,19% melebihi target 85%**. Penanggung jawab pelaksanaan indikator tersebut adalah di unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas

(Pusbindiklatren). Pusbindiklatren mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

IKU Capaian Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi diukur dari pencapaian indikator: (1) Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi; (2) Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan; (3) Persentase jumlah peserta terlatih; dan (4) Persentase tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP. Rekapitulasi pengukuran IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Pengukuran Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi

No.	Indikator Penilaian	Nilai (%)	Capaian (%)
1	Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi	109,00	100,00
2	Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan	134,00	100,00
3	Persentase jumlah peserta terlatih	107,00	100,00
4	Persentase tingkat Kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP	96,77	96,77
<b>Persentase Perencanaan yang Memenuhi Standar Kompetensi</b>			<b>99,19</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2020

Berikut penjelasan dari pelaksanaan IKU tersebut.

### 1) Persentase jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi

Hasil pengukuran indikator ini telah berhasil memenuhi target sehingga **tercapai 100%**. Selaras dengan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren sebagai instansi Pembina Pejabat Fungsional Perencana tingkat Nasional, Pusbindiklatren berkewajiban membina perencana di pusat maupun di daerah. Perencana yang dibina adalah Pejabat Fungsional

Perencana dan calon pejabat fungsional yang mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana dan telah lulus uji kompetensi.

Pada tahun 2020, jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi ditargetkan sebanyak 450 orang dan terealisasi 559 orang (124,22 persen) yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi. Realisasi peserta Pelatihan Fungsional Perencana melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan diselenggarakan berbasis daring atau online.

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan rincian sebagai berikut: (1) jenjang ahli pertama (target 200 orang, realisasi 200 orang); (2) jenjang ahli muda (target 200 orang, realisasi 240 orang); (3) jenjang ahli madya (target 100 orang, realisasi 99 orang); dan (4) jenjang ahli utama (target 10 orang, realisasi 20 orang). Perbandingan target dan realisasi kelulusan perencana dalam Pelatihan Fungsional Perencana sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.12. Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020**

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Kelulusan Pelatihan Fungsional Perencana	530	423	80	510	559	109
<b>Ahli Pertama</b>	220	118	54	200	200	100
<b>Ahli Muda</b>	200	221	111	200	240	120
<b>Ahli Madya</b>	100	72	72	100	99	99
<b>Ahli Utama</b>	10	12	120	10	20	200

Sumber: Laporan Kinerja Pusbindiklatren, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian pada tahun 2020 terdapat peningkatan capaian jumlah JFP jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tahun 2020 terjadi wabah pandemik Covid-19, minat JFP di pusat maupun di daerah untuk mengikuti pelatihan masih tinggi melalui media daring. Dengan demikian, peningkatan jumlah JFP yang lulus Pelatihan Fungsional Perencana diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan nasional, utamanya keselarasan dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

## 2) Persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan

Secara umum, indikator persentase jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan telah **tercapai 100%**. Upaya mewujudkan ASN perencana yang berkualitas dilakukan melalui peningkatan kompetensi bagi aparatur yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan multidisiplin. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan ASN perencana yang berkualitas, pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan kelulusan karyasiswa program pendidikan sebanyak 250 orang.

Jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan dalam program pendidikan adalah karyasiswa yang lulus pendidikan gelar S-2 maupun S-3 pada tahun 2020, telah menyelesaikan studinya, dan secara resmi telah dikembalikan ke instansi asal karyasiswa tersebut.

Realisasi target program pendidikan dapat dicapai, meskipun pada tahun 2020 terdapat outbreak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mengharuskan semua program pendidikan dilakuka secara daring. Selain masalah pandemic Covid-19, kebijakan Surat Edaran Direktorat Jendertal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. B/323/B.BI/SE/2019 tertanggal 31 Mei 2019 perihal Publikasi Karya Ilmiah Program Pascasarjana, Program Magister, dan Program Doktorat juga menjadi salah satu tantangan bagi karyasiswa untuk lulus tepat waktu.

Untuk merespons perkembangan perkuliahan yang terkendala akibat merebaknya Covid-19, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Beberapa perbaikan program pendidikan, yaitu (1) penyusunan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan, pemberian paket data, dan komunikasi bagi karyasiswa program S-2/S-3 dalam negeri (serta linkage/luar negeri yang masih melakukan kuliah dari Indonesia) yang menjalankan perkuliahan secara daring; (2) mengalokasikan anggaran bagi karyasiswa linkage untuk menjalani tes swab sebelum karyasiswa tersebut berangkat ke luar negeri; (3) mengatur ketentuan tentang kepulangan karyasiswa dari luar negeri (karyasiswa linkage/reguler luar negeri) disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19; (4) bersama-sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, Kementerian PPN/Bappenas juga mengatur karantina mandiri bagi karyasiswa linkage yang tiba di Jepang; serta (5) pemberian *self-quarantine allowance* untuk karyasiswa linkage/luar negeri sesuai kebijakan negara tujuan. Sebagai bentuk antisipasi Covid-19 terhadap pelaksana program pendidikan, pada tahun 2020,

Kementerian PPN/Bappenas juga memberi kesempatan kepada program studi untuk mengajukan perpanjangan durasi studi selama satu semester jika memang hal tersebut sangat mendesak dilakukan. Perbandingan jumlah peserta program pendidikan yang lulus pada tahun 2020 dan tahun 2019 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.13. Perbandingan Tingkat Kelulusan Karyasiswa Pendidikan 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Dalam Negeri	230	239	104	200	230	115
Linkage	230	239	104	200	230	115
Luar Negeri	20	7	35	10	11	110
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>334</b>	<b>134</b>

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian jumlah tingkat kelulusan karyasiswa pendidikan dari tahun 2019 sebanyak 300 orang meningkat menjadi sebanyak 334 orang di tahun 2020.

Walaupun telah mencapai target indikator kinerja, kedepan diharapkan perlu terus dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan karyasiswa pendidikan untuk memenuhi tuntutan percepatan prioritas pembangunan nasional dan perkembangan isu-isu perencanaan pembangunan, termasuk dukungan penguatan SDM Aparatur Perencana terhadap pelaksanaan revitalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

### 3) Persentase jumlah peserta terlatih

Secara umum, pencapaian indikator “Persentase jumlah peserta terlatih” telah berhasil **tercapai 100%**. Jumlah peserta terlatih dimaksud adalah jumlah perencana di pusat maupun daerah yang melaksanakan program pelatihan non gelar melalui Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Realisasi peserta pelatihan sudah melebihi target dikarenakan adanya (1) kebijakan baru dari pimpinan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dalam rangka mendukung tuisi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu peningkatan kapasitas perencana daerah dalam menyusun dokumen perencanaan; (2) kebijakan penyelenggaraan pelatihan melalui daring.

Perbaikan yang dilaksanakan untuk pelatihan adalah (1) target peserta pelatihan lebih diprioritaskan kepada peserta dari daerah-daerah yang sedang dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah/PPD-RPJMD); (2) target peserta Pelatihan *Public Private Partnership* (PPP) diarahkan kepada pemerintah daerah yang telah menjalankan proyek yang dikerjasamakan dengan badan usaha dengan mekanisme/proyek PPP; (3) memberikan Fasilitasi Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) kepada pengelola kepegawaian daerah di Kawasan timur

Indonesia (KTI); dan (4) memberikan pelatihan perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah.

**Tabel 3.14. Perbandingan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020**

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Dalam Negeri	900	1.367	152	675	725	107
Linkage	0	0	0	0	0	0
Luar Negeri	100	141	141	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.508</b>	<b>151</b>	<b>675</b>	<b>725</b>	<b>107</b>

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

#### 4) Persentase tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP

Secara umum, hasil penilaian tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan Diklat dan JFP telah **tercapai 96,77%**. Hal ini diperoleh dari rata-rata dari penilaian indikator: 1) Tingkat Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan; 2) Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan; dan 3) Tingkat Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana. Berikut rincian hasilnya.

**Tabel 3.15. Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP Tahun 2020**

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian
1	Tingkat Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan	95,08
2	Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan	98,99
3	Tingkat Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana	96,23
	<b>Rata-rata</b>	<b>96,77</b>

Sumber: LKJ Pusbindiklatren (diolah 2020)

Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi JFP diukur dengan menggunakan kesesuaian standar pelayanan Pusbindiklatren dengan standar pelayanan prima.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren melakukan survei kepuasan kepada para penerima beasiswa Pusbindiklatren, baik program pendidikan, pelatihan, maupun JFP. Jumlah responden program pendidikan pada tahun 2020 sebanyak 409 orang yang mengikuti program S-2 dalam negeri (program S-2 afirmasi dan program S-

2 reguler) serta program S-2 linkage (linkage Jepang, linkage Premium, dan split site). Pertanyaan yang diajukan mencakup lima aspek penilaian, yaitu penyebaran informasi, pelayanan staf, penempatan, pendaftaran dan seleksi, serta tunjangan. Hasil penilaian sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan Tahun 2019 dan 2020**

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	91,08	95,42
2	Pelayanan Staf	99,27	99,57
3	Penempatan	97,80	99,02
4	Pendaftaran dan Seleksi	98,35	98,78
5	Tunjangan	85,33	82,64
<b>Rata-rata</b>		<b>94,36</b>	<b>95,08</b>

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Dari tabel di atas, terjadi kenaikan hasil capaian pelayanan program pendidikan dari hasil capaian tahun 2020. Dari lima indikator yang dinilai, hanya indikator tunjangan (biaya hidup) yang mengalami penurunan sebesar 2,7 poin. Hal ini dikarenakan pemberian tunjangan biaya hidup mengacu pada ketentuan standar biaya masukan (SBM) Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, untuk program pendidikan, Pusbindiklatren melakukan penyesuaian besaran biaya pada komponenkomponen lainnya.

**Tabel 3.17. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan Tahun 2019 dan 2020**

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	98	-
2	Pelayanan Pusbindiklatren	96	99,73
3	Penempatan	98	-
4	Pendaftaran dan Seleksi	94	99,73
5	Fasilitas/Sarana	-	97,77
6	Kurikulum	-	98,76
<b>Rata-rata</b>		<b>96</b>	<b>98,99</b>

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021



Dari tabel di atas, pada tahun 2020, indikator penyebaran informasi dan indikator penempatan digabungkan dengan indikator pelayanan Pusbindiklatren. Pada tahun 2020 juga ditambahkan indikator fasilitas/sarana dan indikator kurikulum. Kenaikan terjadi pada program pelatihan dari capaian tahun 2019, untuk dua indikator yang dinilai. Kenaikan penilaian responden yang tertinggi adalah pada indikator pendaftaran dan seleksi, yaitu sebesar 5,73 persen. Hal ini dikarenakan Pusbindiklatren terus melakukan peningkatan efisiensi pelayanan website bagi calon peserta pelatihan. Sebanyak 485 dari 725 orang peserta pelatihan telah berhasil mengisi kuesioner dengan aplikasi Sipena. Namun, masih ada pelatihan yang belum menggunakan aplikasi Sipena sehingga peserta tidak dapat mengisi kuesioner. Dengan demikian, total kuesioner yang terisi sebanyak 66,89%.

**Tabel 3.18. Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020**

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	-	95,71
2	Pelayanan Staf	95,00	97,00
3	Penempatan	-	96,60
4	Pendaftaran dan Seleksi	-	95,71
<b>Rata-rata</b>		<b>95,00</b>	<b>96,23</b>

Sumber: LKJ Pusbindiklatren, 2021

Pelaksanaan pembinaan JFP tahun 2020 salah satunya adalah melalui Pelatihan Fungsional Perencana yang diperuntukkan bagi para PNS yang baru pertama kali diangkat dan atau pindah jabatan ke dalam JFP serta bagi para perencana yang akan naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dalam JFP. Dari Tabel 3.7 di atas, data responden yang diambil adalah sebanyak 559 dari peserta pelatihan dan 111 dari tamu yang berkunjung ke Pusbindiklatren selama periode tahun 2020. Selama tahun 2020, Pelatihan Fungsional Perencana diselenggarakan dengan metode daring dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga penilaian kepuasan juga dilaksanakan dengan metode pengisian formulir secara online.



SS-2

## Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Capaian kinerja Sasaran Strategis ke-2 Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional ini **tercapai dengan BAIK**, melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. IKU ini sesuai dengan *bridging* penajaman IKU ke-3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

### IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Capaian IKU Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional terdiri dari 2 (dua) capaian indikator kinerja, yaitu: (1) Capaian kinerja pembangunan nasional yang dilakukan melalui Evaluasi Kinerja RKP 2020; dan (2) Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang dilakukan melalui Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.

#### 1. Capaian Sasaran PN RKP 2020



Pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik. Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 kinerja sasaran PN 3 yaitu Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja perlu terus didorong agar mempercepat pemulihan ekonomi.

Capaian kinerja evaluasi kinerja RKP ini berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Evaluasi RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV ditekankan untuk dapat memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Evaluasi RKP Tahun 2020 mencakup evaluasi atas pencapaian sasaran dari 5 PN, 25 Program Prioritas (PP), dan 122 Kegiatan Prioritas (KP). Secara umum, kinerja pencapaian sasaran lima PN dalam RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik. Pencapaian seluruh PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.19. Capaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2020 hingga Triwulan IV**

No.	Prioritas Nasional	Rata-Rata Capaian Sasaran (Persen)		Kategori Kinerja
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	98,27	●	Baik
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	97,79	●	Baik
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	49,20	●	Kurang
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	93,17	●	Baik
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	98,67	●	Baik

Sumber: Bappenas, 2021

- Keterangan: ● realisasi >90 persen target (kinerja baik);  
 ● realisasi 60–90 persen target (kinerja cukup);  
 ● realisasi <60 persen target (kinerja kurang).

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang luar biasa memberikan dampak besar terhadap pencapaian target-target pembangunan. Adanya pandemi Covid-19 membuat Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan refocusing anggaran sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan utamanya kegiatan fisik dan terdapatnya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2020. Bahkan terdapat pula sejumlah output K/L yang terpaksa harus dihentikan atau tidak dilanjutkan pada tahun 2020. Pengaruh dari pandemi Covid-19 ini sangat tercermin terutama pada pencapaian indikator sasaran PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kinerja industri dan pada saat bersamaan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, dengan terjadinya penurunan permintaan secara signifikan maka perlambatan aktivitas dunia usaha yang berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja tidak dapat terhindari. Sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global pada umumnya, pertumbuhan ekonomi domestik mengalami pertumbuhan negatif.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV antara lain terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Permasalahan SDM yang dihadapi yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama masih rendahnya produktivitas yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, permasalahan regulasi yang muncul yaitu belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya tumpang tindih regulasi. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut penjelasan ringkas pencapaian setiap PN, yang memuat capaian beberapa indikator terpilih/strategis.

**Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan** pada triwulan IV 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Dari empat indikator sasaran PN 1, satu indikator yang telah tercapai (dengan adanya penyesuaian target menjadi 9,7–10,2 persen) yaitu tingkat kemiskinan sebesar 10,19 persen. Sementara itu, tiga indikator lainnya tidak tercapai namun sudah di atas 90 persen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,94, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 52,67, dan gini rasio sebesar 0,385.

**Prioritas Nasional 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah** pada triwulan IV 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Dari lima indikator sasaran PN 2, empat indikator telah tercapai, yaitu menurunnya waktu tempuh moda jalan pada koridor utama pulau sebesar 2,16 jam/100 km; porsi rute pelayaran yang membentuk loop sebesar 24 persen; Information and Communication Technologies (ICT) Development Index sebesar 5,32; dan persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebesar 59,54 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya tidak tercapai yaitu provinsi dengan penurunan risiko bencana terkait daya rusak air sebanyak 20 provinsi dengan realisasi fisik 88,94 persen.

**Prioritas Nasional 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja** pada triwulan IV 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang. Dari 12 indikator sasaran PN 3, tiga di antaranya telah tercapai, yaitu nilai devisa pariwisata sebesar US\$3,46 miliar, produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) >25 persen sebesar 9.845 produk, dan kontribusi ekonomi digital sebesar 4,17 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya masih dalam perhitungan yaitu kontribusi PDB kemaritiman, sedangkan delapan indikator lainnya tidak tercapai yaitu pertumbuhan PDB pertanian sebesar 2,59 persen, pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar -2,93 persen, nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.049,5 triliun, pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar -7,7 persen, pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar -4,95 persen, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja sebesar -1,84 persen, penyediaan lapangan kerja sebesar -0,301 juta orang, serta rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,93 persen.

**Prioritas Nasional 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup** pada triwulan IV 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Dari 12 indikator sasaran PN 4, enam di antaranya telah tercapai, yaitu konsumsi kalori sebesar 2.112 kkal/kapita/hari, konsumsi protein 62,1 gram/kapita/hari, luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi sebesar 65 juta hektar, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,27, luas kawasan konservasi perairan sebesar 24,11 juta hektar, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia sebesar 143,6. Sementara itu, satu indikator lainnya masih belum tersedia datanya yaitu koefisien limpasan, sedangkan enam indikator lainnya tidak tercapai yaitu pola pangan harapan sebesar 86,3, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of

Undernourishment/PoU) sebesar 7,66, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES) sebesar 5,42, kapasitas tampungan air sebesar 12,42 m<sup>3</sup>, dan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebesar 106,38 Millions of Tonnes of Oil Equivalent (MTOE).

**Prioritas Nasional 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan** pada triwulan IV 2020 menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Dari empat indikator sasaran PN 5, dua di antaranya telah tercapai, yaitu crime rate sebesar 103 orang/100.000 penduduk dan Indeks Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) sebesar 88,35. Sementara itu, satu indikator lainnya masih dalam tahap pengembangan dan perhitungan yaitu Indeks Pembangunan Hukum, sedangkan satu indikator lainnya tidak tercapai namun kinerjanya sudah di atas 90 persen yaitu Indeks Kekuatan Militer sebesar 0,26.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kunjungan kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19, dan Para Pejabat dan Perencana terkait. Kegiatan tersebut dilakukan utamanya untuk melihat langsung pemulihan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol produktif dan aman Covid-19 dan memastikan perencanaan pembangunan nasional berjalan sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integrated dan spasial (THIS). Berhubung tahun 2020 terjadi wabah pandemi Covid-19, Kementerian PPN/Bappenas hanya melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi percontohan, seperti, Provinsi NTT (Labuan Bajo, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung (Belitung), Provinsi Bali (Denpasar), Provinsi Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Jawa Barat (Tasik-Garut).

Kunjungan kerja ini selain memberikan pembelajaran bagi Para Perencana Bappenas dalam menjalankan fungsi *clearing house*, juga menghasilkan data dan informasi (*evidences*) tentang dampak sosial-ekonomi dari pandemi covid-19, serta kapasitas dan kesiapan daerah dalam melakukan pemulihan ekonomi dan sosial serta transformasi ekonomi. Rekomendasinya menjadi masukan bagi K/L dan Pemda terutama terkait:

- Dukungan untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi covid-19.
- Dukungan untuk transformasi ekonomi di daerah, misalnya: sektor Pariwisata (berbasis budaya dan alam), sektor Industri berbasis jasa, seni, dan budaya serta UMKM, sektor industri pengolahan, serta didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM daerah yang handal, dan infratraktur yang memadai.

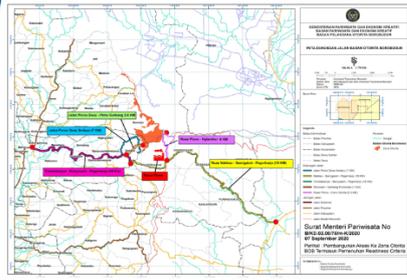
Sebagai contoh hasil yang diperoleh dari kunjungan kerja tersebut dapat dilihat pada ringkasan atau *highlight* permasalahan pembangunan dan rekomendasinya pada tabel berikut:

## 1. Provinsi Bangka Belitung

<b>1. FAKTA</b>	<p>PT. Ration Bangka Abadi (RBA) merupakan pengelola KI Sadai. Di dalam Kawasan terdapat Pelabuhan terintegrasi yang dikelola PT. Sadai Terminal Internasional Logistik (STIL)</p> <p>Rencana Kawasan seluas 1000 Ha, dengan 167 Ha sudah <i>land clearing</i> bekerja sama dengan PT Waskita Karya. Telah mendapat AMDAL untuk 400 Ha pada tahun 2018.</p> <p>Pembiayaan pengembangan KI Sadai yaitu: 30% dana perusahaan dan 70% pinjaman dari lembaga pembiayaan asing.</p> <p>Badan Pengelola KI Sadai sedang melakukan revisi bisnis plan</p>	<b>3. REKOMENDASI</b>
<b>2. MASALAH</b>	<p>Izin Lingkungan untuk pelabuhan belum diterbitkan KLHK, karena pelabuhan belum masuk penlok pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kemenhub</p> <p>Keterbatasan APBD dalam membantu penyediaan fasilitas air baku (pompa baru, dan saluran)</p> <p>Dampak Covid-19: penundaan operasional dan pembahasan MOU dengan investor</p> <p>Tersedianya fasilitas cuci tangan dan <i>hand sanitizer</i></p> <p>Queue and interaction management baik.</p> <p>Pekerja pembangunan di lapangan belum menggunakan masker dan mencuci tangan secara konsisten.</p>	<p><b>Penyediaan Infrastruktur</b> Pembangunan akses jalan TransBangka, penyediaan air baku, listrik, dan gas</p> <p><b>Komunikasi dengan Investor</b> Pembahasan MOU yang tertunda akibat Covid19</p> <p><b>Revisi Bisnis Plan:</b> diarahkan untuk menyempurnakan proyeksi kapasitas produksi, jenis produk dan pasar</p> <p><b>Ijin Penetapan Lokasi Pelabuhan</b> Perlu dilengkapi dengan analisis melalui metode <i>cost to cost</i> untuk mendukung usulan penetapan Penlok oleh Kementerian Perhubungan</p> <p><b>Penguatan Koordinasi dan Sinergi</b> antara K/L, Pemda dan PT RBA selaku badan usaha pengelola</p> <p><b>Pelibatan Masyarakat</b> Pengembangan kemitraan antara Badan Pengelola dengan masyarakat dan Pemda dalam penyediaan tenaga kerja, pangan dan jasa yang didukung CSR dan dana desa</p>
<p><b>PROTOKOL KESEHATAN</b></p> <p>Telah dilakukan upaya <i>crowd management</i> dan <i>social distancing</i></p> <p> Tersedianya fasilitas cuci tangan dan <i>hand sanitizer</i></p> <p> Queue and interaction management baik.</p> <p> Pekerja pembangunan di lapangan belum menggunakan masker dan mencuci tangan secara konsisten.</p>		

Sumber: Laporan Kunker di Provinsi Bangka Belitung, diolah 2020

## 2. Provinsi Jawa Tengah

<b>1. FAKTA</b>	<p>1. Kemiskinan di Kab Purworejo 11,45%, di Kab. Kulonprogo 17,39%, dan Kab. Magelang 10,67%. Ketiga kabupaten terdampak pengembangan Zona Otorita BOB</p> <p>2. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dapat didorong dari sektor pariwisata karena termasuk 5 DPSP</p> <p>3. Telah beroperasi YIA dengan kap. 16 juta penumpang/thn, tol trans jawa, pelabuhan cruise, dan jalur kereta api twin track</p> <p>4. BOB dibentuk berdasarkan Perpres 46/2017 dan sejalan dengan Perpres 79/2019 untuk mempercepat perekonomian Jateng</p> <p>5. Pengalihan status lahan menjadi non hutan (309 Ha) ditargetkan selesai November 2020. Anggaran pembangunan infrastruktur dasar dalam kawasan telah disiapkan untuk tahun 2021.</p> <p>6. MoU dan Lol dari 3 investor resort periode 2022-2023. 4x event Enduro (400 atlet/event) dengan track sepeda tersertifikasi UCI</p>	<b>3. REKOMENDASI</b>
<b>2. MASALAH</b>	<p>Jalur jalan Sedayu-BOB sepanjang 6 km tidak dapat dilalui truk untuk konstruksi dan pengangkut alat berat.</p> <p>Kab. Kulonprogo dan Prov. DIY menyatakan ketidakmampuan memenuhi Readiness Criteria untuk pelebaran jalan.</p> <p>Zona otorita BOB perlu dimasukkan menjadi zona prioritas investasi tahun 2021-2024 dalam ITMP</p> <p>Rencana pengembangan Kawasan Pantai Selatan Yogyakarta, kerjasama dengan Paku Alam, membutuhkan dukungan KPBU dari Bappenas dan Kemenkeu</p>	<p>Dibutuhkan pelebaran jalur jalan sepanjang 6 km akan meningkatkan perekonomian 3 Kabupaten melalui pengembangan kawasan Zona Otorita BOB :</p> <p><b>Penyediaan readiness criteria dan pembangunan fisik jalur jalan Sedayu-BOB sepanjang 6 km oleh KemenPUPR</b></p> <p><b>Zona Otorita BOB menjadi bagian dari action plan percepatan investasi di dalam ITMP untuk periode 2021-2024.</b></p>
<b>Dokumentasi</b>		

Sumber: Laporan Kunker di Provinsi Jawa Tengah-D.I Yogyakarta, 2020

### 3. Provinsi Sulawesi Utara

1. FAKTA	
1	KEK/KI Bitung dikelola oleh PT Membangun Sulut Hebat/MSH (BUMD). Telah dibangun jalan dalam Kawasan dan Gedung administrator.
2	Telah dikuasai lahan 92,79 Ha atas nama pemprov Sulut namun belum dilimpahkan kewenangan kepada PT. MSH sebagai pengelola Kawasan
3	PT. Futai sebagai anchor investor berencana membuat 4 pabrik. Saat ini baru dibangun 1 pabrik pengolah sampah dengan luas 6,8 Ha.
4	Sebagian besar perusahaan pada zonasi 534 Ha belum menikmati fasilitas KEK. Tercatat baru satu perusahaan yang mengajukan fasilitas KEK.
5	Berkaitan dengan investasi: terdapat 18 perusahaan eksisting, 51 perusahaan visiting, 35 perusahaan menyampaikan Lol, 7 perusahaan sudah MoU, dan 2 perusahaan sudah Memorandum of Agreement.
6	KEK Bitung langsung terhubung dengan gerbang tol Manado-Bitung di gerbang utama. Pasokan Listrik sudah teraliri oleh PLN pada industri eksisting

2. MASALAH	
1	Dari rencana 534 Ha sesuai masterplan, lahan yang telah dikuasai penuh oleh Pemda: 97,79 Ha dan belum dilimpahkan sebagai aset PT MSH; dan 441,21 Ha sisanya masih dikuasai pihak lain.
2	PT MSH tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyiapkan kawasan sehingga setiap untuk investasi. PT MSH menghadapi kendala untuk mengkonsolidasikan perusahaan eksisting yang sudah berada di luar lahan yang dikuasai.
3	Pengelola mampu mendatangkan Investor (PT. Futai dan PT. Indoworld) namun tidak berlokasi pada lahan 92,79 Ha yang dikuasai. Perusahaan membeli tanah secara mandiri pada zonasi 534 Ha. Pembangunan tertunda karena pandemi. Penetapan PT Futai sebagai anchor industry kurang tepat mewakili keunggulan (value proposition) KEK/KI Bitung.
4	Investor belum siap menanamkan modal karena pandemi covid-19. Mitra kerja (para investor) sementara membatasi aktivitas di KEK Bitung.

3. REKOMENDASI	
1	Promosi dan fasilitasi investasi untuk (i) mitra strategis PT MSH, dan (ii) menambah populasi industri khususnya industri yang mengolah sumber daya unggulan Sulut khususnya perikanan dan pengolahan kelapa.
2	Percepatan penyiapan pembangunan “rest area” (stasiun pengisian bahan bakar, serta perbaikan/perawatan kapal) sebagai pengungkit aktivitas dan investasi di KEK/KI Bitung.
3	Percepatan pelimpahan pemanfaatan lahan (92,79 Ha) yang dimiliki Pemprov kepada Pengelola Kawasan untuk mempercepat penyiapan lahan siap investasi dan memberi kepastian harga sewa.
4	Penyesuaian kembali masterplan serta zonasi pada siteplan untuk konsolidasi rantai pasok industri berdasarkan jenis usaha/produk.
5	Peningkatan koordinasi K/L dan Pemda untuk membantu debottlenecking isu-isu terkait investasi, lahan dan infrastruktur.

Dokumentasi



Sumber: Laporan Kunker di Provinsi Sulawesi Utara, 2020

### 2. Capaian Kinerja Pembangunan Nasional

Untuk mencapai kinerja pembangunan nasional (RKP 2020) tersebut Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian pembangunan nasional terhadap K/L/D yang melaksanakan prioritas nasional tersebut. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. **Capaian kinerja ini melalui pengukuran IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.**



Pengukuran capaian kinerja IKU “Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” dilakukan dengan cara mengukur capaian pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan RKP 2020 di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanah untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional” telah dilaksanakan sesuai *bridging* IKU dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan hasilnya **tercapai 100% dari target 80–83,9%**. Konsistensi capaian maksimal tersebut disebabkan oleh kondisi diantaranya:

1. Koordinasi yang baik dan rutin dengan mitra K/L/D.
2. Komitmen bersama K/L/D terhadap arahan Presiden RI terkait upaya percepatan pembangunan prioritas nasional di pusat dan daerah.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian kinerja pengendalian pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L/D dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional
2. Menggunakan teknologi dan informasi secara intensif dan efisien dalam koordinasi dengan mitra K/L/D.

Rekapitulasi capaian kinerja IKU Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.20. Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**

No.	Indikator Penilaian	Capaian (%)
1	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	100,00
2	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	100,00
<b>Rata-rata</b>		<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat**



Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Rekomendasi ini dihasilkan dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2020 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L. Rekomendasi dapat dilihat melalui laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dokumen perencanaan dan penganggaran K/L; serta laporan lainnya. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L telah melakukan rekomendasi tersebut.



Secara keseluruhan, Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Rekomendasi ini telah **tercapai 100% dari target 100%**. Hal ini dapat dilihat dari semua rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2020 yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja kedeputusan telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pengendalian prioritas pembangunan nasional tahun 2020, utamanya bersumber dari pandemi COVID-19 yang terjadi diluar kendali semua pihak. Shock yang terjadi ini tidak bisa dengan mudah untuk diatasi pada tahun 2020. Kesulitan tidak hanya terjadi dalam perekonomian nasional, tapi juga global. Namun demikian, untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, di tahun yang akan datang perlu dilakukan mitigasi, antara lain:

1. Refocusing/redesign program dan kegiatan yang visible dilakukan saat pandemi masih melanda, namun secara perlahan terus mendorong pemulihan ekonomi nasional.
2. Perkuatan koordinasi dengan K/L mitra kerja untuk bersama-sama mengatasi pandemi.
3. Menerapkan pola kerja baru yang adaptif terhadap new normal, didukung oleh optimalisasi pemanfaatan IT.

Rencana Perbaikan yang akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan hasil capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan menggunakan teknologi dan informasi secara efisien.
2. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

Rekapitulasi indikator persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L berdasarkan Koridor PN RKP 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.21. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat**

Koridor PN RKP 2020	Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti K/L	Jumlah Total Rekomendasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	33	33	100
PN 2	33	33	100
PN 3	24	24	100
PN 4	13	13	100
PN 5	9	9	100
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>
<b>Persentase (%) Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat</b>			

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengendalian pencapaian target PN RKP 2020 telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Contohnya, berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan rencana pembangunan nasional tahun 2021 yang akan dilakukan adalah perbaikan kualitas perhitungan produksi padi/beras menggunakan KSA. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan tersebut di atas telah ditindaklanjuti 100% oleh Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

Contoh lainnya, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 memberi arahan untuk menetapkan sasaran inflasi pangan bergejolak (volatile food/VF) dan menjadikannya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan selama periode 2020-2024. Arahan tersebut dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan target inflasi VF di dalam Renstranya. Dalam bidang keuangan negara, pada tahun 2020 dilakukan evaluasi yang menghasilkan 4 (empat) rekomendasi. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan tersebut telah ditindaklanjuti 100 % oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja Kementerian PPN/Bappenas. Hasil capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat lainnya secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Kedepatian Tahun 2020.

#### **b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah**

Capaian indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah dihasilkan dari upaya dalam pengendalian pencapaian pembangunan prioritas nasional di daerah yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan kinerja pengendalian pembangunan daerah dilakukan dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedepatian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP).

Secara keseluruhan, indikator kinerja persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah **telah tercapai 100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedepatian PEPP telah menyelenggarakan pengendalian pembangunan daerah pada tahun 2020, melalui:

##### **(1) Evaluasi Pembangunan Daerah**

Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pembangunan daerah serta memberikan informasi hasil pembangunan daerah kepada pemangku kebijakan perencanaan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan. Pada awalnya, fokus EPD Tahun 2020 adalah pada pencapaian pembangunan daerah dan evaluasi tematik berdasarkan tema RKP 2020. Namun, dengan adanya pandemi covid-19

menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan EPD tahun 2020, menjadi: (1) Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah; dan (2) Evaluasi Adaptasi Daerah dalam Penanganan Covid-19; (3) Uji Coba Evaluasi Dukungan Daerah terhadap Capaian Prioritas Nasional. Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pencapaian pembangunan daerah di 34 provinsi:
  - a. Target makro RKP dan RKPD 2020 di 34 Provinsi sulit untuk dicapai di tengah situasi pandemi covid- 19, dan hampir semua provinsi melakukan perubahan pada target makro.
  - b. Sebagian besar daerah memiliki progress pencapaian lebih baik dibandingkan dengan nasional, pada indikator tingkat kemiskinan dan TPT.
  - c. Isu strategis pembangunan yang banyak menjadi perhatian pemerintah daerah adalah isu terkait konektivitas dan infrastruktur wilayah, ketenagakerjaan dan pengangguran, struktur ekonomi daerah, dan kemiskinan.
  - d. Telah disusun rekomendasi kebijakan tiap provinsi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan pembangunan.
2. Hasil Evaluasi Adaptasi Daerah dalam Penanganan COVID-19 di 34 provinsi:
  - a. Realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan.
  - b. Mayoritas daerah mengalokasikan penganggaran covid-19 terbesar untuk penanganan bidang kesehatan dan terkecil untuk penanganan dampak ekonomi.
  - c. Realiasi penanganan covid-19 terbesar pada penanganan bidang kesehatan dan terkecil untuk penanganan dampak ekonomi.
  - d. Mayoritas pemerintah daerah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan memproyeksikan terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2020.
  - e. Skenario pemulihan ekonomi daerah fokus pada pariwisata, UMKM, investasi, dan industri.
  - f. Telah disusun rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan pembangunan.
3. Hasil Uji Coba Evaluasi Dukungan Daerah terhadap Capaian Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Timur:
  - a. Proses pengerjaan self tagging program secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, karena belum ada sistem yang dapat memetakan dukungan program daerah terhadap PN-PP-KP.
  - b. Distribusi dukungan program daerah terhadap PN, uji coba pada dokumen RPKP Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 42 persen terhadap PN1, 29 persen terhadap PN3, 17 persen terhadap PN4, 8 persen terhadap PN2, dan 4 persen terhadap PN5.

- c. Kegiatan prioritas paling banyak didukung adalah Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran, dengan jumlah dukungan sebanyak 27 program.
- d. Tidak semua kegiatan prioritas mendapat dukungan program daerah, ada sebanyak 33 kegiatan prioritas yang tidak didukung oleh program daerah Provinsi Jawa Timur.

## **(2) Pemantauan Pembangunan di Daerah**

Pemantauan pembangunan bertujuan untuk: (1) menampilkan perkembangan indikator sasaran pokok yang disajikan dalam Dashboard RPJMN terkait pencapaian pembangunan di 34 provinsi; (2) menganalisis keterkaitan perencanaan pusat dan daerah tahun 2020; (3) mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan pembangunan kewilayahan pada RPJMN 2020-2024. Ruang lingkup pemantauan meliputi: 1) Pemantauan sasaran pokok yang terdiri dari indikator makro beserta komposit ataupun turunan indikator sebagai berikut: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b) Kemiskinan; (c) Pengangguran; (d) Gini rasio; (e) Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pemantauan keterkaitan perencanaan pusat dan daerah; 3) Pemantauan arah pembangunan kewilayahan RPJMN 2020-2024. Hasil pemantauan pembangunan di daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Data capaian indikator makro pembangunan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang ditampilkan dalam dashboard PPD.
- b. Sebesar 50 persen dari indikator sasaran prioritas pembangunan RKP juga menjadi indikator sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- c. Program prioritas daerah mendukung arah kebijakan PN RKP, dimana dukungan tertinggi pada PN infrastruktur dan pemerataan wilayah, sedangkan dukungan terendah pada pengembangan lintas bidang perencana dan perubahan iklim.
- d. Tantangan dalam pengembangan kawasan unggulan berbasis sektor unggulan di Kabupaten Bangka, yaitu: (1) Produksi sawah per petak masih belum optimal dikarenakan permasalahan hama terutama tikus sawah yang sering menyerang pada saat padi mulai berisi; (2) Benih padi yang baru ditanam pada petak sawah terkadang mengalami gagal tanam dikarenakan terendam air akibat kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi; (3) Lokasi areal persawahan pada lahan reklamasi timah merupakan lahan konsesi milik PT Inhutani yang saat ini sedang dalam proses perizinan dengan PT Inhutani.
- e. Pengembangan Kawasan Belitung sebagai salah satu lokus pengembangan Kawasan strategis yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 masih dalam proses perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas DPP Tanjung Kelayang/KEK Tanjung Kelayang. Progress sudah mencapai 4 persen dari total lahan sebesar 324 hektar. Namun untuk pengembangan akses jalan dan ketersediaan air baku, air bersih dan listrik mengikuti kebutuhan tenant yang sudah terbangun.
- f. Telah disusun rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan.

### **(3) Pemantauan pembangunan RKP 2020 di Daerah**

Pemantauan pembangunan RKP 2020 di Daerah dilakukan dengan 2 (dua) cakupan yaitu Joint Money Analisis Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 dalam Pandemi COVID-19, dan Joint Review Pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020. Ruang lingkup dalam Analisis Implementasi DAK Fisik adalah DAK Fisik bidang Pendidikan dan kesehatan, sedangkan ruang lingkup dalam Review Pemanfaatan DID adalah daerah pemenang dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Hasil Analisis Implementasi DAK Fisik 2020 dalam Pandemi COVID-19 diantaranya sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan DAK Fisik Kesehatan ditengah situasi pandemi tidak merubah target-target output, namun pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi target-target outcome langsung. Pada DAK Fisik Kesehatan, pelaksanaan kegiatan mengurangi pencapaian
- b. outcome langsung karena terjadinya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta perubahan psikologis masyarakat terhadap COVID-19. Dampak administratif pengelolaan DAK dalam masa pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi pencapaian outcome langsung kegiatan DAK Fisik Pendidikan. Berdasarkan hasil pemantauan, meskipun pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tidak merubah target output, namun pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi outcome langsung akibat adanya kebijakan pembelajaran secara jarak jauh/virtual. Pada periode awal pandemi COVID-19 (Maret 2020), Kementerian Pendidikan memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh sehingga fasilitas sekolah tidak digunakan oleh siswa dan guru.
- c. Hasil analisis gap perencanaan pada dokumen RKPD 34 Provinsi TA 2020 menunjukkan bahwa masih banyak menu dan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB serta Bidang Pendidikan yang belum masuk dalam perencanaan pemerintah provinsi.
- d. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan pada terganggunya pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB serta Bidang Pendidikan TA 2020. Hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya: a) Pelaksana DAK di daerah masih fokus pada penanganan COVID-19; b) Hambatan pelaksanaan karena pembatasan sosial (social distancing); c) Hambatan supply (waktu pelayanan puskesmas dibatasi) dan demand (orang tidak mau datang) di puskesmas, khusus untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB; d) Pelaksanaan pengadaan terhambat masalah transportasi/ logistik untuk daerah-daerah terpencil; e) Sulitnya ketersediaan tenaga kerja (untuk kegiatan fisik); f) Pengiriman alat-alat kesehatan mengalami keterlambatan; g) Banyak pabrik tidak beroperasi; h) Pengiriman bahan non lokal mengalami keterlambatan akibat

hambatan transportasi; i) Adanya pembatasan mobilitas distribusi barang selama masa pandemi COVID-19; j) Pokja Panitia Pengadaan tidak bisa melakukan peninjauan lapangan dikarenakan tidak ada alat transportasi yang memadai (pesawat tidak beroperasi) sementara pembuktian kualifikasi yang dilakukan secara virtual memiliki resiko penularan COVID-19; k) Pengadaan prasarana TIK belum mendukung kebutuhan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19; l) Terbatasnya ketersediaan barang prasarana pendidikan dan kendala pengiriman untuk barang impor (kasus sarana laboratorium SMK, khusus untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan); m) Tidak dapat dilakukannya sosialisasi tatap muka karena adanya COVID-19 sehingga tatap muka dilakukan terbatas oleh fasilitator.

Hasil Review Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut.

- a. Sebagian besar pemerintah daerah mengalokasikan DID untuk penanggulangan covid-19, baik untuk penanganan kesehatan maupun untuk mendukung pemulihan ekonomi.
- b. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan DID Tahun 2020 diantaranya: 1) Masih sulitnya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DID akibat tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam mengelola DID; 2) Akibat adanya Pandemi COVID-19 dan PSBB di beberapa wilayah, pencapaian target realisasi program/kegiatan tidak maksimal; 3) Informasi terkait alokasi DID sering terlambat sehingga penyusunan rencana penggunaan tidak dapat optimal sesuai sasaran; 4) Tidak ada pengaturan khusus terkait bidang dan proporsi dalam pemanfaatan DID, meskipun sebenarnya menguntungkan daerah karena lebih fleksibel dalam pemanfaatan DID, namun disisi lain justru menimbulkan keraguan dalam pengajuan komitmen terkait rincian pemanfaatan DID; 5) Aplikasi dalam tata Kelola DID masih menyatu dengan ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik) dimana belum terakomodirnya DID Tambahan dalam menu aplikasi ALADIN tersebut; 6) Reward dan Punishment dalam tata kelola dana DID belum tersedia, sehingga pelaksana kegiatan tidak memiliki target pelaksanaan yang terukur; 7) Petunjuk teknis DID terbit setelah proses penganggaran. Hal ini menjadi kendala dalam pengalokasian DID kedalam program/kegiatan yang sesuai.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui unit kerja Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional dengan indikator persentase jumlah K/L/D yang menindaklanjuti rencana percepatan pelaksanaan pembangunan. Ketercapaian indikator diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan dengan jumlah K/L/D yang seharusnya melaksanakan penugasan sesuai rencana. Hasil pengukuran indikator ini dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:

**Tabel 3.22. Perhitungan Indikator Persentase Jumlah K/L/D yang Menindaklanjuti Rencana Percepatan Pelaksanaan Pembangunan**

Jumlah K/L/D Pelaksana Penugasan	Jumlah Realisasi K/L/D Pelaksana Penugasan	Nilai (%)
(1)	(2)	(3)=(1/2)*100%
77	77	100%

Sumber: Hasil Analisis dari Laporan LKJ unit kerja, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional 2020

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Kerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional melaksanakan kegiatan “Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah”. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah (i) meningkatkan efektivitas terhadap perencanaan dan penganggaran untuk penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah dan (ii) mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu: (i) substansi terkait perencanaan dan penganggaran SPM pada Dokumen RKP 2021, Dokumen Renja 2021 K/L pengampu dan (ii) Rencana Kegiatan dan Instrumen Monev Terpadu di tingkat sekber SPM dan K/L pengampu SPM. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output kegiatan tersebut, yaitu: (i) rangkaian koordinasi pengampu SPM lingkup pemerintah pusat; (ii) rangkaian FGD pengampu SPM lingkup pemerintah daerah; dan (iii) perumusan evaluasi hasil kegiatan dan rekomendasi strategi.

Oleh karena kegiatan koordinasi strategis SPM bersifat lintas sektor, di lingkup pemerintah pusat dalam pelaksanaannya melibatkan direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas seperti Direktorat Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan; Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Perumahan dan Permukiman; dan Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana – dan K/L pengampu SPM yaitu Kementerian Dalam Negeri (selaku koordinator Sekretariat Bersama SPM tingkat pusat), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan BNPB. Sementara itu, di lingkup Pemda, mencakup perwakilan OPD dari 34 Provinsi-Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan), Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, BPBD, OPD yang mengurus perihal trantibumlinmas, dan OPD yang mengurus perihal pemadam kebakaran.

## SS-3

### Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Visioner

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, sasaran strategis ini merupakan wujud dari penguatan peran enabler Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan. **Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-3 ini tercapai dengan BAIK.** Sasaran Strategis (SS) Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang visioner ini dimaksud untuk mendukung tercapainya kinerja prioritas nasional RKP 2020.

Capaian sasaran tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. Berikut uraian pencapaian kedua indikator dimaksud.

#### IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Capaian IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

**BERHASIL 100%** dari target **88%**

IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L ditujukan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Indikator ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian penugasan dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L telah **tercapai 100% dari target 85-87,9%**. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L dan menjawab solusi permasalahan pembangunan nasional kekinian. Konsistensi capaian tersebut dapat tercapai maksimal disebabkan oleh:

1. Rekomendasi kebijakan isu strategis yang dihasilkan telah sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta kebutuhan Mitra K/L; dan
2. Perkuatan jaringan komunikasi yang baik dengan Mitra K/L.



Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait;
2. Menggunakan teknologi dan informasi untuk berkoordinasi mitra K/L secara intensif dan efisien; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut bersama Mitra K/L sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.23. Rekapitulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L**

<b>Koridor PN RKP 2020</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</b>	<b>Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional</b>	<b>Nilai Keselarasan (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)=(2/3)*100%</i>
<b>PN 1</b>	20	20	100%
<b>PN 2</b>	21	21	100%
<b>PN 3</b>	10	10	100%
<b>PN 4</b>	6	6	100%
<b>PN 5</b>	6	6	100%
<b>TOTAL</b>			100%
<b>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</b>			

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan isu strategis pembangunan nasional sesuai dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan. Sebagai contoh, pada lingkup bidang ekonomi adalah kegiatan koordinasi strategis perencanaan kebijakan pengendalian inflasi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penugasan khusus kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk turut serta menjaga stabilitas inflasi dengan menjadi anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagaimana diamanatkan di dalam Keputusan Presiden No.23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Penugasan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian PPN/Bappenas (c.q Deputi Bidang Ekonomi) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.6/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kemudian pada tahun 2020, mandat tersebut dioperasionalkan oleh Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter dengan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tagging Pengendalian Inflasi. Hal tersebut dilakukan untuk penajaman fungsi *clearing house* Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pengendalian inflasi, karena tagging yang dibuat merupakan bentuk pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap program/kegiatan K/L yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Kedeputan Bidang Ekonomi menjalankan fungsi clearing house dengan mengawal pencapaian sasaran dan implementasi kebijakan pengendalian inflasi di pusat dan daerah sejak proses perencanaan, melalui: (i) Penetapan sasaran inflasi nasional dan inflasi pangan bergejolak; (ii) Identifikasi program/kegiatan K/L yang mendukung pengendalian inflasi (disusun buku padoman Tagging Anggaran Pengendalian Inflasi); (iii) Sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi dengan daerah melalui forum Rakortek Pembangunan, Musrenbang Provinsi, Rakornas Inflasi, Rakorpusda Inflasi). Koordinasi bersifat multisektor, tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) Daerah.

Contoh lainnya penugasan yang bersifat sangat strategis yang sudah berlangsung dari tahun sebelumnya adalah koordinasi percepatan pemindahan Ibu Kota Negara. Koordinasi ini dilakukan melalui 10 Pokja di bawah Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara, yang salah satu output utamanya adalah Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (Masterplan Ibu Kota Negara (MP IKN). Tercatat sebanyak lebih dari 60 koordinasi telah dilaksanakan di kesepuluh Pokja.

Dari penugasan yang telah berhasil dilaksanakan tersebut, dihasilkan rekomendasi agar tujuan utama dari masing-masing penugasan dapat tercapai. Dalam penugasan Koordinasi Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara ini, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

- Melakukan penguatan peran dan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya dengan Pemerintah Daerah sebagai tahap selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pembangunan ibu kota negara termasuk persiapan transisi menuju pembentukan Otorita Ibu Kota Negara;
- Melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap legalisasi serta penyusunan peraturan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan ibu kota negara;
- Mendorong keberlanjutan dari strategi pengembangan IKN dan rencana pembangunan seluruh aspek IKN termasuk tahapan dan pembiayaan yang telah disusun hingga tahun 2020;
- Melakukan pendalaman dan pendetailan dari strategi pelaksanaan pembangunan, khususnya strategi ekonomi dan strategi pembiayaan, untuk memastikan pembangunan ibu kota negara menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia yang dapat mendorong pemerataan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi nasional dengan membuka peluang investasi serta lapangan kerja.

Secara lengkap capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja UKE I Kedeputan.

### IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L telah **tercapai 100% dari target 75-79,9%**. Hal ini dapat diartikan bahwa rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L demi tercapainya pembangunan nasional yang diinginkan. Konsistensi capaian tersebut dapat tercapai maksimal disebabkan oleh:

1. Rekomendasi kebijakan inovasi yang dihasilkan telah sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta kebutuhan Mitra K/L; dan
2. Perkuatan jaringan komunikasi yang baik dengan Mitra K/L.

Rencana perbaikan dalam mempertahankan/meningkatkan hasil capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait;
2. Menggunakan teknologi dan informasi untuk berkoordinasi mitra K/L secara intensif dan efisien; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan inovasi tersebut bersama Mitra K/L sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Adapun rekapitulasi persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.24. Rekapitulasi Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L**

Koridor PN RKP 2020	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional	Nilai Keselarasan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2/3)*100%
PN 1	2	2	100%
PN 2	2	2	100%
PN 3	1	1	100%
PN 4	2	2	100%
PN 5	2	2	100%
<b>TOTAL</b>			100%
<b>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L</b>			

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I (diolah, 2020)

Inovasi pembangunan merupakan program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inovasi yang ditetapkan sebagai kebijakan/program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah terkait. Pada tahun 2020, salah satu inovasi yang dilakukan adalah *capacity building* Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah, yang menghasilkan perkiraan asumsi KEM Daerah yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Capacity Building* KEM Daerah adalah bentuk inovasi Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan penugasan kepada daerah dalam rangka menjalankan pelaksanaan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik turut berpartisipasi dalam memberikan asistensi kepada daerah dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, serta perencanaan terkait Kerangka Ekonomi Makro Daerah kepada provinsi/kabupaten/kota.

Contoh lainnya adalah kegiatan yang dihasilkan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). ICCTF berfungsi sebagai instrumen pendukung pemerintah dalam menghasilkan perencanaan percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas, salah satunya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan dibidang perubahan iklim (khususnya tahun 2020 pada sektor kelautan dan perikanan) sebagai masukan bagi perumusan kebijakan, untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder pembangunan lainnya.

Tahun 2020, capaian fokus program yang dilaksanakan oleh ICCTF antara lain: Coral Reef Rehalitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) World Bank dan Asian Development Bank (ADB), Blended Finance, Blue Carbon dan Bioeconomic Modelling sumberdaya perikanan serta pencapaian lainnya. Uraian capaian program ICCTF akan diuraikan secara singkat pada subbab capaian kinerja lainnya. Sementara itu, untuk capaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Kedeputan.



## Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sasaran strategis terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Secara umum, Sasaran Strategis (SS) ke-4 ini tercapai dengan BAIK. Sasaran strategis ini dapat tercapai dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran strategis yang terakhir ini dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Adapun capaian kinerja IKU tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

### IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Pada capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas ini akan menyampaikan tidak hanya capaian Indeks RB namun juga menyampaikan capaian Opini BPK dan Nilai SAKIP.

#### 1. Indeks Reformasi Birokrasi



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas merupakan IKU Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang di-bridging dari IKU PK Tahun 2020 "Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas". Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 ini diprediksi tercapai **85,01** dari target **83,00**. Capaian kinerja dari IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas diperoleh dari penilaian

yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara lengkap komponen hasil penilaian RB dan perkembangan capaian terhadap tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.25. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2020**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2019	2020
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Pemenuhan	20,00		18,68
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00		6,90
3.	Reform	30,00		24,14
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>		<b>49,72</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00		8,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00		8,75
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00		9,35
4.	Kinerja Organisasi	10,00		8,50
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>		<b>35,29</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)</b>	<b>100,00</b>		<b>85,01</b>

Sumber: hasil penilaian Kementerian PANRB (2020-2021)

Tahun 2020, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas secara rutin dilaksanakan dengan melibatkan Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Tim Agen Perubahan, baik Tim RB dan Tim Agen Perubahan pada level Kementerian maupun Tim RB dan Tim Agen Perubahan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II. Hal tersebut mengharuskan Biro Renortala sebagai penanggungjawab Tim RB Kementerian untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian PAN dan RB selaku pembina pelaksanaan RB nasional dikarenakan adanya penyesuaian mekanisme penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 30/2018 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 - 2025 untuk mewujudkan pola pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, pada RPJMN 2020 - 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola.

Selain itu, dalam rangka penerapan prinsip good governance, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan reformasi birokrasi (RB) untuk memaksimalkan tugas dan fungsi pelayanan serta perkuatan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada kondisi dan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dan Prioritas Nasional RKP 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa rekomendasi terhadap peningkatan capaian seluruh area perubahan yang perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya serta dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Upaya perubahan yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian RB di Kementerian PPN/Bappenas diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
  - a. Penetapan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024
  - b. Pelibatan tanggungjawab Agen Perubahan dan komitmen Pimpinan pada Quick Wins RB:
    - Penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan Eselon 3 dan 4
    - Penerapan IDW dengan cascading manajemen kinerja berbasis aplikasi
    - Implementasi PP 17/2017 dengan perubahan database perencanaan penganggaran, Kajian Major Project, dan Kajian Enabler yang dilakukan Unit kerja
2. Deregulasi Kebijakan  
Penyelesaian regulasi kebijakan terkait Quick Wins RB 2020, yakni: peraturan mengenai restrukturisasi dan penyederhanaan birokrasi, penerapan IDW, dan revisi atas turunan PP 17/2017.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi  
Finalisasi usulan restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi (penghapusan Eselon 3-4)
4. Penataan Tata Laksana
  - a. Revisi/pemutakhiran Peta Proses Bisnis sesuai Renstra terbaru
  - b. Revisi/pemutakhiran SOP sesuai dengan Peta Proses Bisnis terbaru
  - c. Implementasi SPBE secara menyeluruh
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Reviu Anjab dan ABK sesuai kebutuhan dan strategi dalam Renstra
  - b. Pemutakhiran perhitungan kebutuhan pegawai 5 tahun
  - c. Reviu implementasi kebijakan HCDP

- d. Penyelesaian cascading, pengukuran, dan penilaian kinerja individu (penerapan IDW)
  - e. Penyusunan/pemutakhiran Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
6. Penguatan Akuntabilitas
- a. Penetapan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020 -2024
  - b. Penetapan Renstra UKE-1 2020-2024
  - c. Penyusunan Pedoman SAKIP
  - d. Penyempurnaan dan operasionalisasi aplikasi e-performance yang mengintegrasikan data kinerja dengan anggaran program/kegiatan.
7. Penguatan Pengawasan
- a. Revisi/pemutakhiran Peta Risiko sesuai Proses Bisnis terbaru
  - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP berkala
  - c. Penetapan unit ZI: Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Pemutakhiran SOP pelayanan perencanaan dan pengendalian sesuai Proses Bisnis terbaru
  - b. Perumusan kebijakan rewards and punishment serta pemberian kompensasi pelayanan
  - c. Survei mandiri kepuasan pelayanan kepada mitra kerja/stakeholders

Menurut hasil evaluasi Kementerian PANRB, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap beberapa penilaian hasil antara sehingga dapat memperoleh kategori lebih tinggi, antara lain untuk "Kualitas Pengelolaan Arsip" dan "Kualitas Pengelolaan Keuangan" serta "Merit System";
2. Melakukan pengisian *self assessment* pengelolaan barang dan jasa dan persiapan teknis lainnya yang diperlukan sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP dengan hasil yang baik;
3. Mengupayakan pengintegrasian aplikasi KRISNA dan eMonev dengan aplikasi SAKTI dan SmArt, sedemikian rupa sehingga Kementerian/Lembaga cukup hanya sekali menginput untuk substansi yang sama;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil assessment sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;



5. Mereviu kembali kebijakan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedemikian rupa sehingga semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK dan Kementerian PPN/Bappenas berhasil memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM;
7. Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar atau yang dijanjikan.

Dengan demikian diharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L

Salah satu komponen penilaian RB adalah penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L yang WTP. Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai opini WTP sejak Laporan Keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 yaitu **WTP 3 (tiga belas) tahun berturut-turut**.

Opini WTP tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tercapainya opini WTP, maka menunjukkan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Dengan semakin meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, maka semakin bertambah pula alokasi anggaran Satuan Kerja (Satker). Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) Satker, yaitu Satker Pusat (terdiri dari 4 Satker) dan Satker Dekonsentrasi (terdiri dari 32 Satker Provinsi).

Capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit

kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja keras dalam hal pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.

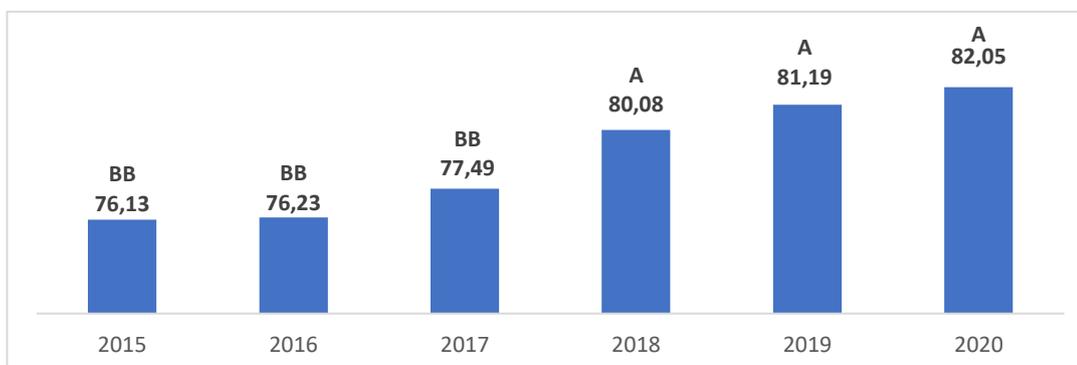
### 3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selain penilaian Opini WTP di atas, komponen penilaian Indeks RB adalah penilaian SAKIP. Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP dari Kementerian PAN RB tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari 81,19 (2019) menjadi 82,05 (2020). Hal ini merupakan kerja keras Kementerian PPN/Bappenas dalam pencapaian kinerja di tahun 2020.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PPN/Bappenas sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Perkembangan capaian hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

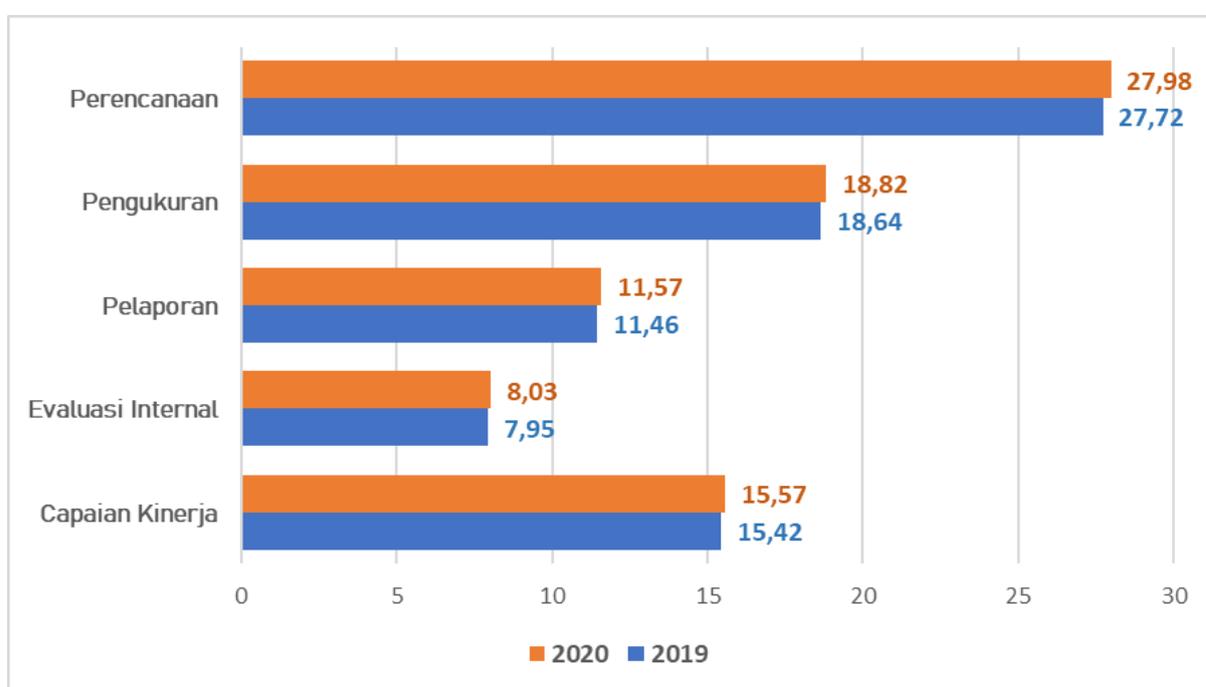
**Gambar 3.6. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2020**



Sumber: Kementerian PANRB (diolah, 2020)

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Capaian Kinerja. Kementerian PAN dan RB menilai bahwa Laporan kinerja di tingkat Kementerian dan Unit Kerja telah menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, namun kedepan perlu penyajian analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2019-2020.

**Gambar 3.7. Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun lama 2019-2020 (angka sementara)**



Sumber: Kementerian PANRB, 2019-2020

Walaupun Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan penilaian yang baik, capaian nilai SAKIP harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Adapun rekomendasi dari Kementerian PAN RB dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;
2. Melengkapi indikator tujuan pada Renstra Tahun 2020 - 2024, baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat unit kerja eselon I;

3. Mereviu kembali penggunaan IKU "Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi" sebagai IKU tingkat kementerian, untuk dapat dipertimbangkan sebagai IKU tingkat unit kerja eselon I;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja tingkat kementerian maupun unit kerja eselon I, dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Proses perbaikan telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran Pimpinan (Eselon 1) dari Esselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
2. Menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang telah dilegalkan.
3. Menyusun Rencana Aksi untuk mengawal pencapaian kinerja
4. Membentuk Tim Penyelenggaraan SAKIP yang aktif dan berkelanjutan
5. Membangun E-SAKIP melalui penyelesaian pembangunan sistem e-Performance
6. Membangun E-SKP
7. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level unit.
8. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level organisasi paling atas sampai dengan yang terendah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.
10. Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan analisis yang memadai dalam penyajian laporan kinerja unit kerja.
11. Melakukan kajian terhadap mekanisme pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai yang selaras dengan capaian kinerja organisasi dan individu.
12. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.

## IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



Capaian IKU Indeks Kepuasan Pemangku  
Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang  
Perencanaan Pembangunan Nasional

NILAI **91,17** dari **85**

IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan IKU Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang di-bridging dari IKU PK Tahun 2020 "Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun

2020 diprediksi **tercapai 91,17 dari target 85,00**. Capaian kinerja dari IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional diperoleh hasil survey internal maupun survey eksternal.

Survei Kepuasan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan yang akan dicapai dalam survei adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Penyusunan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu langkah untuk mengakomodasi harapan dari stakeholder, menilai tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja dari proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional di Kementerian PPN/Bappenas, serta sebagai tolak ukur "apakah proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang sudah dijalankan efektif dan efisien".

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat tidak terprediksi setelah pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Oleh karena itu, IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional ini mengambil tema Survei Evaluasi Peran Kementerian PPN/Bappenas lingkup bidang ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih dan akuntabel serta mengedepankan pelayanan prima kepada semua mitra K/L/D, maka pengukuran kualitas pelayanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap Mitra Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017,

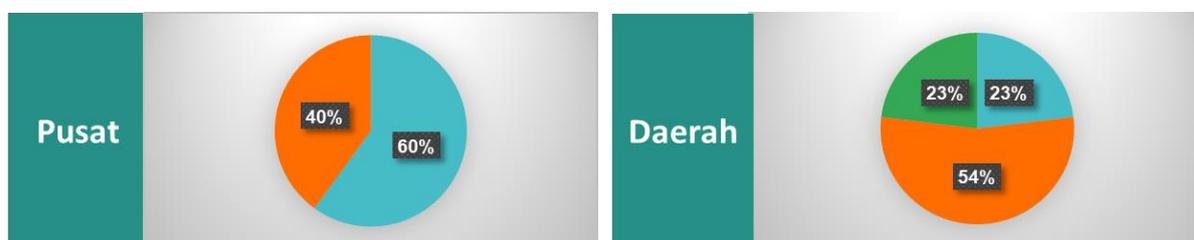
Atas arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kedepuitan Bidang Ekonomi melakukan survei kepuasan stakeholders di tingkat pusat dan daerah.

Survei dilakukan *secara daring* dilakukan oleh Unit Kerja Kedepuitan Ekonomi melalui tautan <http://bit.ly/SurveyEvaluasiBappenas>.

Seluruh responden memberikan **respon positif** terhadap kualitas pelayanan Kemen.PPN/Bappenas (dalam hal ini Kedepuitan Bidang Ekonomi) dalam melaksanakan tugas dan fungsi Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam TPIN.

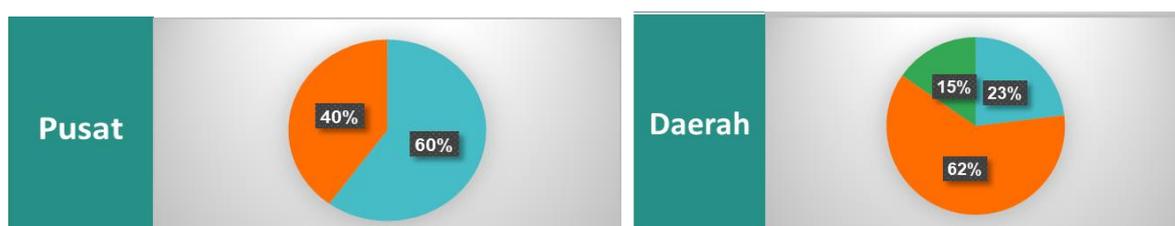
- **100% responden Pusat Sangat Setuju dan Setuju** serta **77% responden Daerah Sangat Setuju dan Setuju** bahwa Kedepuitan Bidang Ekonomi berperan aktif dalam proses perencanaan dan penetapan inflasi.
- **100% responden Pusat Sangat Setuju dan Setuju** serta **85% responden daerah Sangat Setuju dan Setuju** bahwa Kedepuitan Bidang Ekonomi berperan aktif dalam monev pengendalian inflasi.
- **100% responden Pusat Sangat Setuju dan Setuju** dan **85% responden Daerah Sangat Setuju dan Setuju** bahwa Kedepuitan Bidang Ekonomi memberikan pelayanan yang prima (cepat dan berintegritas).

Gambar 3.8. Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Proses Perencanaan dan Penetapan Sasaran Inflasi



Sumber: Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang Ekonomi, 2020

Gambar 3.9. Kementerian PPN/Bappenas Berperan Aktif dalam Pengendalian dan Monev Kebijakan Pengendalian Inflasi



Sumber: Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang Ekonomi, 2020

Gambar 3.10. Kementerian PPN/Bappenas Memberikan Pelayanan Prima (Cepat dan Berintegritas)



Sumber: Laporan Kinerja Kedepuyan Bidang Ekonomi, 2020

Kedepan Bappenas diharapkan untuk: (i) meningkatkan perannya dalam sinkronisasi program/kegiatan dan anggaran K/L/D terkait pengendalian inflasi; (ii) meningkatkan *capacity building* dan pendampingan terhadap TPID; dan (iii) meningkatkan ketersediaan data yang akurat, cepat, dan tepat.

### IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional



IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan IKU baru (belum ada di tahun sebelumnya) yang hadir untuk memastikan bahwa data dan informasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas mendukung tercapainya perencanaan pembangunan nasional. IKU ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi

perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.

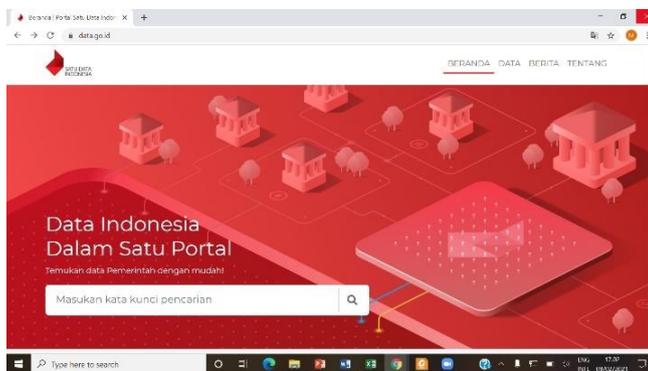
Secara keseluruhan, capaian kinerja IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020 diprediksi **tercapai 88,89% dari target 85%**. Hasil capaian ini diukur dari jumlah aplikasi data dan informasi yang telah terintegrasi terhadap jumlah aplikasi perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebanyak 9 (Sembilan) aplikasi internal yang mengelola data dan informasi renbang, hanya 8 (delapan) aplikasi yang telah terintegarsi data dan informasi renbang. Dengan demikian berdasarkan kamus pengukuran pada Bab 2, capaian kinerja IKU ini sebesar 88,89%.

Walaupun sudah melebihi capaian target, upaya integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional tidak akan berhenti. Kedepan, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk terus mengembangkan aplikasi yang dimiliki untuk didorong dan diarahkan mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi yang disajikan terus diupayakan selalu *up to date* atau data terkini sehingga

menghasilkan ketepatan sasaran pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan nasional akan lebih berkualitas dan kredibel.

Terwujudnya integrasi data dan informasi perencanaan merupakan kinerja aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Capaian IKU ini mengukur aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas yang berpotensi/telah berintegrasi antar aplikasi atau menyajikan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas tersebut diantaranya adalah:

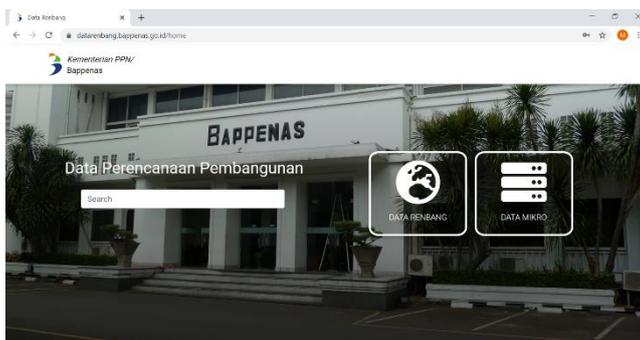
1. Satu Data Indonesia (<https://data.go.id>)



Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Tahun 2020, capaian kinerja aplikasi portal ini belum menunjukkan integrasi data dan

informasi yang optimal dan belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Isi dari portal ini adalah kumpulan data dasar daerah untuk perencanaan pembangunan. Namun, belum semua daerah menerapkan Satu Data tingkat Daerah sehingga data yang disajikan belum lengkap dan belum data terkini. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

2. Data Renbang (<https://datarenbang.bappenas.go.id/>)



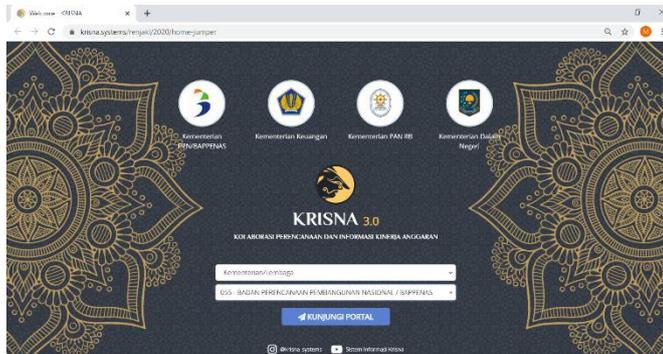
Portal data renbang ini merupakan kumpulan data yang mayoritas berasal dari data BPS dan data pemetaan BIG. Aksesibilitas penggunaan portal ini terbatas dan tidak semua pegawai Kementerian PPN/Bappenas mudah mengakses portal ini, hanya Pejabat tertentu saja.

Masyarakat umum tidak dapat mengakses portal ini. Data dan informasi yang tersedia dalam portal ini diharapkan dapat menyajikan kondisi terkini. Portal data renbang ini sudah bisa dilihat pada tampilan dashboard aplikasi Bitrix ([flexiwork.bappenas.go.id](https://flexiwork.bappenas.go.id)) bersama dengan beberapa aplikasi lainnya. Capaian kinerja aplikasi ini bisa dikatakan sudah menyajikan integrasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses perencanaan pembangunan nasional namun aksesibilitasnya terbatas. Aplikasi data renbang ini dikelola di bawah tanggung jawab Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris



Utama Bappenas yang secara teknis dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

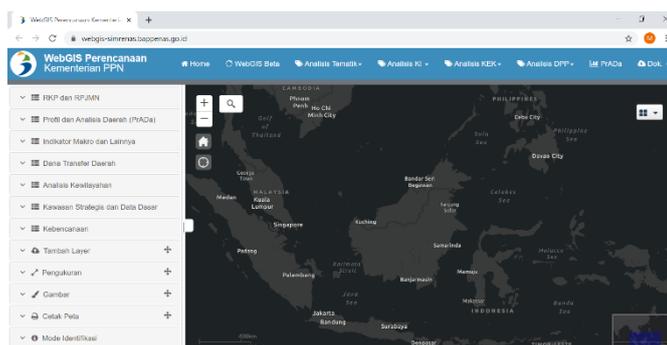
### 3. Krisna (<https://krisna.systems>)



Aplikasi KRISNA merupakan sistem e-planning baru yang diiniasi Bappenas pertengahan 2016 silam. KRISNA mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu sistem tunggal dan mudah digunakan. Aplikasi elektronik itu telah terkoneksi langsung ke

sistem aplikasi penganggaran SAKTI di Kementerian Keuangan RI. Selain itu, juga sudah terkoneksi dengan sistem aplikasi di Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. Sejak diluncurkan pada April 2017, KRISNA telah digunakan oleh 125 kementerian dan lembaga negara untuk mengembangkan serta merevisi rencana kerja dan anggaran di Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian, capaian kinerja aplikasi KRISNA telah tercapat terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Kedepan, aplikasi KRISNA akan terus berkembang dan berinovasi sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan dan anggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah dengan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS). Aplikasi KRISNA ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

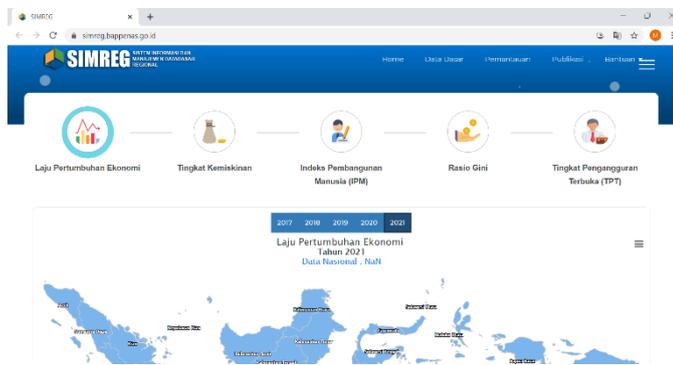
### 4. WebGIS Perencanaan (<https://webgis-simrenas.bappenas.go.id>)



Aplikasi WebGIS Perencanaan ini berisikan kumpulan data tematik daerah yang disajikan dalam bentuk GIS. Data tematik dimaksud diantaranya data: lokasi Proyek Prioritas RPJMN dan RKP, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan data dasar dari BPS, serta analisis

pembangunan daerah. Aplikasi ini terinisiasi dari penajaman perencanaan pembangunan nasional melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) sehingga pembangunan nasional dapat tepat sasaran lokasinya dan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aplikasi ini telah mudah diakses publik dan dapat ditemukan dalam dashboard aplikasi Bitrix. WebGIS Perencanaan ini dikelola aktif di bawah tanggung jawab Deputi Pengembangan Regional.

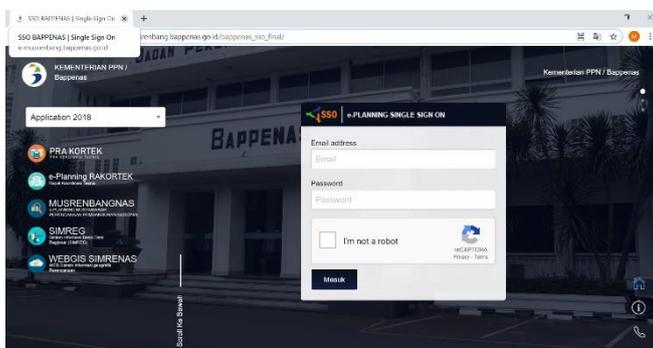
## 5. SIMREG (<https://simreg.bappenas.go.id>)



Aplikasi SIMREG ini berisikan data-data dasar pusat dan daerah yang berasal dari BPS dan instansi terkait lainnya. Selain itu, aplikasi ini berisikan laporan hasil analisis tematik hasil pembangunan di daerah. Kekurangan dari aplikasi ini belum seluruh fitur terisi data yang terkini. Dari segi

aksesibilitas, aplikasi ini mudah diakses publik. Dengan demikian, capaian kinerja aplikasi ini telah terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Kedepan, sasaran daripada kehadiran aplikasi ini terus dioptimalkan sehingga publik dapat memperoleh data dan informasi guna kepentingan proses perencanaan pembangunan di pusat maupun daerah. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Bidang Pengembangan Regional.

## 6. E-Musrenbang (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id>)



Aplikasi e-Musrenbang merupakan portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

e-Musrenbang Mencakup: Aplikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah (e-ISUS); Aplikasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (e-UKPPD); Aplikasi Dana Alokasi Khusus (e-DAK); Aplikasi Dana Hibah (e-HIBAH); Aplikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (e-MusrenbangProv); dan Aplikasi Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (e-PraMusrenbangNas).

Dengan dikembangkan e-Musrenbang berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan; serta mendorong penerapan prinsip-prinsip governance (partisipatif, transparan, efektif dan efisiensi, serta akuntabel) dalam pemberian pelayanan publik dari Kementerian PPN/Bappenas.

Pengembangan e-Musrenbang dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; dengan melibatkan semua direktorat di Bappenas diantaranya: Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (PUSDATINRENBANG); Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Biro ORTALA); dan Kedepkatan Bidang Pendanaan Pembangunan. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi SIMREG, WebGIS SIMRENAS, dan PRA KORTEK. Dengan demikian, aplikasi e-Musrenbang telah berhasil terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, terus ditingkatkan fitur-fitur didalamnya sehingga hasil perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.

#### 7. E-Monev (<https://e-monev.bappenas.go.id>)

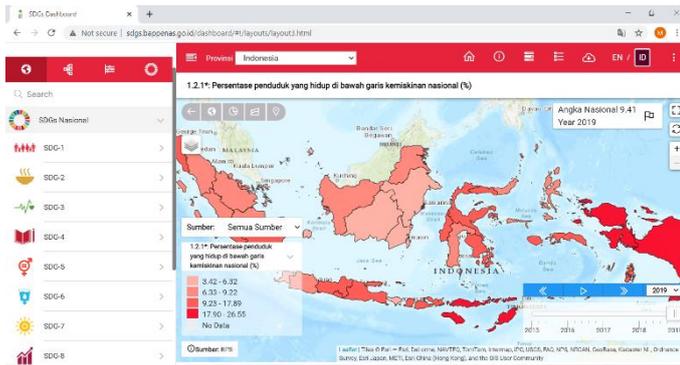


Aplikasi E-Monev merupakan salah satu instrument PEPP yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Data dan informasi hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan

bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan. Aplikasi E-Monev ini telah terintegrasi dengan aplikasi KRISNA sehingga mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Dari segi aksesibilitas, aplikasi ini mudah diakses oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk kepentingan pengendalian, pemantauan dan evaluasi implementasi perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi E-Monev sudah dapat ditemukan pada dashboard aplikasi Bitrix. Dengan demikian capaian kinerja aplikasi E-Monev telah berhasil terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan. Kedepan, akan terus dikembangkan guna semakin mempermudah proses pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

#### 8. Dashboard SDGS (<http://sdgs.bappenas.go.id>)

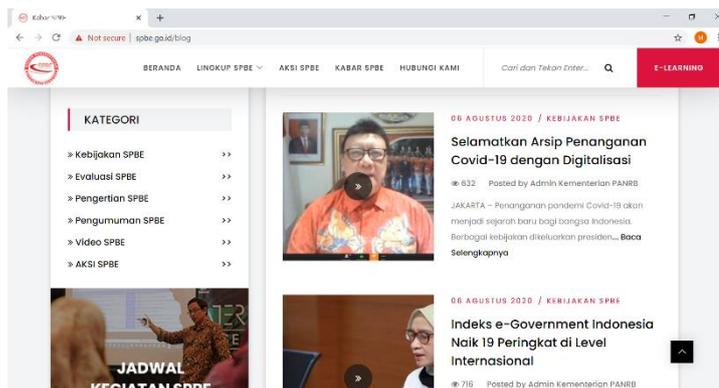
Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Dashboard SDGs merupakan visualisasi dari capaian indikator SDGs Indonesia untuk 17 Tujuannya (Goals), yang sebagian besar merupakan indikator pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah yang disajikan dalam bentuk data capaian dan spasial. Dashboard ini disusun dan dimutakhirkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia bersama BPS dan



didukung oleh Lembaga-lembaga UN. Data dari pihak nonpemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemutakhiran data SDGs. Aplikasi ini tersedia di dashboard aplikasi Bitrix. Dengan demikian, aplikasi Dashboard SDGs dapat dikatakan telah berhasil berintegrasi dengan

data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, akan terus ditingkatkan penyajian data capaian indikator SDGs yang terkini. Aplikasi ini dikelola di bawah tanggung jawab Deputy Kemaritiman dan Sumber Daya Alam melalui Sekretariat SDGs Indonesia.

## 9. SPBE (<https://spbe.go.id>)



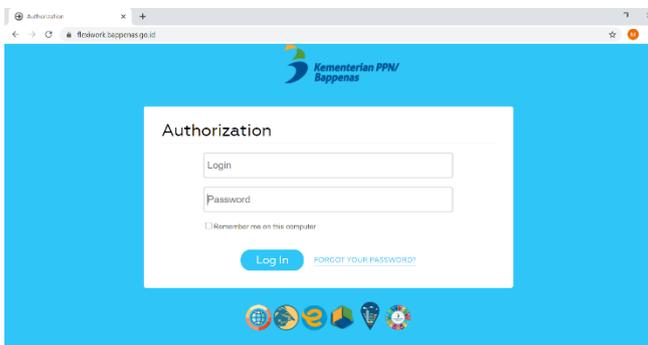
Portal SPBE Nasional ([spbe.go.id](https://spbe.go.id)) hadir dalam rangka diseminasi informasi mengenai perkembangan penerapan SPBE di Indonesia. Anda adalah unsur penting bagi perkembangan SPBE di Indonesia.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 menunjukkan nilai 3,26 dari skala 5 berkategori Baik. Dengan demikian, tahun 2020 ini aplikasi SPBE belum terintegrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kedepan, aplikasi ini akan lebih mendukung upaya pemerintah menerapkan E-Government penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT. Berdasarkan PP 95/2018 tentang SPBE, output yang harus dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas hingga tahun 2025 adalah Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional dalam rangka Pembangunan Portal Data Nasional.

#### 10. IDW-SO (<https://flexiwork.bappenas.go.id>)



Sejak mewabahnya pandemik Covid-19 pada bulan Maret 2020, perubahan pola kerja ASN disesuaikan dengan pola kerja New Normal dimana diberlakukan WFH dan WFO secara bergantian. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan social distancing.

Dengan adanya aplikasi Bitrix ini, Kementerian PPN/Bappenas menjadi contoh di Indonesia yang sudah menerapkan Flexiwork. Flexiwork ini adalah kebijakan yang membuat Aparatur Sipil Negara dapat bekerja tanpa harus 'ngantor' secara konvensional. Pola Flexiwork ini perlahan demi perlahan akan mengubah pola yang lama ke pola yang baru sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik.

Sejak awal diluncurkan, Flexiwork dituntut mampu menjawab sejumlah tantangan yang mengemuka, terutama tentang bagaimana memantau kinerja para ASN selagi remote working dan minim supervisi. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan sejumlah indikator produktivitas untuk menilai kinerja ASN. Terkait kehadiran ASN, dipantau melalui fitur Bitrix.24time.

Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja aplikasi Bitrix tidak masuk dalam capaian IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional melainkan capaian manajemen kinerja ASN. Kedepan, aplikasi Bitrix ini akan dikembangkan terus guna mewujudkan Bitrix sebagai pola baru pengukuran kinerja ASN berbasis IT.

### 3.3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2020

#### 3.3.1. Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selama tahun 2020, beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan kebijakan lainnya sebagai berikut:

**Tabel 3.26. Jenis Peraturan yang Telah Dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 Berdampak Langsung pada Perencanaan Pembangunan Nasional**

No.	Jenis Peraturan	Keterangan
1	Instruksi Presiden	1. Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
	Keputusan Presiden	1. Nomor 20 Tahun 2020 Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
2	Peraturan Presiden	1. Nomor 86 Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah 2021 2. Nomor 122 Tahun 2020 Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2021
3	Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas	1. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 2. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 3. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah

No.	Jenis Peraturan	Keterangan
		<p>untuk Penanganan Perubahan Iklim pada Kementerian PPN/Bappenas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021</li> <li>5. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024</li> <li>6. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional</li> <li>7. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah</li> <li>8. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>9. Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021</li> <li>10. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>11. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia</li> <li>12. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesia</li> </ol>

Disamping itu, masih terdapat beberapa peraturan yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan, diantaranya seperti Rancangan Perpres tentang Percepatan Penurunan Stunting; Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; INEK Gas Rumah Kaca; Korporasi Petani; Jamu; Bantuan Sosial. Selain itu, masih proses Rancangan Undang Undang: Revisi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Ibu Kota Negara; Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Papua. Kemudian, Rancangan Peraturan Pemerintah: Penyelenggaraan Nama Rupabumi; Perkotaan; Informasi Geospasial; dan KPBU IG.

### 3.3.2. Perencanaan Strategis Pemandahan Ibu Kota Negara

Kegiatan Penyusunan Konsep Pemandahan Ibu Kota Negara Tahun 2017 merupakan kajian awal (*preliminary study*) untuk menyusun rekomendasi rencana pemandahan Ibu Kota pemerintahan Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup: analisa latar belakang pemandahan ibukota serta pembelajaran pemandahan ibukota dari negara lain; alternatif bentuk pemandahan ibukota; penetapan kriteria lokasi; penilaian alternatif lokasi ibukota; dan analisa perhitungan kebutuhan pembiayaan dan kelembagaan. Kriteria yang menjadi dasar penilaian lokasi potensial ibukota mencakup 6 aspek, antara lain: letak geografis spasial, tata guna lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, daya dukung fisik lingkungan dan kebencanaan, sosial budaya dan kependudukan serta pertahanan dan keamanan. Kajian awal ini menghasilkan tiga lokasi potensial Ibukota Negara di Pulau Kalimantan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara di tiga calon lokasi yang meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun kajian fisik lingkungan dan Kementerian PUPR untuk menyusun urban design. Hingga saat ini telah dilakukan serangkaian diskusi untuk memperdalam penilaian aspek fisik lingkungan bersama dengan daerah termasuk klarifikasi data fisik lingkungan termasuk tata guna tanah dan penguasaan lahan pada 3 lokasi potensial Ibukota Negara di Pulau Kalimantan.

Pada tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan K/L terkait telah melakukan kajian mendalam lanjutan untuk aspek dampak lingkungan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, peluang pengembangan DKI Jakarta sebagai dampak pemandahan Ibu Kota Negara, pembiayaan dan kelembagaan serta aspek hukum dan regulasi. Adapun kegiatan strategis terkait pemandahan Ibu Kota Negara yang telah Kementerian PPN/Bappenas lakukan di tahun 2019 sebagai regulator dan K/L, diantaranya menghasilkan: (1) Peta dasar skala 1:5.000; (2) Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemandahan Ibu Kota Negara; (3) Survey Inventarisasi Penguasaan Tanah, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan/IP4T; (4) Kajian Lingkungan Strategis/KLHS; (5) Penilaian sosial awal; (6) Rancangan peraturan presiden tentang



kewenangan IKN; (7) Studi FS dan konsep masterplan; (8) Draft Naskah Akademik UU IKN dan RUU IKN; dan (9) Perubahan Pemberian Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sk.838/MENLHK/Setjen/HPL.0/10/2019).

Pada tahun 2020, kegiatan perencanaan strategis terkait pemindahan Ibu Kota Negara tidak dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini dikarenakan dampak negatif penyebaran wabah pandemik Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah penyusunan KLHS RDTR dan penyusunan Studi *Outline Business Case* (OBC) dan *Final Business Case* (FBC) untuk Skema *Public-Private Partnerships* (PPPs). Sementara itu, *output* kegiatan tahun 2020 telah menghasilkan: (1) Masterplan Pembangunan IKN; (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Nasional (RTRW KSN); (3) Pembahasan legislatif tentang UU IKN; (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Otoritas Modal Negara; (5) Penyusunan LKHS Masterplan; (6) Desain perkotaan, RTBL, dan DED; (7) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 1: 5.000; dan (7) Bank Tanah (*land bank*) atau cadangan lahan milik pemerintah.

### 3.3.3. Trilateral Meeting Kinerja

Capaian Trilateral Meeting Kinerja ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, telah ditetapkan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi (Aksi PK). Salah satu target yang harus tercapai di tahun 2020 dalam aksi tersebut adalah "Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Trilateral Meeting Kinerja dalam penyusunan Renja K/L".

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diterbitkan berbagai kebijakan yang terkait dengan hal tersebut yang menjadi acuan bagi K/L, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan kebijakan dan instrumen sistem perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan; Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan dan instrumen sistem penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan kebijakan dan instrumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan dan instrumen yang terbitkan oleh ketiga kementerian ini tentunya harus sinergi dan harmoni, karena adanya keterkaitan yang sangat erat antar sistem yang dibangun dan dikembangkan. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara sistem-sistem tersebut yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Sistem Penganggaran dan Sistem Perbendaharaan

Negara oleh Kementerian Keuangan, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dorongan yang kuat dan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan capaian kinerja yang dimulai dari penguatan kualitas kinerja mulai fase perencanaan kinerja instansi pemerintah melalui forum bersama bersama tiga pihak pembahasan perencanaan kinerja (Trilateral Kinerja) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan K/L Teknis. Trilateral Kinerja ini merupakan forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan serta kinerja K/L yang ditetapkan RPJMN, RKP Renstra K/L dalam periode 5 (lima) tahunan dan dalam Renja K/L setiap tahunnya.

Melalui Pedoman Pelaksanaan Tilateral Kinerja ini, diharapkan agar agenda penyusunan Renstra dan Renja KIL dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, meningkatkan kualitas perencanaan kinerja KIL teknis agar dapat mewujudkan anggaran berbasis kinerja, dan memastikan keselarasan perencanaan pada K/L teknis dengan RPJMN dan RKP.

#### 3.3.4. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kegiatan pelaksanaan teknis operasional, substantif dan administratif Satu Data Indonesia merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Pelaksana Satu Data Indonesia membentuk Struktur Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok kerja yaitu Arsitektur Data dan Informasi, Interoperabilitas dan Portal SDI, Hubungan Daerah dan Data Kependudukan, Keuangan Negara, Data Statistik dan Data Spasial.

Inisiasi awal Peraturan Presiden tentang pelaksanaan Satu Data Indonesia ini dimulai sejak tahun 2017 dan baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2019, sehingga sosialisasi dan pemahaman tentang Perpres Satu Data Indonesia di tingkat Pusat dan Daerah menjadi tugas utama Sekretariat di tahun 2020 ini. Tahun 2020 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat mencapai kinerja dalam empat bagian yaitu; 1) Kelembagaan dan Koordinasi Strategis; (2) Regulasi dan Pedoman; (3) Sosialisasi dan Komunikasi; (4) Integrasi Teknis dan Portal Data.

Selain permasalahan yang utama tentang data yang tidak akurat, mutakhir, tidak dapat dibagipakaikan dan tidak terkini, ada potensi permasalahan yang strategis yaitu:

- a. Berbagai regulasi data yang berpotensi tumpang tindih;
- b. Layanan data tersebar dan belum terintegrasi dengan Portal Satu Data;
- c. SDM dan pendanaan K/L/D untuk penyelenggaraan Satu Data;
- d. Besarnya lingkup dan tata kelola SDI;
- e. Kemerataan infrastruktur data terutama Daerah.

Sehingga penyelesaian yang harus dan sedang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Satu Data ini dengan melakukan beberapa kesiapan:

- a. Kesiapan Kelembagaan Pembentukan Sekretariat SDI Pusat dan K/L/D, Walidata K/L/D, Forum Satu Data sedang terus berlangsung, 60 instansi tingkat pusat sudah menetapkan walidata. 10 Provinsi dalam pendampingan pembentukan Sekretariat SDI.
- b. Kesiapan Pendanaan: K/L/D butuh dorongan agar mengalokasikan cukup untuk penyelenggaraan Satu Data.
- c. Kesiapan Regulasi Regulasi turunan Perpres 39/2019, dan regulasi Satu Data tingkat K/L/D sedang terus dilakukan penyusunan. 34 peraturan dan dokumen turunan SDI dalam proses perancangan
- d. Kesiapan Regional: Dorongan dari Kemendagri untuk pelaksanaan Satu Data Daerah sedang disiapkan, integrasi SIPD dengan SIMPREG sedang dikerjakan Kedeputian Regional.
- e. Kesiapan Teknis: Perlu percepatan dan ekspansi penyiapan dan integrasi Portal Satu Data dan layanan interoperabilitas. 50 Portal data instansi pemerintah sudah terintegrasi.

Selama tahun 2020, beberapa Kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan Sekretariat SDI adalah:

1. Penyusunan Peraturan Menteri Organisasi Tata Kerja SDI
2. Penyusunan Peraturan Menteri Manajemen Data SPBE
3. Penyusunan Surat Keputusan Kelompok Kerja SDI
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Statistik
5. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Spasial
6. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Keuangan
7. Penyusunan Dokumen Peta Jalan SDI 2020 – 2022
8. Penyusunan Dokumen Manajemen Data SDI – SPBE
9. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data SDI – SPBE
10. Penyusunan Dokumen Manajemen Kode Referensi / Data Induk
11. Penyusunan Dokumen Model Referensi
12. Penyusunan Referensi Regulasi SDI tingkat InstansiPusat
13. Penyusunan Referensi Regulasi SDI tingkat Provinsi
14. Penyusunan Referensi Regulasi SDI tingkat Kota/Kabupaten
15. Manajemen Interoperabilitas Data
16. Penyelenggaraan Infrastruktur SDI
17. Pengembangan Portal SDI
18. Penyusunan Daftar Data untuk Kebutuhan SDGs
19. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Bantuan Sosial Keadaan Mendesak di Pemerintah Daerah (Lokasi Pilot Provinsi DIY)

20. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Aset UMKM tingkat Pemerintah Daerah (Lokasi Pilot Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi)
21. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Aset Desa (Lokasi Pilot Desa Panggunharjo, DIY)
22. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data Covid-19 di Pemerintah Daerah (Lokasi Pilot Provinsi Jawa Barat)
23. Penyelenggaraan Komunikasi dan Sosialisasi Satu Data Indonesia
24. Penyelenggaraan Kegiatan dan Koordinasi Strategis SDI tingkat Daerah
25. Penyelenggaraan Kegiatan dan Koordinasi Strategis SDI tingkat Pusat
26. Penyusunan Laporan Presiden Pelaksanaan SDI 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan SDI ini, masih terdapat kendala yang masih dihadapi. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan SDI meliputi yaitu:

1. Berbagai regulasi data berpotensi tumpang tindih;  
SDI menghadapi tantangan berupa perlu adanya harmonisasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang lain (menghadapi ego sektoral). Beberapa masalah yang dihadapi adalah salah satunya terkait dengan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, lalu peraturan existing lain baik pada level Perpres, Permen, maupun Perka Daerah.
2. Layanan data tersebar dan belum terintegrasi dengan Portal Satu Data;  
Terkait interoperabilitas data, memiliki tantangan sendiri dan yang paling sering ditemukan, yaitu adanya rasa kepemilikan terhadap data pada masing-masing layanan digital dan portal data pemerintah.
3. SDM dan pendanaan K/L/D untuk penyelenggaraan Satu Data;  
Perlunya ada sistem sosialisasi supaya hasil sosialisasi bisa menjadikan adanya penyamaan level pemahaman dari SDI. Namun tantangan yang lain adalah, adanya pergantian personal yang dinamis, perlu adanya kebutuhan sumber daya manusia SDI yang memadai (diklat, jenjang karir). K/L/D butuh dorongan agar mengalokasikan cukup untuk penyelenggaraan Satu Data.
4. Besarnya lingkup skala tata kelola SDI;  
Skala tata kelola SDI besar, terdiri dari lebih dari 600 Walidata, ribuan Walidata Pendukung, dan ribuan Produsen Data. Selain skala tata kelolanya yang besar, skala substansi SDI juga besar, termasuk standar data, metadata, interoperabilitas, dan big data. Regulasi turunan Perpres 39/2019, dan regulasi Satu Data tingkat K/L/D sedang terus dilakukan penyusunan. 34 peraturan dan dokumen turunan Perpres SDI dalam proses perancangan.

#### 5. Ketersediaan infrastruktur data terutama Daerah;

Tantangan yang berasal dari internal, yaitu terkait dengan infrastruktur dan aplikasi (pusat data nasional/cloud pemerintah, jaringan, aplikasi). Perlu percepatan dan ekspansi penyiapan dan integrasi Portal Satu Data dan layanan Interoperabilitas.

Kinerja Sekretariat Satu Data Indonesia di tahun 2020 mampu memberikan dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang cukup kuat, yaitu mengenai pentingnya pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia yaitu: Satu Standar Data, Satu format Metadata, Interoperabilitas, dan satu Kode Referensi/Data Induk dalam tata kelola data instansi Pusat dan Daerah. Masing-masing kegiatan telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidangnya masing-masing sehingga bentuk pelaksanaan Sekretariat Satu Data Indonesia tahun 2020 dapat menjadi contoh penyelenggaraan Satu Data Indonesia di masa yang akan datang.

#### 3.3.5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sesuai dengan Perpres No. 95/2018 penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan (3) Mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sedangkan sasaran dari penyelenggaraan SPBE, di antaranya (1) Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; (2) Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; (3) Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia SPBE.

Sampai dengan tahun 2020, capaian gambaran pelaksanaan kegiatan SPBE adalah sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian Proses Perencanaan SPBE  
Penetapan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L untuk Mendukung SPBE, dilakukan dengan:
  - a. Pembangunan/pengembangan aplikasi baru, server, pusat data (data center) harus mendapatkan clearance dari Kemenkominfo; dan
  - b. Dalam hal belum mendapatkan clearance maka anggaran untuk kegiatan/proyek tersebut diblokir.
- 2) Pengoordinasian Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen Data  
Capaian dari kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola, dilakukan melalui:
  - a. Telah dilaksanakan sosialisasi Satu Data Indonesia (SDI) pada 3 Agustus 2020, yang dihadiri oleh lebih dari 300 perwakilan K/L dan Pemda;
  - b. Telah dilakukan konfirmasi penetapan 61 Walidata Instansi Tingkat Pusat;
  - c. Disusunnya draf Rancangan Peraturan Menteri (R-Permen) PPN tentang Portal SDI;

- d. Sedang disusun Rancangan Permen PPN tentang Tata Kerja, Forum, Dewan Pengarah, dan Sekretariat Tingkat Pusat;
- e. Penetapan Peta Jalan (Road Map) SDI;
- f. Petunjuk teknis Prinsip SDI tentang Standar Data dan Metadata Statistik, dan sedang disusun petunjuk teknis Standar Data dan Metadata pada data spasial dan data keuangan; dan
- g. Implementasi skema SDI pada topik strategis terkait dengan tata kelola data mendesak bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor UMKM.

Capaian dari penyusunan Arsitektur Data dan Informasi & Permen PPN tentang Manajemen Data SPBE, di antaranya:

- a. Telah diselesaikan penyusunan Model Referensi Data SPBE, yang juga merupakan pemenuhan target B17 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- b. Telah diselesaikannya usulan draf Arsitektur Data dan Informasi SPBE;
- c. Telah disusun Rancangan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data SPBE (di samping sebagai pemenuhan target B21 Stranas PK);
- d. Finalisasi Rancangan Permen Manajemen Data SPBE menjadi Permen (di samping pemenuhan target B24 Stranas PK), yang dalam substansinya mencakup lima aspek sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 95/2018, yaitu: (1) arsitektur data, (2) data induk, (3) data referensi, (4) basis data, dan (5) kualitas data.

3) Pengoordinasian Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan Evaluasi

Capaian dari integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan evaluasi, di antaranya:

- a. KRISNA telah digunakan sebagai sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan proses bisnis berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- b. KRISNA digunakan sebagai rujukan penyusunan RKA-K/L yang merupakan rincian anggaran per satker;
- c. KRISNA telah digunakan untuk proses perencanaan dan pengalokasian DAK fisik sesuai dengan proses bisnis yang diatur oleh KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri;
- d. Standar teknis dan prosedur pengembangan KRISNA sedang diuji oleh BPPT; dan
- e. Sistem Informasi KRISNA sebagai aplikasi umum perencanaan dan SAKTI (sebelumnya RKAK/L) sebagai aplikasi umum penganggaran telah terintegrasi dengan menggunakan API service.

Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPBE ini, antara lain:

- (1) Dalam pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola dan manajemen data terdapat kendala untuk penyiapan Rancangan Permen PPN tentang manajemen data (disamping pemenuhan target Stranas PK) di antaranya terbatasnya waktu yang tersedia untuk melakukan finalisasi dokumen Rancangan Permen yang kurang dari tiga bulan, dan banyaknya jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang perlu difinalisasi oleh Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas sehingga terjadi penumpukan dan berdampak pada waktu finalisasi yang lebih lama dari seharusnya; dan
- (2) Dalam pengoordinasian perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan evaluasi dari hasil diseminasi pemanfaatan KRISNA belanja K/L dan DAK Fisik masih diperlukan integrasi aplikasi KRISNA DAK dan KRISNA Renja K/L khususnya penyesuaian nomenklatur output/rincian output yang lebih rinci untuk mensinkronkan belanja K/L dan DAK Fisik.

### 3.3.6. Penyelenggaraan ICCTF

Capaian Kinerja Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (MWA ICCTF) merupakan gambaran kinerja kegiatan ICCTF sebagai instrumen untuk mendukung pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan akuntabel dengan fokus pada kebijakan inovasi pembangunan yang kemudian dijalankan/dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga dan stakeholder pembangunan lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam perjanjian hibah yang dikoordinasikan oleh Majelis Wali Amanat (MWA).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor. 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, terdapat 3 (tiga) struktur kelompok kerja (Pokja), yang terdiri dari: Kelompok Kerja (Pokja I) di bidang program dan kegiatan strategis dan inovasi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dan lahan gambut, industri, transportasi, dan limbah. Pokja II, mengatur bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor energi baru dan terbarukan. Serta, Pokja III di bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2020, sesuai dengan perubahan kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas maka Pokja I dan Pokja II melaksanakan kegiatan mandiri yang terpisah dari program kerja ICCTF yang dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan. Pokja I telah menginisiasi kegiatan mandiri berupa Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiatives).

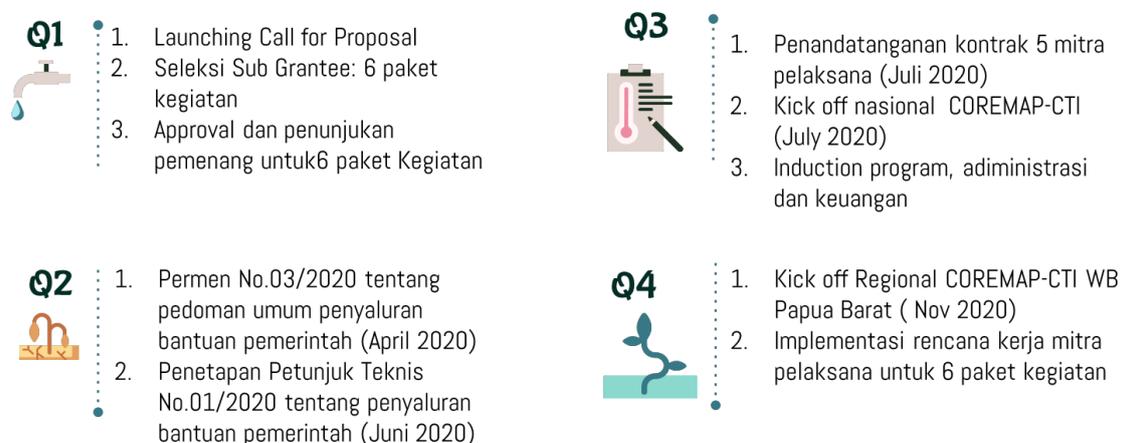
Sedangkan Pokja II melanjutkan Penyiapan Proyek Energi Terbarukan (Project Pipeline) serta Kerja Sama Pendanaan dan Pengembangan Proyek Energi Terbarukan. Oleh karena itu, LKj MWA ICCTF Tahun 2020 ini akan memuat pelaksanaan kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan oleh Pokja III saja sebagai Koordinator ICCTF tahun 2020.

Fokus program yang dilaksanakan oleh ICCTF Tahun 2020 antara lain: Coral Reef Rehalitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) World Bank dan Asian Development Bank (ADB), Blended Finance, dan Blue Carbon. Selain itu, ICCTF juga melakukan kegiatan inovasi seperti bioeconomic modelling sumberdaya perikanan, dan penerapan protocol COVID-19 yang ketat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian Program:

- COREMAP-CTI World Bank (WB) memiliki tujuan untuk peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Program ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 Juni 2019 – 30 Juni 2022 dengan total pendanaan dari hibah Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui WB sebesar USD 6,2 juta. Lokasi kegiatan COREMAP-CTI WB meliputi TWP Laut Sawu, NTT serta SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat, SAP Kep. Raja Ampat, dan KKPD Raja Ampat, Papua Barat. Penyaluran pendanaan hibah COREMAP-CTI WB ini melalui 6 paket program yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana yang berasal dari NGO/CSO dan Universitas.

**Gambar 3.11. Capaian Program COREMAP-CTI WB Tahun 2020**



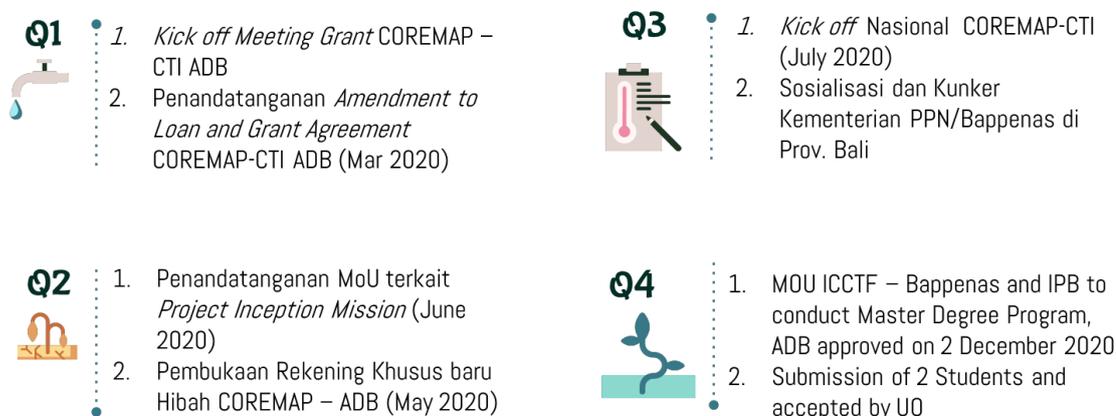


Gambar 3.12. Paket Program COREMAP-CTI WB yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Mitra Pelaksana

	<b>Paket 1</b>	<b>Paket 2</b>	<b>Paket 3</b>	<b>Paket 4</b>	<b>Paket 5</b>	<b>Paket 6</b>
<b>Judul Kegiatan</b>	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Raja Ampat	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara berkelanjutan di Laut Sawu	Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ National Plan of Action (NPOA) Jenis Terancam	Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu / Integrated Coastal Zone Management (ICZM)	Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Akses Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat
<b>Mitra Pelaksana</b>	Yayasan Terangi	YAPEKA	Reef Check Indonesia	PKSPL IPB	Yayasan Terangi	Yayasan PILI
<b>Nilai Hibah</b>	IDR 17,4 M	IDR 10,5 M	IDR 13,5 M	IDR 12,1 M	IDR 18,8 M	IDR 8,3 M
<b>Output Kegiatan (summary)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur skala kecil untuk ekowisata</li> <li>• Pengembangan usaha berbasis rumah tangga</li> <li>• Rehabilitasi ekosistem</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> <li>• Pemantauan ekosistem pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur skala kecil untuk ekowisata</li> <li>• Pengembangan usaha berbasis rumah tangga</li> <li>• Rehabilitasi ekosistem</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> <li>• Pemantauan ekosistem pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platform pencatatan dan system database</li> <li>• Kajian dinamika populasi, kesesuaian habitat, pola pergerakan dan sensus populasi</li> <li>• Panduan laku wisata jenis</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> <li>• Pengembangan usaha ekowisata berbasis jenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana teknis implementasi RZWP3K</li> <li>• Rencana teknis pemanfaatan KKP</li> <li>• Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP3K</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> <li>• Rehabilitasi ekosistem pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalisasi POKMASWAS</li> <li>• Rencana kerja POKMASWAS</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> <li>• Infrastruktur dan sarana pengawasan operasional POKMASWAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POKJA KMHA</li> <li>• Kajian mekanisme kerja tenurial system</li> <li>• Kajian bioekonomi untuk rencana RBFM</li> <li>• Rencana pengelolaan berbasis hak</li> <li>• Kemitraan dan implementasi Rencana pengelolaan</li> </ul>

- COREMAP-CTI Asian Development Bank (ADB) memiliki tujuan untuk manajemen ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas untuk mengelola ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi perairan yang ditargetkan. Program ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 Maret 2020 – 31 Desember 2022 dengan total pendanaan dari hibah Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui ADB sebesar USD 5,2 juta. Lokasi kegiatan COREMAP-CTI ADB meliputi Provinsi Bali (KKP Nusa Penida) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (KKP Gili Matra, KKP Gili Balu). Penyaluran pendanaan hibah COREMAP-CTI ADB ini melalui 6 paket program yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana yang berasal dari Perusahaan Konsultan, NGO/CSO dan/atau Universitas. Selain itu, terdapat pula kegiatan kajian Supply Chain untuk komoditas Tuna, Snapper dan Seaweed serta kegiatan beasiswa Master Degree Program (S2) dan International Short Training bagi para pihak pemangku kebijakan di sektor Kelautan dan Perikanan.

**Gambar 3.13. Capaian Program COREMAP-CTI ADB Tahun 2020**



- **Blended Finance** memiliki tujuan untuk mengkaji dan menginisiasi inovasi strategi untuk pembiayaan terkait pesisir dan laut khususnya pendanaan inovatif untuk investasi yang mendukung pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP) sebagai embrio lahirnya Sustainable Blue Finance Institution (SBFI) melalui dukungan Pro-Blue Program World Bank.

**Gambar 3.14. Capaian Program Blended Finance Tahun 2020**



- **Blue Carbon** memiliki tujuan untuk mendukung pengembangan Karbon Biru Indonesia (Indonesia Blue Carbon Strategy Framework-IBCSF) sebagai framework yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dalam pengembangan karbon biru. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Policy Dialogue melalui dukungan DISER-Australia dan pengembangan proposal pendanaan karbon biru.

**Gambar 3.15. Capaian Program Blue Carbon Tahun 2020**



- Bioeconomic Modelling adalah salah satu kegiatan ICCTF di level nasional yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui pengaturan jumlah armada optimal, resource rent tax/penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta instrument pengendalian pengelolaan perikanan.

Pada tahun 2020, terdapat 3 rangkaian kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu: Data dan analisis, capacity building dan diseminasi rekomendasi kebijakan. Untuk kegiatan data dan analisis telah dilakukan 3 (tiga) kegiatan trip survey eksplorasi sumber daya udang di laut arafura dengan bekerjasama antara ICCTF dan KKP. Dari trip ini diperoleh data primer penangkapan udang untuk periode Juli – November 2020 yang nantinya akan digunakan sebagai data parameter untuk kajian Bioekonomi. Selanjutnya, telah dihasilkan rekomendasi pengelolaan sumber daya udang berdasarkan hasil modelling bioekonomi berupa pengaturan jumlah armada optimal, resource rent tax/penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta instrument pengendalian pengelolaan perikanan. Untuk kegiatan capacity building telah dilakukan kegiatan Short course bioeconomic analysis to improve fisheries management practice bagi para peneliti dibidang sosioekonomi dan manajemen perikanan KKP. Serta dilakukan pula kegiatan Workshop bioeconomic for fisheries management untuk meningkatkan pengetahuan para pihak dibidang pengelolaan sumber daya perikanan dan perikanan tangkap. Sedangkan untuk kegiatan diseminasi telah dilakukan Workshop hasil kajian modeling bioeconomic sumber daya udang di Laut Arafura kepada para pihak terkait dan disusun pula policy brief pengelolaan sumber daya udang di WPP 718 untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Secara ringkas capaian program Bioeconomic pada setiap Quartal 2020 ditunjukkan pada Gambar berikut ini

**Gambar 3.16. Capaian Program Bioeconomic Tahun 2020**

 <b>Data &amp; Analisis</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 trip survey eksplorasi sumber daya udang di laut arafura terlaksana</li> <li>2. Data primer penangkapan udang Juli – November tersedia</li> <li>3. Rekomendasi pengelolaan sumber daya udang berdasarkan hasil modelling tersedia</li> </ol>	 <b>Capacity Building</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Short course bioeconomic analysis to improve fisheries management practice</li> <li>2. Workshop bioeconomic for fisheries management</li> </ol>	 <b>Dissemination</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop hasil kajian modeling bioeconomic sumber daya udang</li> <li>2. Policy brief pengelolaan sumber daya udang di WPP 718</li> </ol>
--	---	---

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020, terdapat kendala utama yaitu Pandemi COVID-19 yang menghambat semua rencana kerja ICCTF yang telah direncanakan. Dampak dari pandemi ini adalah mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat terlaksananya beberapa kegiatan di lapangan dan melibatkan khalayak ramai. Untuk menanggapi permasalahan ini, ICCTF telah melaksanakan revisi rencana kerja dan anggaran beserta penyesuaian waktu pelaksanaannya. Selain itu, ICCTF juga telah melaksanakan penerapan kegiatan berdasarkan protokol COVID-19 baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional sekretariat dan juga pelaksanaan proyek di lapangan.

### 3.3.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku koordinator Pelaksanaan TPB/SDGs terus menerus mengarusutamakan Target TPB/SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan bahkan pada tahun 2020-2024 jumlah target TPB/SDGs meningkat dari 94 di tahun 2015-2019 menjadi 124 target. Hal ini menunjukkan wujud besarnya komitmen Indonesia untuk mencapai TPB/SDGs sampai tahun 2030.

Percepatan pencapaian Prioritas Nasional dalam kerangka kerja TPB/SDGs menekankan adanya hubungan kerja sama yang saling terkait pada setiap indikator, target bahkan Tujuan/*Goal*. Hubungan keterkaitan ini untuk memastikan bahwa target yang akan dicapai telah memperhitungkan ketercapaian target yang lain sehingga prioritas nasional dapat tercapai secara inklusif. Selama tahun 2020, Sekretariat TPB/SDGs telah mencapai beberapa hal berikut.

1. Pengarusutamaan TPB/SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
2. Pemutakhiran indikator dan ketersediaan sumber data TPB/SDGs yang disajikan dalam Pedoman Metadata Edisi II untuk empat pilar (sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola).

3. Penerbitan panduan strategi komunikasi TPB/SDGs yang merupakan acuan bagi semua pihak untuk menyampaikan pesan-pesan TPB/SDGs.
4. Penerbitan panduan penyusunan rencana aksi TPB/SDGs edisi II untuk periode 2020-2024 dan dilengkapi pula dengan panduan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs Edisi II.
5. Penerbitan Laporan perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2019.
6. Fasilitasi terbentuknya 21 SDGs *Center* Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.
7. Koordinasi fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah dan fasilitasi peningkatan kapasitas terhadap pelaksanaan TPB/SDGs di daerah.
8. Pelibatan seluruh platform TPB/SDGs (Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi dan Pakar, serta Organisasi Kemasyarakatan).
9. Keterlibatan dalam agenda internasional yang memiliki keterkaitan dengan TPB/SDG.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada pasal 10 ayat 2 menetapkan bahwa Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sebagai Tim Pelaksana Koordinasi TPB/SDGs yang dalam hal ini merupakan Penanggung Jawab Pelaksana PN-6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

### 3.3.8. Pengelolaan Program Kerjasama Bilateral dan Multilateral

#### ▪ Kegiatan Kerjasama Pembangunan Global

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi penugasan khusus dari Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait koordinasi pembangunan global G20 Development Working Group (DWG). Kementerian PPN/Bappenas merupakan focal point isu pembangunan mewakili Pemerintah Indonesia dalam forum G20.

Tahun 2020 merupakan G20 Presidensi Arab Saudi. Pada DWG kegiatan diawali melalui pertemuan informal dan workshop G20 DWG pada 21-22 Oktober 2019 di New York dan dilanjutkan dengan kegiatan Side Event South-South and Triangular Cooperation di Riyadh pada 9 Desember 2019. Pertemuan formal DWG pertama dilakukan di Riyadh pada 10-11 Desember 2019, kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan secara virtual karena adanya pandemic COVID-19. Pertemuan kedua pada 17 Juni 2020, pertemuan ketiga pada 1- 2 September 2020, dan pertemuan keempat (drafting session) pada 16-20 November 2020.

Pada setiap pertemuan DWG, Direktorat Kerja Sama Pendanaan Multilateral menyampaikan intervensi Pemerintah Indonesia guna memperjuangkan prioritas nasional dan membawa isu pada negara berkembang. Dikarenakan Indonesia menjadi negara yang mewakili aspirasi negara berkembang pada forum G20. Hal ini merupakan

hasil koordinasi dan diskusi Kementerian PPN/Bappenas, Sherpa (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Kementerian/Lembaga terkait serta akademisi.

Hasil pertemuan G20 dari semua working group dirumuskan ke dalam Leaders Declaration yang telah terlaksana pada 20 November 2020 yang dihadiri Presiden RI. Hasil dari pertemuan G20 dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pada tahun 2021, kegiatan G20 DWG akan dilanjutkan dengan kepemimpinan Presidensi Italia dan tahun 2022 Presidensi Indonesia.

#### ▪ **Kerjasama Bilateral dengan Mitra Pembangunan**

Pada tahun 2020 telah melaksanakan 3 (tiga) Pertemuan Bilateral yang terdiri atas Pertemuan Konsultasi Bilateral Indonesia-Inggris, Senior Official Meeting Indonesia-Kanada dan Sosialisasi Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) Indonesia-Amerika Serikat.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan 6 penandatanganan kesepakatan dengan 3 mitra pembangunan yang terdiri atas 2 kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Korea, 1 kesepakatan dengan Pemerintah Inggris dan 3 kesepakatan dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi penerima hibah kompetisi Program Compact Tahap 2 dari Millennium Challenge Corporation (MCC) yang merupakan lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Dalam rangka persiapan dan Pengembangan Program Hibah COMPACT Tahap 2 MCC, Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) pada kurun waktu 2013-2018 telah menyediakan komitmen hibah sebesar 600 juta dolar AS melalui Program Compact I yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dana hibah tersebut telah direalisasikan untuk membiayai berbagai program (fisik dan non-fisik) melalui 3 kegiatan utama yaitu Program Kemakmuran Hijau, Program Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Program Modernisasi Pengadaan. Pada bulan Desember 2018 MCC kembali memberikan kesempatan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hibah Compact yang kedua. Pemerintah Indonesia menyambut positif atas tawaran MCC pada hibah Compact Tahap II. Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai Koordinator Nasional untuk melakukan persiapan dan pengembangan Program Compact Tahap II.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai Koordinator Nasional untuk melakukan persiapan dan pengembangan Program Compact Tahap II. Untuk mempersiapkan program hibah tersebut, Direktur KSP Bilateral ditugaskan untuk menjadi koordinator Kegiatan Persiapan dan Pengembangan Program Hibah COMPACT Tahap 2 MCC. Dalam pelaksanaan kegiatan, Direktur KSP Bilateral

dibantu oleh Compact Development Team (CDT) yang terdiri atas satu orang koordinator nasional, satu orang penasihat senior, 9 orang tenaga ahli dan 3 orang tim kesekretariatan. Sepanjang tahun 2020 CDT telah melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan Root Cause Analysis
- b. Penyusunan Concept Note (Concept Note ini telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada MCC dan telah disepakati)
- c. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Multistakeholder
- d. Melaksanakan konsultasi dengan kedeputian dan direktorat terkait di Bappenas serta FGD dalam rangka mendapatkan masukan bagi penyusunan proposal kegiatan
- e. Pengembangan konsep/mode kelembagaan/fund channelling

### 3.3.9. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011. Apresiasi diberikan pada daerah terbaik berupa piala dan piagam. Namun, sejak tahun 2017, penghargaan yang diberikan tidak saja dalam bentuk piala dan piagam, tetapi ada insentif tambahan lain, diantaranya usulan penambahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; pembinaan bagi aparatur daerah oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas; dan Seminar Knowledge Sharing Pembangunan Daerah untuk sharing praktik – praktik cerdas pembangunan daerah.

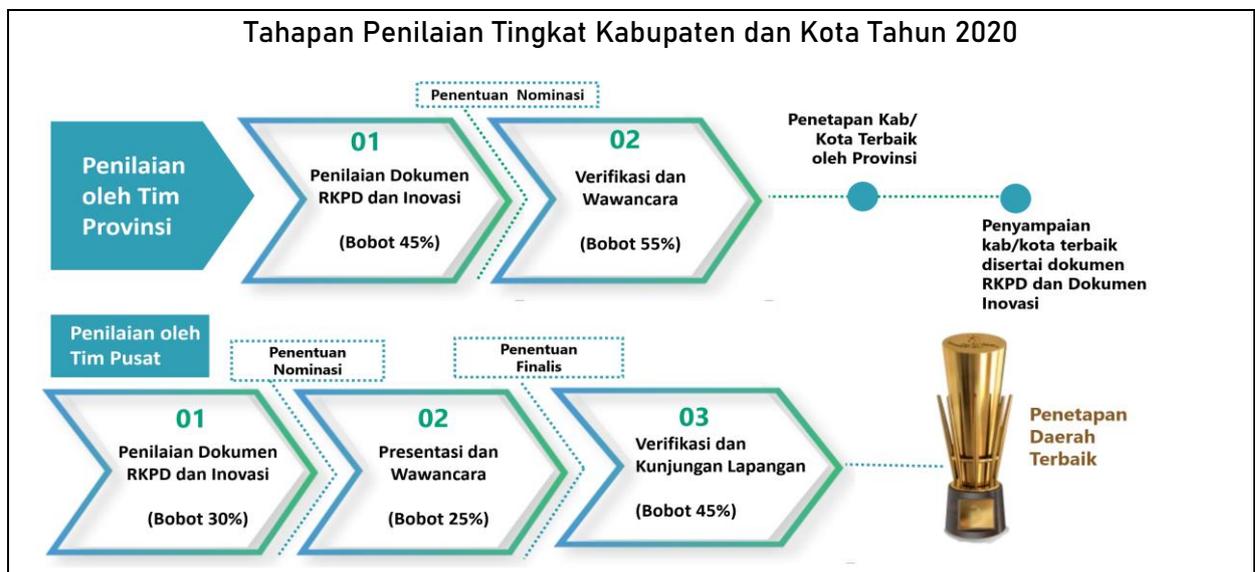
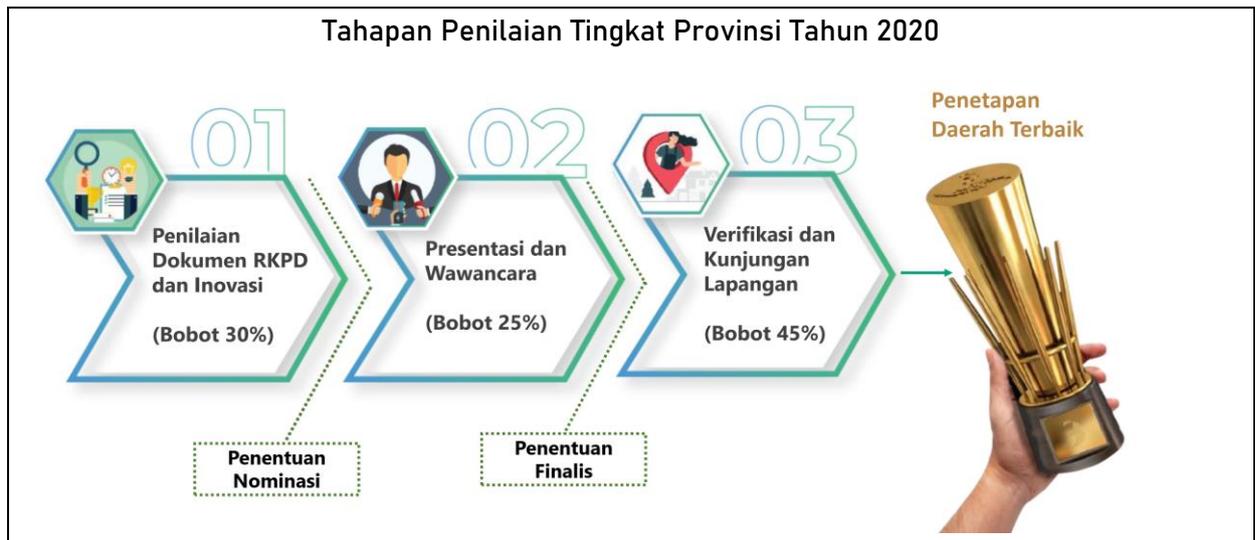
Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bertujuan untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; dan (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; serta (4) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada 3 provinsi terbaik, 3 kabupaten terbaik, dan 3 kota terbaik dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen RKPD, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD), (3) Pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Inovasi pembangunan yang dikembangkan. Tim penilai yang terlibat dalam PPD ini meliputi Tim Penilai Teknis (TPT), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Independen (TPI).

Dalam pelaksanaan PPD Tahun 2020, perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan antara lain: (1) Memperkuat basis penilaian, (2) Meningkatkan fairness, (3) Memperkuat aturan main, dan (4) Pengembangan lingkup pelaksanaan PPD. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung perbaikan PPD Tahun 2020 adalah sosialisasi PPD kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; penyamaan tahapan penilaian untuk provinsi,

kabupaten dan kota, pelaksanaan pembinaan bagi aparatur pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi PPD, serta penyusunan buku praktik-praktik cerdas pembangunan daerah. Adapun tahapan penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam PPD 2020 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.17. Tahapan Penilaian PPD Tahun 2020



Sumber: Kedeputan PEPP, 2020

Perbedaan tahapan penilaian provinsi dan kab/kota yaitu pada tahapan penilaian kab/kota, terlebih dilakukan penilaian oleh tim provinsi, kemudian tim provinsi akan menetapkan 1 kota dan 1 kabupaten terbaik untuk dinilai oleh Tim Pusat. Jumlah total dokumen RKPD yang dinilai oleh pusat adalah 34 dokumen RKPD Provinsi, 34 dokumen RKPD Kabupaten, dan 34 dokumen RKPD Kota.



Sehubungan dengan pandemi covid-19, tahapan presentasi dan wawancara dilaksanakan secara daring dan tahapan verifikasi dan kunjungan lapangan ditiadakan. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pada bobot penilaian pada masing-masing tahapan.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun modul penilaian pada setiap tahapan penilaian, dan modul tersebut menjadi acuan bagi tim penilai untuk memberikan angka penilaian yang sesuai. Hasil penilaian oleh masing-masing tim penilai, diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat PEPPD untuk diolah. Setelah semua tahapan penilaian terlaksana, hasil penilaian seluruh tahapan dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh tim penilai. Rapat dilaksanakan bertujuan untuk mendiskusikan hasil dan meyeepakati penentuan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik. Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapatkan persetujuan penetapan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Daerah yang mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi:**

- Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah
- Terbaik II : Provinsi Bengkulu
- Terbaik III : Provinsi Jawa Timur

**Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten:**

- Terbaik I : Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
- Terbaik II : Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
- Terbaik III : Kabupaten Bangka, Bangka Belitung

**Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota:**

- Terbaik I : Kota Semarang, Jawa Tengah
- Terbaik II : Kota Yogyakarta, DIY
- Terbaik III : Kota Padang, Sumatera Barat

### 3.3.10. Dukungan Capaian Rencana Aksi Nasional (RAN)

Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menerima mandat dari Presiden RI untuk terlibat dalam mendukung tercapaian Rencana Aksi Nasional (RAN) yang terdiri dari: a) RAN Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK); dan b) RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Berikut uraian singkat capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas terkait hal tersebut.

#### A. RAN Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) untuk melakukan monitoring dan pendampingan aksi pencegahan korupsi terhadap 87 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah.

Bappenas menjadi penanggung jawab 3 sub-aksi pencegahan korupsi yang berada di bawah pendampingan dan monitoring Stranas PK. Dari hasil monitoring, realisasi pelaksanaan aksi oleh Bappenas sampai Triwulan VIII (B24) mencapai 56,25% (Cukup) Namun demikian, capaian Bappenas secara agregat sudah mencapai 92,16% (Baik) karena ada pemenuhan target tertanggung sebesar 35,91%.

Berikut adalah intisari capaian 3 sub aksi tersebut (dengan mempertimbangkan kepatuhan waktu pelaporan)

Sub-Aksi dan Nilai Kepatuhan	Capaian dan Kendala
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis elektronik <b>47,32% (Cukup)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meskipun target roadmap dan draf pedoman pelaksanaan <i>trilateral meeting</i> sudah tercapai, namun masih banyak target Bappenas dalam sub-aksi ini belum terlaksana dengan baik. Masih ada 6 target yang seharusnya dilaksanakan pada periode-periode sebelumnya (B06-B18) namun sampai saat ini (B24) masih belum dapat dipenuhi.</li> <li>■ Beberapa target tidak terlaksana karena sangat bergantung pada target di K/L lain. Misalnya, <i>Compliance Aplikasi Umum Perencanaan dan Penganggaran</i> tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu selesainya asesmen sistem terkini di pusat dan di daerah oleh BPPT dan Kemenkominfo.</li> <li>■ Sementara terkait target <i>Kesepakatan Proses Bisnis Integrasi</i>, juga akan sulit tercapai karena sangat bergantung kepada kerja-sama tiga pihak yaitu Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu. Sampai saat ini, baru terdapat proses bisnis tingkat pusat dan proses bisnis tingkat daerah, sedangkan proses bisnis yg mengintegrasikan antara pusat-daerah masih menjadi tantangan dalam penyelesaiannya.</li> </ul>
Percepatan SPBE <b>99,9% (Baik)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sampai periode B24 ini, pelaksanaan target Bappenas sudah tercapai seluruhnya, yakni Tersedianya <b>Referensi</b> Arsitektur dan Domain Arsitektur Data dan Informasi SPBE Nasional.</li> <li>■ Referensi Arsitektur merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Sementara Domain Arsitektur merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional yang mendeskripsikan substansinya</li> <li>■ Target terakhir yang dipenuhi Bappenas di periode B24 adalah terbitnya Permen PPN Pedoman Manajemen Data SPBE.</li> </ul>

Sub-Aksi dan Nilai Kepatuhan	Capaian dan Kendala
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit <b>87,50% (Baik)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sejak periode B18 lalu, Stranas PK ikut melakukan monitoring terhadap pelaksanaan sistem merit di Bappenas. Dari 5 target yang harus dilaksanakan, seluruhnya berhasil dipenuhi Bappenas, yaitu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan progres implementasi sistem merit melalui SiPinter berdasarkan 8 aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN.</li> <li>- Melakukan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui <a href="https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/">https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/</a></li> <li>- Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian Bappenas dengan data Kepegawaian Nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri.</li> <li>- Mengidentifikasi perbedaan dan permasalahan antara data Simpeg Instansi dengan data BKN.</li> <li>- Melaksanakan Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 minimal 50% dari jumlah PNS dari masing-masing instansi.</li> </ul> </li> <li>■ Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi sistem merit oleh Bappenas berjalan sangat baik.</li> </ul>

Sumber: Laporan Triwulan VIII Stranas PK, 2021

Untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan, Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Sekterariat Nasional Stranas PK guna peningkatan tercapainya target.

## B. RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

Presiden Joko Widodo, pada tanggal 28 Februari 2020, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Seperti telah diketahui bersama, narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) berpotensi merusak moral dan masa depan bangsa, khususnya generasi muda. Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Dengan keluarnya Inpres No. 2 Tahun 2020, pemerintah ingin merangkul seluruh elemen, baik lembaga pemerintahan pusat dan daerah maupun masyarakat dan pelaku usaha, untuk bersama-sama menyusun dan melaksanakan RAN P4GN periode 2020-2024.

Terkait pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas menjadi salah satu lembaga regulator yang berperan mengoordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN 2020-2024. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas juga menjadi lembaga pelaksana yang wajib menyusun dan melaksanakan program-program untuk mendukung RAN

P4GN 2020–2024. Program-program tersebut disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap unit kerjanya.

Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi amanat Inpres RAN P4GN, diantaranya:

- (1) telah disusun dokumen perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh;
- (2) sosialisasi pada berbagai kegiatan baik internal maupun eksternal serta melalui media cetak dan media sosial;
- (3) deteksi dini penggunaan narkoba melalui tes urin kepada seluruh pegawai;
- (4) penambahan persyaratan Surat Keterangan Bebas Narkoba untuk calon pendaftar diklat; dan
- (5) memasukkan materi sosialisasi antinarkoba dalam setiap pembukaan diklat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan, Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna peningkatan tercapainya target Inpres Stranas PK.

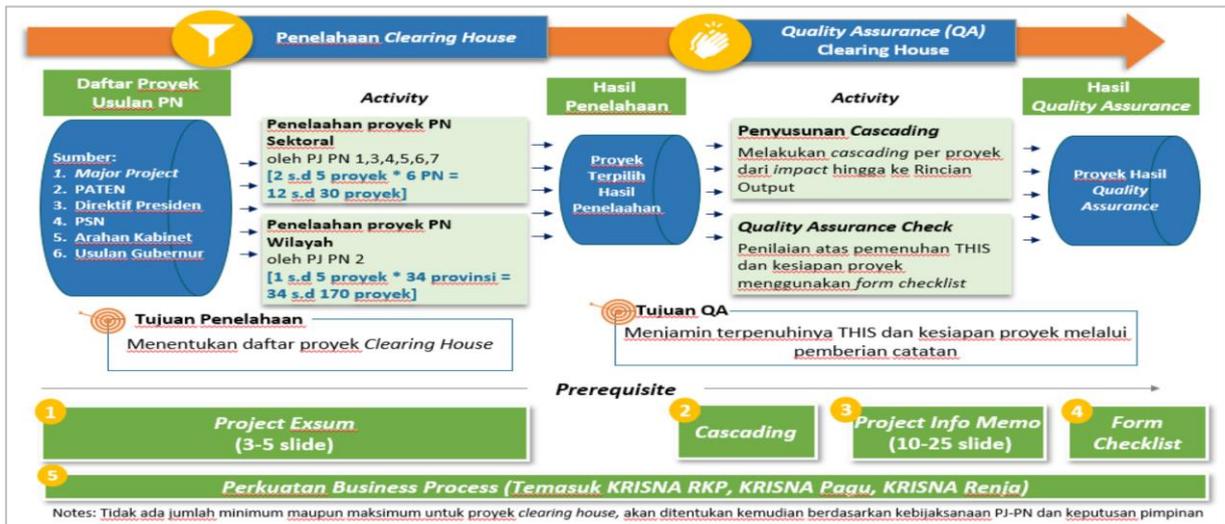
### 3.3.11. Perkuatan *Clearing House* Pembangunan dalam RKP 2022

Pada pidato pelantikan Presiden 17 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa birokrasi harus dapat menjamin agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat (*making program delivered*). Presiden mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar dapat menjadi *clearing house* untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan hingga level proyek benar-benar dapat dilaksanakan dan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan *clearing house* adalah:

- 1) Menghasilkan daftar proyek sebagai masukan proses *clearing house* yang jumlahnya terbatas sehingga dapat difokuskan untuk penajaman substansi.
- 2) Meningkatkan kualitas rencana proyek melalui pengecekan terhadap substansi dari aspek-aspek dalam rencana tersebut.

Penerapan *clearing house* dalam proses penyusunan RKP 2022 secara umum dibagi dalam 2 tahapan, yaitu tahapan penelaahan dan *Quality Assurance*. Melalui dua tahapan tersebut akan dihasilkan proyek prioritas yang akan masuk dalam dokumen RKP dan kesiapan dari proyek itu sendiri yang akan dituangkan dalam *Executive Summary* dan *Info Memo*.

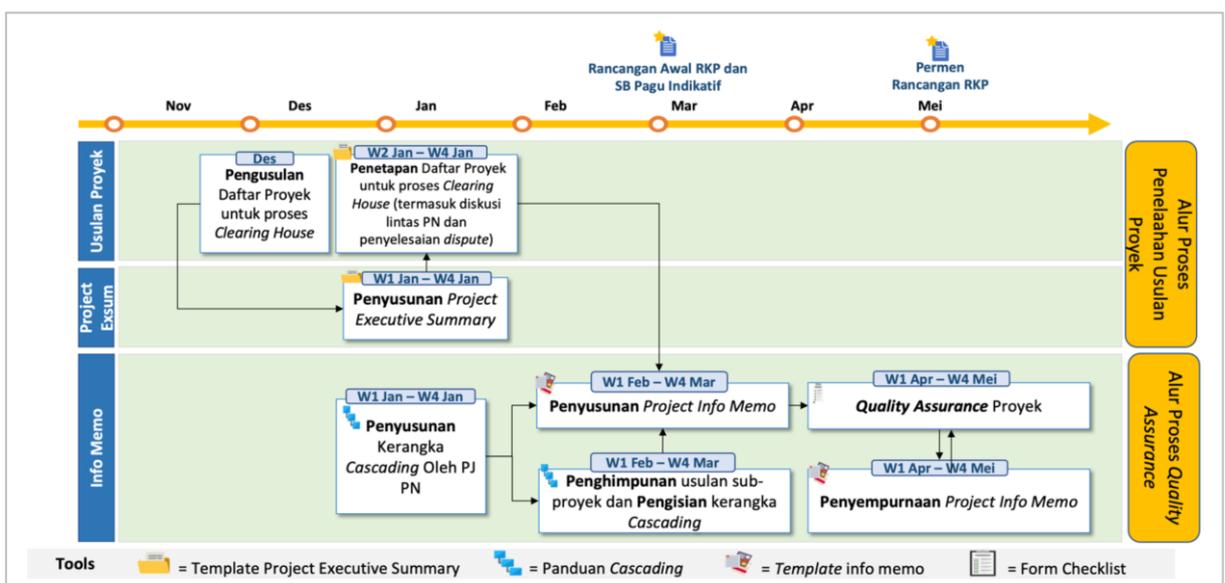
Gambar 3.18. Skema Penerapan Clearing House Proyek



Sumber: Kedeputan PEPP, 2020

Penerapan Clearing House Proyek dimulai dari Desember tahun 2020 dan berakhir pada Mei tahun 2021. Penerapan Clearing House Proyek merupakan proses internal yang berjalan di Kementerian PPN/Bappenas dalam masa penyusunan RKP Tahun 2022. Proses clearing house diawali dengan penelaahan usulan proyek sampai dengan penetapan daftar proyek untuk selanjutnya daftar proyek terpilih akan dilakukan peningkatan kualitas proyek melalui proses quality assurance sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.19. Alur Penerapan Proses Clearing House Proyek Pada RKP Tahun 2022



Sumber: Kedeputan PEPP, 2020

Pada penyusunan RKP Tahun 2022 Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melakukan penguatan, sehingga RKP dapat lebih operasional dan menjadi acuan bagi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaannya.

Penyusunan dokumen RKP merupakan proses iteratif yang terus mengalami penguatan guna menjawab tantangan dinamika pembangunan dan menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, penyusunan RKP Tahun 2022 mengalami penguatan melalui penyempurnaan terhadap tahapan reguler melalui penambahan fitur baru, seperti: (1) Memperkuat tahapan RKP dengan melakukan sinkronisasi program lintas sektor dan arah pengembangan wilayah, serta menambahkan kegiatan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator, dan Multilateral Meeting PN; (2) Mewujudkan pendanaan komprehensif; (3) Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja (KRISNA); dan (4) Memasukkan proses clearing house dalam proses penyusunan RKP, serta (5) Memasukkan suplemen BUMN dalam dokumen RKP.

Gambar 3.20. Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022



Sumber: Kedeputan PEPPS

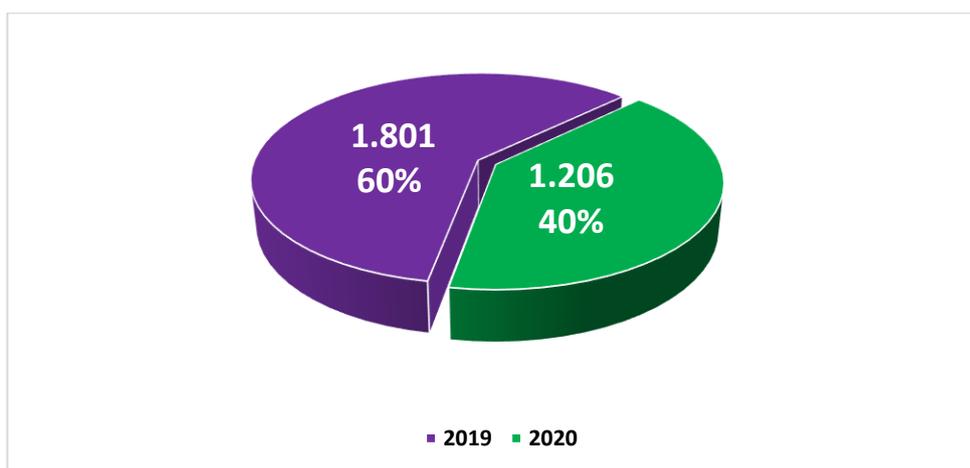
Upaya tersebut juga ditujukan untuk memperkuat implementasi dari money follow program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS). Sehingga dapat menjamin delivery manfaat berbagai proyek pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian Perkuatan Clearing House Pembangunan dalam RKP 2022 ini akan berdampak penguatan keselarasan muatan RKP 2022 hingga RKA K/L 2022.

### 3.4. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

#### 3.4.1. Pagu Anggaran

Pada Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.206.521.004.000,-. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran terkait penanggulangan wabah Covid19.

Gambar 3.21. Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 5,78%. Realisasi anggaran tahun 2019 (86,25%) lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (92,12%) dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.22. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020**



Secara rinci perbandingan realisasi per program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.27 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020**

NO	PROGRAM	PAGU		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	943.887.160.000	637.185.373.000	835.029.390.000 (88,47%)	602.734.246.079 (94,56%)
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	879.122.480.000	562.659.605.000	736.098.800.000 (83,73%)	502.064.200.862 (83,96%)
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.950.000.000	6.676.026.000	10.602.640.000 (96,83%)	6.598.177.690 (98,83%)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.833.959.640.000</b>	<b>1.206.521.004.000</b>	<b>1.581.730.830.000 (86,25%)</b>	<b>1.111.396.624.631 (92,12%)</b>



Dari beberapa gambar dan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas ke depan harus terus ditingkatkan. Capaian tersebut sangat berpengaruh besar terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sehingga realisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pejanjian kinerja dan alokasi anggaran lebih tepat dan terukur pada tahun berikutnya lebih baik.

#### 3.4.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

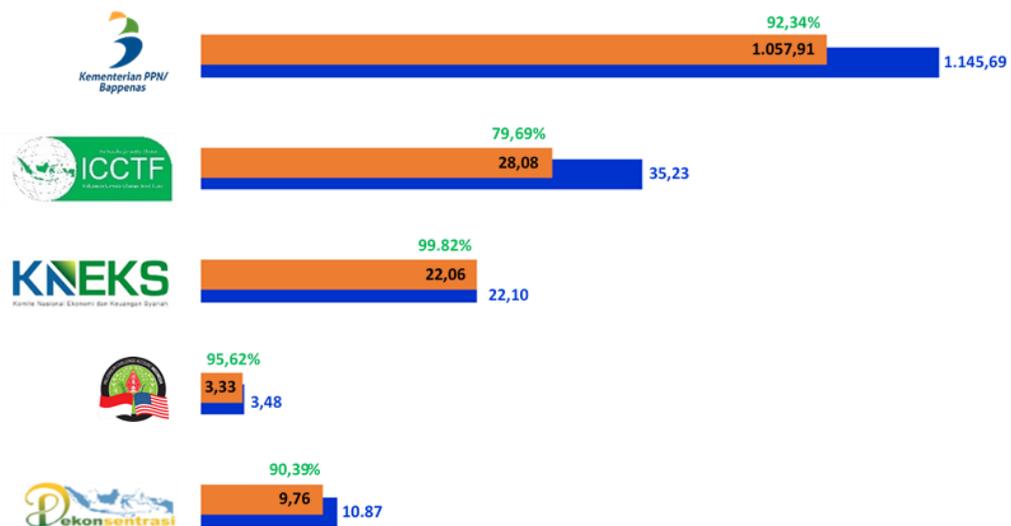
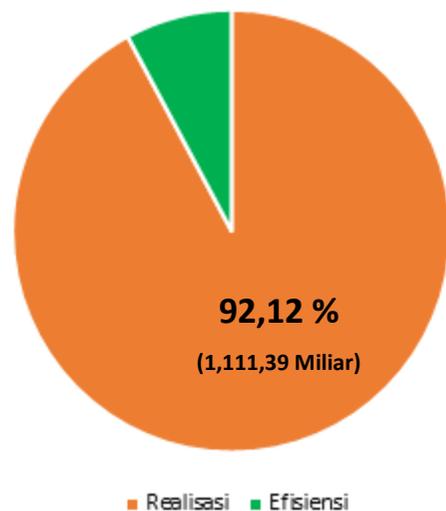
Pada Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.206.521.004.000,- yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 998.035.305.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 147.818.412.000,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 60.667.287.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.111.396.624.631,- (92,12%), yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.357.560.770.000,- (85,92%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 147.818.412.000,-, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 60.667.287.000,-. Anggaran tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program menurut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.28. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU				REALISASI			
		RM	PLN	HLN	JUMLAH	RM	PLN	HLN	JUMLAH
1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	428.699.674.000	147.818.412.000	60.667.287.000	637.185.373.000	421.996.107.185 (98,39%)	136.704.503.981 (92,48%)	44.033.634.913 (72,58%)	602.734.246.079 (99,31%)
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	562.659.605.000	-	-	562.659.605.000	502.064.200.862 (89,26%)			502.064.200.862 (89,26%)
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	6.676.026.000	-	-	6.676.026.000	6.598.177.690 (98,83%)			6.598.177.690 (98,83%)
<b>JUMLAH</b>		<b>998.035.305.000</b>	<b>147.818.412.000</b>	<b>60.667.287.000</b>	<b>1.206.521.004.000</b>	<b>930.658.485.737 (93,25%)</b>	<b>136.704.503.981 (92,48%)</b>	<b>44.033.634.913 (72,58%)</b>	<b>1.111.396.624.631 (92,12%)</b>



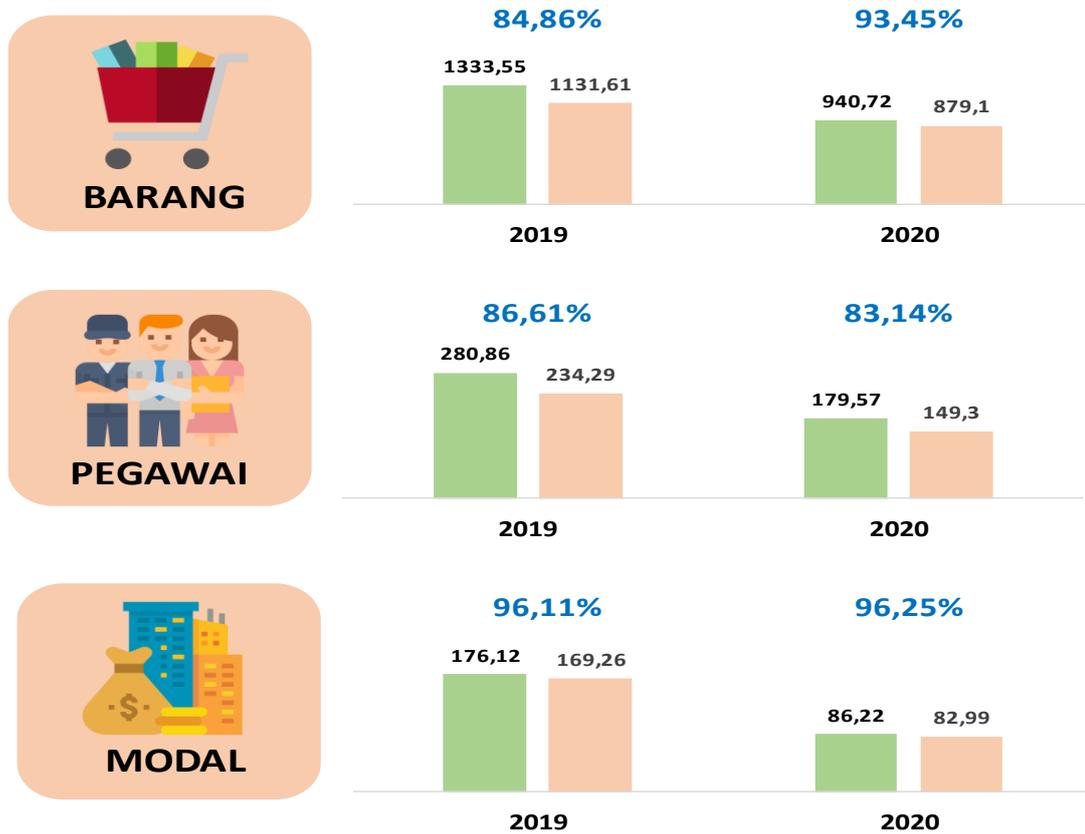
Dalam miliar rupiah

PAGU

REALISASI

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan per Jenis Belanja, dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.23. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019 dan 2020**

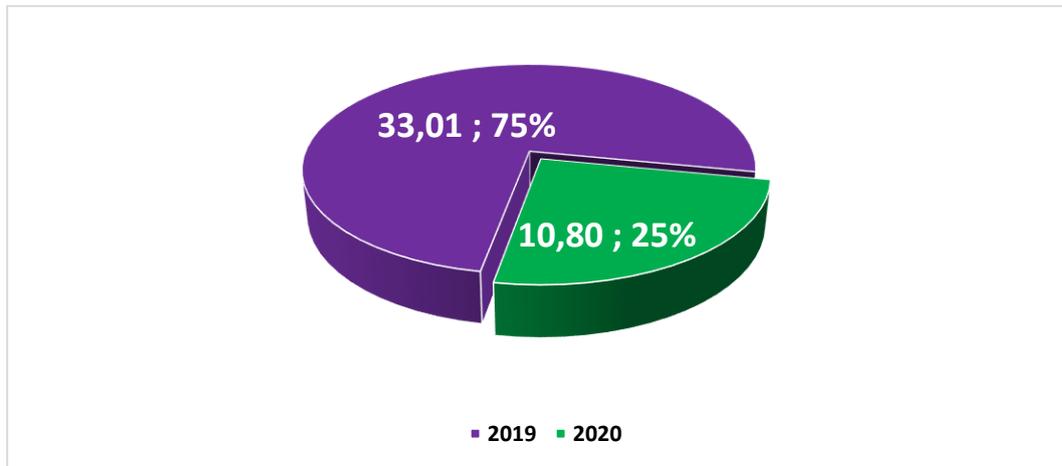


Jika dilihat dari jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2020 terbesar adalah belanja modal yaitu sebesar 96,25%, sedangkan realisasi terkecil adalah belanja pegawai (83,14%). Rendahnya belanja pegawai dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tidak memberikan gaji dan tunjangan bagi Eselon I, II PAU.

### SATKER DEKONSENTRASI

Pada Tahun 2020 Satker Dekonsentrasi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.807.270.000,-. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran terkait penanggulangan wabah Covid19.

Gambar 3.24. Perbandingan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020



Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 5,78%. Realisasi anggaran tahun 2019 (86,25%) lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (92.12%) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 29. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 – 2020

SATKER	PAGU		REALISASI	
	2019	2020	2019	2020
Dekonsentrasi	33.014.685.000	10.807.270.000	29.289.926.030 (88,72%)	9.768.500.685 (90,39%)

#### Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satker Dekonsentrasi Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Satker Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.807.270.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.768.500.685,- (90,39%). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program menurut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.30. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	%
1	Jawa Tengah	572.216.000	569.317.100	99,49
2	DIY	271.924.000	232.380.450	85,46
3	Jawa Timur	235.822.000	72.201.400	30,62
4	Aceh	261.320.000	117.767.050	45,07
5	Sumatera Utara	103.704.000	103.588.600	99,89
6	Sumatera Barat	385.727.000	380.599.780	98,67
7	Riau	290.934.000	286.753.222	98,56
8	Jambi	239.700.000	235.443.596	98,22
9	Sumatera Selatan	383.051.000	371.855.065	97,08
10	Lampung	555.717.000	555.431.189	99,95
11	Kalimantan Barat	278.522.000	272.552.184	97,86
12	Kalimantan Tengah	248.740.000	190.198.929	76,46
13	Kalimantan Selatan	355.794.000	319.240.000	89,73
14	Kalimantan Timur	383.103.000	376.035.500	98,16
15	Sulawesi Utara	600.776.000	583.869.615	97,19
16	Sulawesi Tengah	292.896.000	292.220.800	99,77
17	Sulawesi Selatan	106.088.000	104.833.650	98,82
18	Sulawesi Tenggara	261.903.000	247.838.881	94,63
19	Maluku	683.884.000	652.271.641	95,38
20	Bali	395.145.000	392.110.595	99,23
21	NTB	425.577.000	363.642.066	85,45
22	NTT	328.320.000	318.263.400	96,94
23	Bengkulu	466.219.000	463.237.700	99,36
24	Maluku Utara	361.123.000	271.197.200	75,10
25	Banten	226.395.000	196.321.400	86,72
26	Bangka Belitung	249.113.000	248.995.647	99,95
27	Gorontalo	604.624.000	601.930.416	99,55
28	Kepulauan Riau	243.999.000	226.652.708	92,89
29	Papua Barat	260.448.000	-	-
30	Sulawesi Barat	277.340.000	270.959.155	97,70
31	Kalimantan Utara	457.146.000	450.791.746	98,61
<b>JUMLAH</b>		<b>10.807.270.000</b>	<b>9.768.500.685</b>	<b>90,39</b>

Sumber: data aplikasi OM-SPAN, 2020

### 3.4.3. Analisis Efisiensi Capaian Realisasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

**Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran**

- Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu ( $\geq 1$ ), maka terjadi efisiensi.
- Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu ( $< 1$ ), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.31. Analisis Efisiensi Capaian Realisasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja**

IKU Renstra 2020-2024	Kinerja Tahun 2020			Program	Anggaran Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	75	93,55	100%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	637.185.373. 000	602.734.246. 079	99,31%
Indikator 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	99,19%	100%				
Indikator 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80-83,9%	100%	100%				
Indikator 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%	100%				
Indikator 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%	100%				
Indikator 6:	83,00	85,01	100%				

IKU Renstra 2020-2024	Kinerja Tahun 2020			Program	Anggaran Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</li> <li>▪ Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur</li> </ul>	562.659.605.000	502.064.200.862	98,83%
Indikator 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> ) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	91,17	100%		6.676.026.000	6.598.177.690	
Indikator 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88,89%	100%				
<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>100%</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran</b>		<b>92,12%</b>	
<b>Tingkat Efisiensi = 1,09</b>							

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian realiasi anggaran sebesar 1,09. Artinya **Efisiensi  $\geq 1$** , maka artinya bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah terjadi efisiensi. Dalam hal ini penggunaan anggaran Pagu DIPA terealisasi sebesar 92,12% untuk tercapainya (100%) kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020.





## PENUTUP

### 4.1. SIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah melaporkan dan mengukur capaian kinerjanya berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan telah menyajikan informasi mengenai restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada akhir tahun 2020. Sementara itu, IKU yang digunakan masih mengacu pada IKU Perjanjian Kinerja yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 tetapi dielaborasi dalam perhitungan capaian indikator menggunakan metode *bridging* ke IKU dalam Renstra 2020-2024.

Secara umum, **capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik tercapai 100% sesuai target kinerja** dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut:

#### A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

1. **Capaian IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, tercapai 93,55 dari target 75** atau bisa dikatakan **berhasil 100%** dengan rincian:
  - i. Capaian indikator **“Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat”** dengan nilai sebesar **39,94** dari **40**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan sasaran, indikator dan target dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, Renstra K/L 2020-2024, RKP 2021, dan Renja K/L 2021.
  - ii. Capaian indikator **“Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat”** dengan nilai sebesar **39,72** dari **40**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan sasaran, indikator dan target Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP 2021 terhadap sasaran kegiatan dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) – Rincian Output (RO) RKA K/L 2021.
  - iii. Capaian indikator **“Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah”** sebesar **13,90** dari **20**, dicapai melalui pemetaan dan pengukuran keselarasan muatan RPJMD Provinsi dengan muatan RPJMN Tahun 2020-2024 dan muatan RKPD Provinsi Tahun 2021 dengan RKP Tahun 2021.
2. **Capaian IKU 2: Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi tercapai 99,19% dari target 85%** atau dapat dikatakan **berhasil 100%**, dicapai melalui pengukuran jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren).

- B. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional**
- 1. Capaian IKU 3: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional telah tercapai sebesar 100% dari target 84% atau dapat dikatakan berhasil 100%, yang diukur melalui: (a) pengukuran kinerja pengendalian pembangunan pusat; dan (b) pengukuran kinerja pengendalian pembangunan daerah.**
- C. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner**
- 1. Capaian IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi sebesar 100% dari target 85-87,9% atau dapat dikatakan berhasil 100%, dicapai melalui pemetaan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional.**
  - 2. Capaian IKU 5: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L telah terealisasi 100% dari 75-79,9% atau dapat dikatakan berhasil 100%, dicapai melalui pemetaan rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.**
- D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**
- 1. Capaian IKU 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai nilai 85,01 dari target 83 atau dapat dikatakan berhasil 100%, dicapai melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB dan juga penilaian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini merupakan kerja keras dan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi.**
  - 2. Capaian IKU 7: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional telah tercapai nilai 91,17 dari target 85,00 atau dapat dikatakan berhasil 100%, dicapai melalui hasil kuesioner kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian PPN/Bappenas.**
  - 3. Capaian IKU 8: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah terealisasi 88,89% dari target 85% atau dapat dikatakan berhasil 100%, dicapai melalui upaya integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas.**

## 4.2. TINDAK LANJUT

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dan kerjasama berkelanjutan antar sektor guna mempercepat pembangunan prioritas nasional di pusat maupun daerah, salah satunya melalui peningkatan kegiatan bersama lintas sektor dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan *Major Project* dan pencapaian proyek prioritas dalam RKP.
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi lintas sektor atas pelaksanaan PN-PP-KP-ProP dan *Major Project* sehingga sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP dapat tercapai.
3. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah.
4. Meningkatkan tata kelola ASN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya melalui pemutakhiran data seluruh pegawai PNS maupun PPNNP, pengembangan pola karir PNS, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan PPNNP.
5. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan *Integrated Digital Workspace (IDW)* dan *Smart Office (SO)* masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.



**LAMPIRAN**





**LAMPIRAN**  
Perjanjian Kerja 2020





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa

Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2020

Menteri PPN/Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
		2. Rancangan Perpres RKP 2021	1 dokumen
		3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
2.	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Program	Anggaran
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp948.439.846.000,00
2. Program Pendukung:	
1) Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas	Rp870.250.000.000,00
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp10.000.000.000,00

Jakarta,      Januari 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Bappenas



Suharso Monoarfa



**LAMPIRAN**  
Rencana Kerja Tahunan 2020





## Rencana Kerja Tahun 2020

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 serta memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sudah ditetapkan.

Berikut perencanaan kegiatan selama tahun 2020:

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>A. PERENCANAAN</b>					
<b>Sasaran Strategis:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)</li> <li>- Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN 2020-2024 dengan RPJPN 2005-2025</li> <li>- Rancangan Perpres RKP 2021</li> </ul>					
1	Kajian	√	√	√	√
2	Koordinasi penyusunan draft RKP 2021	√	√	√	√
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan (penjamaan TOR, penyusunan jadwal rapat sesuai siklus perencanaan, pengumpulan materi/bahan RKP, analisis rekomendasi hasil monev dan usulan pemangku kepentingan, dan penyusunan kerangka laporan)</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi pertama dengan mitra K/L untuk menyiapkan materi RKP</li> </ul>	√	√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rancangan awal RKP berdasarkan RPJMN 2020-2024, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2021, rancangan tema dan prioritas RKP, rekomendasi hasil monev, usulan K/L, usulan pemangku kepentingan, dan bahan-bahan lain yang terkait.</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan usulan untuk rancangan pagu indikatif RKP, berdasarkan rancangan awal RKP</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Rakorbangpus I</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut Rakorbangpus I</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan rancangan awal RKP, termasuk alokasi anggaran, berdasarkan Surat Bersama Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif, untuk digunakan dalam pembahasan <i>Trilateral Meeting</i> RKP</li> </ul>	√			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan Pemda dalam penyelenggaraan Musrenbang Provinsi</li> </ul>	√	√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan forum konsultasi publik</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Rakorbangpus II</li> </ul>		√		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pra-Musrenbangnas</li> </ul>		√		

	• Penyelenggaraan Musrenbangnas		√		
	• <i>Trilateral Meeting</i> RKP		√		
	• Perbaikan draft RKP berdasarkan Musrenbangnas dan <i>trilateral meeting</i>		√		
	• Penetapan RKP		√		
	• Rapat Pembahasan RKP dengan Panja DPR RI		√		
<b>Sasaran Strategis:</b>					
Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP					
1	Kegiatan Koordinasi	√	√	√	√
2	Pendampingan K/L dalam penyusunan rancangan Renja K/L	√			
3	Musrenbangnas	√			
4	<i>Trilateral Meeting</i> , yang juga mencakup pembahasan rancangan Renja K/L	√	√		
5	Pendampingan K/L dalam perbaikan Renja K/L 2020 berdasarkan hasil <i>trilateral meeting</i> dan Musrenbangnas untuk menjadi dasar penyusunan RKA-K/L		√		
6	Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra		√		
7	Evaluasi kesesuaian Renja K/L dengan RKP		√		
8	Rancangan Perpres RKP Tahun 2020		√		
9	Pemutakhiran RKP Tahun 2020				√
<b>B. PENGANGGARAN</b>					
<b>Sasaran Strategis:</b>					
Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP					
1	Kegiatan Koordinasi	√	√	√	√
2	Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra		√		
3	Pendampingan K/L dalam penyusunan RKA-K/L berdasarkan RKP		√	√	√
4	Penyusunan RKA-K/L oleh K/L mitra:		√	√	√
	• Pagu Anggaran (RKA-K/L)		√		
	• Penelaahan RKA-K/L I oleh K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan			√	
	• RAPBN dan Nota Keuangan			√	
	• Konsultasi dengan DPR			√	
	• Penetapan APBN				√
	• Alokasi anggaran K/L (Revisi RKA-K/L)				√
	• Penelaahan RKA-K/L II oleh K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan				√
	• DIPA K/L				√
5	Evaluasi kesesuaian RKA-K/L dengan RKP				√

<b>C. PENGENDALIAN</b>					
<b>Sasaran Strategis:</b>					
Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L					
1	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan				
	• Kegiatan Pemantauan/Evaluasi:	√	√	√	√
	• Rapat koordinasi pemantauan program dan kegiatan terkait sasaran prioritas nasional	√			
	• Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran prioritas nasional tahun		√	√	√
	• Analisis hasil pemantauan		√	√	√
	• Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemantauan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan oleh K/L	√	√	√	√
	• Penyusunan Lampiran Pidato Presiden		√	√	
	• Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan untuk menjadi bahan perencanaan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya			√	√
<b>D. ENABLER</b>					
<b>Sasaran Strategis:</b>					
Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L					
1	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	√	√	√	√
<b>E. MANAJEMEN TATA KELOLA</b>					
<b>Sasaran Strategis:</b>					
Meningkatkan kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM					
1	Penyelenggaraan SPIP				
	• Pembentukan Satgas SPIP 2020	√			
	• Penyusunan Rencana SPIP TA 2020	√			
	• Identifikasi risiko kegiatan utama		√		
	• Menyusun Rencana Tindak Lanjut		√		
	• Koordinasi SPIP	√	√	√	√
	• Melakukan Monitoring dan Evaluasi SPIP		√		√
	• Penyusunan Laporan SPIP		√		√
2	Pelaksanaan RB				
	• Pembentukan Tim RB TA 2020	√			
	• Penyusunan Rencana Kerja RB TA 2020	√			
	• Identifikasi capaian RB di delapan area perubahan serta pengumpulan data dukungannya		√		
	• Melaksanakan Penilaian Mandiri RB			√	
	• Koordinasi, sosialisasi, dan internalisasi RB	√	√	√	√
	• Melakukan Monitoring dan Evaluasi RB		√		√
	• Penyusunan Laporan RB				√

3	Pelaksanaan <i>Flexywork/Inregrated Digital Workspace</i> (IDW)				
	• Pembentukan Tim Implementasi IDW	√			
	• Sosialisasi dan uji coba	√			
	• Cascading dan integrasi IKU ke dalam bitrix		√	√	
	• Koordinasi IDW	√	√	√	√
	• Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi IDW		√		√
	• Bimbingan Teknis Implementasi IDW			√	√



**LAMPIRAN**  
Rencana Kerja 2020 dan 2021



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
TAHUN 2020**

**Nama Kementerian :** BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

**Program :** 055.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

**Sasaran Program :** 01-Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

**Sasaran Strategis :** 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

**Output Program :** 01-Layanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI			
2911-Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	01-Tersusunnya Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	112-Tanpa Sub Output	112-Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	19.303.709			
				115-Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-			
		959-Layanan Protokoler	112-Tanpa Sub Output	113-Ketatausahaan dan persidangan pimpinan	4.326.081			
				114-Protokoler lembaga	9.370.210			
2912-Pembinaan dan Pelayanan Hukum	01-Tersusunnya Pembinaan dan Pelayanan Hukum	957-Layanan Hukum	091-Produk Hukum	091-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.200			
				092-Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi	1.200.000			
			092-Bantuan Hukum	092-Peningkatan Profesionalitas Pemberian Konsultasi dan Pendampingan Hukum	1.375.200			
2913-Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	01-Tersusunnya Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	952-Layanan Perencanaan	110-Tanpa Sub Output	110-Pelayanan Penyusunan Program dan Anggaran	648.000			
				953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	110-Tanpa Sub Output	111-Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan	1.250.000	
						107-Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana	108-Koordinasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	-
							109-Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tata Laksana	-
				964-Layanan Kerjasama Internasional	110-Tanpa Sub Output	106-Pengembangan Kerjasama	1.100.000	
2914-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	01-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	001-Tanpa Sub Output	093-Koordinasi Pengelolaan SDM	2.990.000			
				094-Koordinasi Pengembangan SDM	10.800.000			
				095-Koordinasi Kinerja Pegawai	1.850.000			
				096-Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	1.360.000			

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2915-Pelayanan Umum dan Keuangan	01-Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Keuangan	955-Layanan Manajemen Keuangan	001-Tanpa Sub Output	102-Penerapan SAI	739.755
				103-Pelayanan Administrasi Satker	18.689.052
				104-Pelayanan Pengujian Pembayaran	3.502.565
		956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	001-Tanpa Sub Output	098-Pengelolaan BMN	2.149.584
				099-Pencatatan BMN	1.924.923
		962-Layanan Umum	001-Tanpa Sub Output	100-Pelayanan Dukungan Umum dan Perkantoran	15.111.967
				101-Pelayanan Perencanaan Fasilitas Umum Perkantoran dan Pengadaan	30.770.001
		994-Layanan Perkantoran	001-Tanpa Sub Output	001-Gaji dan Tunjangan	180.164.552
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	162.398.725				
2916-Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	01-Tersusunnya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	963-Layanan Data dan Informasi	001-Tanpa Sub Output	116-Dukungan Penyusunan Dokumen Perencanaan	700.000
				117-Pengelolaan Data dan TI	13.540.000
				119-Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	2.300.000
				120-pengembangan kapasitas TI	23.460.000
				121-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	20.000.000
2918-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	01-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	001-Tanpa Sub Output	051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	86.150.476
2946-Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	01-Tersusunnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Tanpa Sub Output	051-Pengadaan kendaraan bermotor	1.306.998
				053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	97.312.002
				054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	151.381.000

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
TAHUN 2020**

**Nama Kementerian :** BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

**Program :** 055.01.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

**Sasaran Program :** 01-Terjaganya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

**Sasaran Strategis :** 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

**Output Program :** 01-Layanan Pengawasan Internal kementerian PPN/Bappenas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2920-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	01-Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Administrasi Umum	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	850.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	400.000
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	1.050.000
			003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	4.450.000
2921-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	01-Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Kinerja Kelembagaan	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	1.380.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	150.000
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	275.000
			003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	1.445.000



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
TAHUN 2020**

**Nama Kementerian :** BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

**Program :** 055.01.06-Program Perencanaan Pembangunan Nasional

**Sasaran Program :** 01-Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

**Sasaran Strategis :** 01-Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.

**Output Program :** 01-Perencanaan Pembangunan Nasional

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2922-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Percepatan Penerapan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama Tahun 2020a	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP Bidang Pendidikan dan Agama Tahun 2020	1.250.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan K/L dan RPJMD Bidang Pendidikan dan Agama	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan		610-Pemantauan Terpadu Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Agama	750.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Agama	750.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan		640-Pengendalian Strategis Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan	750.000
				641-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Dan Agama Berbasis Bantuan Pinjaman Dan Hibah	750.000
2923-Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2020 untuk	4.572.898
				511-Koordinasi Penyusunan Kebijakan Alokasi Pada Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	357.992
		602-Sistem Regulasi Perencanaan	056-Tanpa Sub Output		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek		570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2020	2.085.452
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-KOORDINASI Penyusunan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (PERPRES RKP) Tahun 2021	2.746.212
				571-Kajian penajaman major project rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)	648.440
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan		610-Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Evaluasi Lingkup Pendanaan Pembangunan Tahun 2020	905.882
		608-Kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan		640-Pengembangan dan pemutakhiran database dalam rangka penyusunan pagu indikatif tahun 2021	483.124
610-Rancangan Perpres RKP			-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2925-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Skenario Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Aspek Aparatur Negara (ASN)	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP lingkup Aparatur Negara	702.500
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Finalisasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur	100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Prioritas Pembangunan Aparatur Negara Tahun 2020	725.000
				611-Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Aparatur Negara tahun 2019	500.000
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Koordinasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (OGI)	1.000.000		
2926-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	052-Tanpa Sub Output	510-Kajian Integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) Intermitten ke dalam Grid	650.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	571-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 Lingkup Energi Telekomunikasi dan Informatika	1.050.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Integrasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi RPJMN 2020-2024 dalam lingkup Sektor Energi, Telekomunikasi dan Informatika	850.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 2019 Lingkup energi, Telekomunikasi dan Informatika	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Monev Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (RISPE)	650.000
				641-Koordinasi Strategis Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagalistrikan Nasional	650.000
				642-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital	650.000
643-Koordinasi Sekretariat Dewan Tik Nasional TA 2020	7.500.000				
2927-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Evaluasi Pembangunan Daerah	6.000.000
			621-Pemantauan Pembangunan di Daerah	1.000.000	
			622-Koordinasi Pembangunan	1.000.000	
			623-Penghargaan Pembangunan Daerah	7.000.000	
2928-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Bidang Pengendalian Pembangunan	1.202.950
		606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Pemantauan Pembangunan Sektoral	2.573.007
				621-Evaluasi Tematik Pembangunan Sektoral	2.436.824
				622-Evaluasi Pelaksanaan RKP	1.963.839
				623-Penyusunan Lampiran Pidato Presiden 2020	823.380
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pemanfaatan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembangunan Nasional	-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2929-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Penyusunan Kerangka Kelembagaan dalam rangka Pembangunan Hukum dan Peradilan	474.076
			052-Policy Paper	520-Penyusunan Policy Paper Optimalisasi Penerapan Alternatif Pemidanaan di Indonesia	450.921
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2021 Bidang Hukum dan Regulasi	537.090
				571-Penelahaan Renja dan RKA Mitra K/L Bidang Hukum dan Regulasi	20.700
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Pelaksanaan RPJMN Periode 2020-2024 Bidang Hukum dan Regulasi	200.495
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Tahun 2020 Bidang Lingkup Hukum dan Regulasi	179.350
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Bidang Lingkup Hukum dan Regulasi	498.270
				612-Pengembangan Penyusunan Indeks pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2019	515.436
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kordinasi Implementasi SDG's Goal 16	70.840
				642-Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Hibah Luar Negeri	153.360
				643-Dukungan Pelaksanaan Kebijaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TA 2020	497.224
				644-Koordinasi Arah Kebijakan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Nasional Tahun 2020	223.838

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2930-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	900.000
			052-Policy Paper	520-Policy Paper Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2020 Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	600.000
				571-Koordinasi Penyusunan Kebijakan DAK 2020 Bidang IKM dan Pariwisata	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Singkronisasi RPJMN 2020-2024 Bidang Industri,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.000
				611-Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Industri dan Pariwisata	400.000
				641-koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan	700.000
				642-Pengembangan Strategis Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	400.000
643-Koordinasi Strategis Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	700.000				
2931-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	051-Kajian Jasa Keuangan Syariah	710.858
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP tahun 2021	627.365
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi RPJMN 2020-2024	471.685
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Evaluasi PHLN di Bidang Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Anggaran 2020	598.696
				611-Pemantauan Sumber Pembiayaan Jangka Panjang	583.647
				612-Pemantauan Digitalisasi Jasa Keuangan	507.749
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kesekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah	38.200.000
				642-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal	4.000.000
				643-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Inovasi Produk, Pedalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Keuangan Syariah	4.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
				644-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah	4.000.000
				645-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah	4.000.000
				646-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal	4.000.000
				647-Kesekretariatan PPK Komite Nasional Keuangan Syariah	1.800.000
2932-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun	600.000
				511-Kajian Penguatan Manajemen Kebencanaan Nasional	600.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Tahun 2021 dengan Kementerian/ Lembaga dalam	800.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2020 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	500.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2019 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan	750.000
				641-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan	750.000
				642-Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu Melalui Program Solusi Lokal untuk Pengentasan	300.000
				643-Koordinasi Strategis Pemantapan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah	300.000
				644-Koordinasi Strategis Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dalam mendukung Percepatan	400.000
				645-Koordinasi Strategis Lembaga Pengelola Pendanaan Penanggulangan Bencana	400.000
				646-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana (PPPP)	1.500.000
				647-Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan	7.500.000
648-Koordinasi Strategis Desk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat	8.000.000				

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2933-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	511-Kajian Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan di Kalimantan	850.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.083.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan yang Bersumber Dari Pendanaan Alternatif	900.000
2934-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kehutanan	1.100.000
			520-Policy Paper	520-Value chain industri hasil hutan	-
				521-Digitalisasi pengelolaan hutan	-
				522-Forest based ecotourism cluster	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2021 bidang Kehutanan	725.000
				571-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Sub Bidang Kehutanan	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	590-Koordinasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020 - 2024 Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun 2020 Bidang Kehutanan	500.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2019 Bidang Kehutanan	500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pencapaian SDGs Tujuan 15	550.000
				641-Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	24.975.000
				642-Koordinasi Proyek Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Tahun 2020 untuk Percepatan Pembangunan Bidang Kehutanan	500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2935-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategi Penguatan Integrasi Hulu Hilir Perikanan dan Dukungan Lintas Sektor Dalam	2.000.000
			052-Policy Paper	052-Policy Study : Tantangan Sinergitas Pembangunan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dalam	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.000.000
				580-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Diseminasi RPJMN 2020 - 2024 Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2.900.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun Berjalan Lingkup Kelautan dan Perikanan	1.000.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.000.000
				613-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	643-Dukungan Pendampingan dan Operasional Kegiatan PHLN Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000
				644-Dukungan Pendampingan dan Operasional POKJA 3 Kelautan dan Perikanan	31.600.000
2936-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kebijakan dan Strategi peningkatan peran perempuan dalam ketenagakerjaan	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	549.530
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan program dan kegiatan bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda dan olahraga	1.000.000
				611-Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Pelaksanaan TA 2020	700.000
				641-Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas TA 2020	700.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	1.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2937-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pembangunan Kesehatan	1.042.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.628.780
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Sosialisasi RPJMN lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan	1.092.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	1.042.000
				641-Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1.042.000
				642-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI Unicef 2016-2020	575.000
				643-Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	14.300.000
2938-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Moneter	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Strategis Inovasi Kebijakan Pembiayaan	850.000
			052-Policy Paper	-	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Bidang Keuangan Negara dan	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sinkronisasi Penyusunan Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024 Bidang Keuangan Negara	100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter	700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak Sektor Energi dan Cukai Hasil Tembakau	250.000
				641-koordinasi Strategis Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi	500.000



KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2939-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	510-Kajian	510-Kajian Analisis Kebijakan Penanganan Limbah dan Bahan Makanan yang Terbuang (Food Loss and Waste)	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	570-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021	1.000.000
				571-Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	590-Tanpa Sub Output	590-Finalisasi Penyusunan RPJM 2020-2024 Bidang Lingkungan Hidup	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	610-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	250.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019	250.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	1.000.000
				641-Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	500.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan SDG's (Goal 12 dan 13)	250.000
				643-Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim	8.000.000
644-Koordinasi Penyusunan Informasi Daya Dukung Lingkungan untuk Mendukung Satu Data Perencanaan	750.000				
2940-Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Potensi dan Tantangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	750.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tahun 2021	650.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan RPJMN 2020-2024 dengan Renstra K/L 2020-	600.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring RKP 2020 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah	400.000
			061-Tanpa Sub Output	611-Evaluasi RKP 2019 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah	400.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.500.000
				641-Koordinasi Strategis Penguatan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	850.000
				642-Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah	850.000
				643-Koordinasi Strategis Pembangunan Provinsi Aceh	4.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2941-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional	1.000.000
				511-Kajian Swasembada Protein	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2021 dan DAK Tahun 2021	1.000.000
				571-Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Internal Direktorat Pangan dan Pertanian TA 2020	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Sosialisasi RPJMN	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Evaluasi Pelaksanaan Transfer Teknologi Melalui Pembangunan Techno Park Pertanian	1.000.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 Bidang Pangan dan Pertanian TA 2020	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian (Pengembangan Policy Lab)	1.500.000
				641-Koordinasi Strategis Perencanaan Pangan Dan Pertanian Tindak Lanjut Kerjasama Dengan Lembaga	-
				642-Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Menengah Sistem Pangan Nasional	2.000.000
2942-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Peran Koperasi (Worker Coop) Dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Potensi	800.000
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN lingkup UMKM dan koperasi	497.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Program dan Kegiatan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	600.000
				611-Evaluasi Perencanaan Peningkatan Kapasitas UMKM dan Koperasi	785.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Wirausaha berbasis Oportunity	483.000
				641-Implementasi Perluasan Model Kemitraan Strategis Antara Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)	3.660.929
2943-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	1.000.000
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Finalisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	-
				571-Koordinasi RPJMN Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	600.000
				611-Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	600.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1.000.000
				641-Koordinasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu	1.500.000
				642-Koordinasi Strategis Strategi Komunikasi	4.500.000
2944-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-kajian pengembangan model pelaksanaan (Delivery Model) dan penyaluran (Channeling)	414.900
			055-Rancangan Pendanaan	551-Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	661.503
				552-Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktivitas Pengembangan	2.247.875
				553-Koordinasi Peningkatan Kesiapan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	549.541
				554-Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Hibah Compact 2	15.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Proyek-Proyek Yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bilateral	769.289
				611-Evaluasi Pelaksanaan Proyek Melalui pendanaan Pinjaman pemerintah tiongkok	356.892
2945-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	510-Kajian	510-Policy Paper pengembangan strategis kerjasama pendanaan luar negeri multilateral dengan uni eropa	542.000
			550-Rancang Pendanaan	520-Koordinasi kebijakan dan strategis pendanaan luar negeri multilateral	3.318.500
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	610-Tanpa Sub Output	610-Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bersama dengan Mitra Pembangunan Multilateral	713.500
				611-Pengembangan Strandar Prosedur Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral TA 2020	605.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis G-20 Working Group on Development	1.739.835
2947-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sinergitas Penyediaan Air Baku di Pulau Terpencil dengan Melibatkan Kerjasama Swasta PDAM	500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sosialisasi dan Integrasi RPJMN 2020-2024 Bidang Sumber Daya Air	200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi terhadap dampak dari kegiatan Dam Operational Improvement and Safety	3.200.000
				611-Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	5.129.123
				612-Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Irigasi Project (IPDMIP)	4.500.000
				613-Komering Irrigation Project (Phase III)	1.380.000
				614-Rentang Irrigation Modernization Proiect (RIMP)	1.400.000
				615-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Irigasi Air	350.000
				616-Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air	659.167
				641-Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air	550.000
				642-Koordinasi Strategis Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	3.025.000
				643-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Pembangunan Citarum Harum	1.125.000
				644-Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan Terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi	400.000
2948-Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	01-Tersusunnya Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	054-Rancang bangun	540-Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Toolkit) Pra Studi Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan	1.250.000
				541-Koordinasi Strategis Rancang Bangun Infrastruktur dan Infrastruktur Ibukota Baru	6.200.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output		-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	770.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU	1.900.000
				641-Koordinasi Strategis Fasilitasi Pemerintah untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah (PINA)	17.272.000
				642-Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (Screening) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Public Private	2.470.000
				643-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan	7.780.000
				644-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan	7.350.000
				645-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Layanan Dasar	6.920.000
				646-Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	4.130.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2949-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Ekonomi	1.150.000
				511-Pengembangan Model Pembangunan Wilayah( PRADA)	1.500.000
				512-Penyusunan Proyeksi Ekonomi Wilayah Dalam RPJPN 2025-2045	500.000
		602-Sistem/regulasi perencanaan	056-Tanpa Sub Output	560-Pengembangan Web GIS Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik RKP 2021	550.000
				561-Pengembangan Mekanisme dan Tata Kelola Penyelarasan Perencanaan Pusatdan Daerah	500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan Tahun 2020	550.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan bidang pengembangan wilayah dan kawasan	800.000
				611-Temu Konsultasi Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia	600.000
				640-Harmonisasi Penyelarasan Perencanaan Tahunan Derah RKPd dengan Perencanaan Pusat RKP Tahun	500.000
		609-Rancangan Perpres RKP	065-Tanpa Sub Output	650-Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial dalam mendukung Penyusunan	1.100.000
				651-Pengembangan Studio RKP On Map Berbasis Spasial Bidang Pengembangan Wilayah 2020	250.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2950-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	061-Kajian Perhitungan Biaya Logistik Perdagangan	1.044.957
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021 lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi	886.307
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Disiminasi rencana pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2025 bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	592.752
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan evaluasi lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional tahun 2019	954.273
				611-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Tahun 2019	483.090
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas Sebagai Focal Point Indonesia untuk The	1.486.590
641-Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Pada Forum Kerjasama dan Pertemuan	978.481				
642-koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pendukung Hibah Indonesia-EU Trade Support Facility (TSF) Tahun 2020	278.550				
2951-Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Inovasi Pendanaan Pembangunan	568.578
				511-Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1.358.024
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	631.676
				611-Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	615.834

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2952-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	01-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategis Penyusunan Roadmap Transformasi Perubahan Struktur Ekonomi Nasional	980.000
				511-Kajian Pengembangan Indikator Makro dan Statistik	775.000
			053-Modelling	530-Model Outlook Makro Ekonomi Indonesia	1.350.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	057-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	850.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi RPJMN 2020-2024 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	850.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020	520.000
				611-Evaluasi Pemanfaatan Data Potensi Desa (Podes)	515.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Forum Masyarakat Statistik (FMS)	1.255.000
609-Rancangan Perpres RKP	065-Tanpa Sub Output	650-Koordinasi Penyusunan Rancangan Perpres RKP	405.000		
2953-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	511-Kajian Tematik Indeks Kota Berkelanjutan	550.000
				512-Kajian Keterjangkauan Perumahan di Kawasan Metropolitan Terpilih	550.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Multipihak Penyusunan RKP, Renja dan RKA K/L tahun 2021 Lingkup Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Perkotaan, Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional	2.400.000
				641-Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional	1.300.000
				642-Pendampingan Teknis Kegiatan Hibah dan Pinjaman	800.000
				643-National Slum Upgrading Project (NSUP)	7.600.000
				644-Koordinasi Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara	130.000.000
2954-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Jaminan Pekerjaan (Unemployment Benefit) dalam Jaminan Sosial Bidang	900.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	590-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan	800.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Akses Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk	700.000
				611-Evaluasi Peta Jalan Jaminan Sosial	800.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berwarga Negara di Indonesia (Ease of Being Indonesian)	4.597.960

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2956-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Penyusunan RKP Tahun 2020 bidang Pertahanan dan Keamanan	1.270.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun 2020 Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.085.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2019 Bidang Pertahanan dan Keamanan	645.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output		-
2957-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kelembagaan Partai Politik dalam Demokrasi	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP 2021 Bidang Politik dan Komunikasi	600.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Finalisasi RPJMN 2020-2024	200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Bidang Politik dan	800.000
				611-Review Penyelenggaraan Pemilu 2019	800.000
				612-Review Efektifitas Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	700.000
				613-Review Hambatan Kebebasan Pers dalam Demokrasi	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	643-Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2020	1.193.860
2958-Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	01-Tersusunnya Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Pemantauan Pelaksanaan Proyek Strategis Pembangunan Berbasis THIS (Tematik, Holistik,	2.250.000
			062-Tanpa Sub Output	621-Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.000.000
		607-Sistem/Regulasi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional	063-Tanpa Sub Output	630-Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.500.000
				631-Koordinasi Penyusunan Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	100.000
				632-Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.000.000



KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2959-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Klasterisasi Hilirisasi Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Ekonomi di Daerah	950.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP Tahun 2021 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sosialisasi RPJMN 2020 - 2024 Sektor Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Peningkatan Akses Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Domestik	1.000.000
				611-Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Efisiensi Energi	750.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Energi	800.000
				641-Koordinasi Strategis Implementasi, Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Geopark Yang Terintegrasi	750.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja (Pokja) II-ICCTF Bidang Energi	-
				643-Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia Untuk Sektor Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.000.000
		2960-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangun	051-Kajian
511-Kajian Reviu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008-2028	1.000.000				
603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output			570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan	1.700.000
604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output				-
605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output			610-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Reforma Agraria dan Informasi	1.000.000
608-Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output			640-Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional	1.500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2961-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Proyeksi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 Bidang Ketenagakerjaan	700.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Finalisasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Ketenagakerjaan	450.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja	550.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	539.395
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Forum Komunikasi Reformasi Sistem Diklat Vokasi Tahap Kedua	5.000.000
2962-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	057-Koordinasi penyusunan RKP 2021 terkait lingkup Transportasi	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Integrasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi RPJMN 2020-2024 lingkup Transportasi	1.300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2019 terkait lingkup Transportasi	1.700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional	1.000.000
				641-Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar	5.500.000
				642-Koordinasi Strategis Pelaksanaan DAK Transportasi	4.000.000
				643-Koordinasi Strategis Perencanaan Konektivitas ASEAN	1.300.000
		5203-Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	01-Terlaksananya Pengelolaan Hibah MCC	608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI	
5215-Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Reviu dan Ujicoba Pengukuran Indeks Diplomasi	300.000	
				511-Kajian Pengukuran Dampak Ekonomi atas Kebijakan Pembangunan Internasional	200.000	
			052-Policy paper	520-Policy PaperPemanfaatan Perjanjian Internasional	140.000	
				521-Policy PaperEvaluasi keanggotaan Indonesia dalam forum dan Organisasi Internasional	140.000	
				522-Policy PaperPemetaan kebutuhan perwakilan RI di kawasan Afrika	140.000	
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Penyusunan RKP Bidang Polugri dan KPI
			604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi RPJMN 2020-2024 Bidang Polugri dan KPI	440.742
			605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik Luar	340.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Pelibatan Indonesia Dalam Forum Kerjasama Pembangunan Internasional	1.500.000	
				641-Koordinasi Pelaksanaan Bidang Politik Luar Negeri	250.000	
				642-Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan Program Reverse Linkage	400.000	
				643-Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional	460.000	
				644-Pendukung Hibah Luar Negeri Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	550.000	
				645-Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam mendukung Perdagangan dan Investasi	500.000	
646-Pengembangan Inisiatif Kemitraan Global, Berbagi pengalaman dan kerjasama Pembangunan dengan Organisation for Economic Cooperation and Development	550.000					

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
5216-Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Analisis Penyusunan Renja K/L	600.000
		602-Sistem/Regulasi Perencanaan	602-Tanpa Sub Output	560-Koordinasi Pengembangan Sistem Dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Pada Sistem Informasi Krisna	2.975.000
				561-Pengembangan Sistem/Regulasi Perencanaan Pembangunan	1.300.000
				562-Koordinasi Pengembangan Sistem Dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Pada Sistem Informasi Krisna	2.900.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP dan Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L	1.300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1.500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	425.000
5217-Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	01-Tersusunnya Analisis Kebijakan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Penyusunan Analisis Kebijakan	1.510.930
				511-Koordinasi Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan	1.250.000
				512-Koordinasi Analisis Kinerja	750.000
5246-Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan Global	286.103
				511-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur	771.577
				512-Pengembangan Kewirausahaan Sosial Dalam Rangka Percepatan Pengurangan Kesenjangan Antar	1.176.000
				513-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	780.000
				514-Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Mendukung Implementasi Integrasi Perencanaan dan	700.000
				515-Koordinasi Strategis Simplifikasi Regulasi dan Penyusunan kerangka Regulasi RPJMN 2020-2024 dan	1.500.000
				516-Monitoring Pelaksanaan Simplifikasi Regulasi Tahun 2019	1.000.000
				517-Forum Konsultasi Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan RKP 2021	790.000
				518-Analisa Pola Konsumsi Masyarakat	3.233.220
				519-Penyempurnaan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	980.677
				520-Lembaga Pembina Pendampingan Pembangunan	10.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kajian/Model Inovatif Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Perencanaan	19.399.050
				642-Koordinasi Kelautan dan Perikanan	700.000
				643-Koordinasi Pangan dan Pertanian	3.500.000
				644-Koordinasi Lingkungan Hidup	4.000.000
				645-Pemindahan Ibu Kota Negara (Lintas Sektor)	8.000.000
				646-Koordinasi Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	4.000.000
5847-Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	01-Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	610-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	066-Koordinasi Penyelenggaraan	660-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Gelar	141.835.146
			067-Koordinasi Penyelenggaraan	670-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Non Gelar	12.934.925
			068-Koordinasi Pembinaan	680-Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan JFP	22.127.785
			069-Fasilitasi Pembinaan dan Diklat	690- Kegiatan Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi	33.714.900

# REKAP 2A: PROGRAM K/L

## RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

### TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

#### 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen		779.142.600,0
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86	
01.02	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88	
01.03	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88	
02	Terlaksananya pelayanan pengawasan intern		10.000.000,0
02.01	Tingkat Persepsi Stakeholder Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	
02.02	% Rekomendasi hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100	
02.03	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas	3	
02.04	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas	3	
Total			789.142.600,0

#### 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen Internal Tepat Waktu	789.142.600,0
01.01	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Manajemen Internal Tepat Waktu	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		789.142.600,0

#### 8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6257	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	112.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.500.000,0	112.500.000,0	112.500.000,0	112.500.000,0
6258	Legislasi dan Litigasi	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
6259	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan SDM	147.684.584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147.684.584,0	147.684.584,0	147.684.584,0	147.684.584,0
6260	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	513.958.016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513.958.016,0	513.958.016,0	513.958.016,0	513.958.016,0
6261	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	10.100.000,0	10.100.000,0	10.100.000,0
<b>Total</b>		789.142.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789.142.600,0	789.242.600,0	789.242.600,0	789.242.600,0

Jakarta, 09 Februari 2021

# REKAP 2A: PROGRAM K/L

## RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

### TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
2. UNIT ORGANISASI : 01 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.  
02 - Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.  
03 - Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. PROGRAM : Program Perencanaan Pembangunan Nasional
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5.000.000,0
01.06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	5.000.000,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	10.200.000,0
07.02	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	2.600.000,0
07.04	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	7.600.000,0
Total		15.200.000,0

#### 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terwujudnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai bidangnya		633.253.748,0
01.01	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai Bidangnya	80	
01.02	% perencana yang memenuhi standar kompetensi	87,5	
02	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai bidangnya		85.373.814,0
02.01	% Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional sesuai bidangnya	84-87,9	
03	Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya		252.551.001,0
03.01	% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional sesuai bidangnya yang dijalankan oleh K/L	88-90,9	
04	Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya		10.100.000,0



KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
04.01	% rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya yang dijalankan oleh K/L	80-84,9	
Total			981.278.563,0

#### 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas	981.278.563,0
06.01	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas	
Total		981.278.563,0

#### 8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6262	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	23.800.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.800.005,0	23.800.005,0	23.800.005,0	23.800.005,0
6263	Perencanaan Pembangunan Regional	70.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000.000,0	70.000.000,0	70.000.000,0	70.000.000,0
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	104.050.000,0	0,0	0,0	0,0	44.820.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148.870.000,0	148.870.000,0	148.870.000,0	148.870.000,0
6265	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	39.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.500.000,0	39.500.000,0	39.500.000,0	39.500.000,0
6266	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	35.332.000,0	0,0	0,0	0,0	15.790.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.122.000,0	51.122.000,0	51.122.000,0	51.122.000,0
6267	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	64.388.887,0	0,0	21.680.000,0	0,0	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.868.887,0	90.868.887,0	90.868.887,0	90.868.887,0

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	39.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.100.000,0	39.100.000,0	39.100.000,0	39.100.000,0
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	70.627.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.627.200,0	70.627.200,0	70.627.200,0	70.627.200,0
6270	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	42.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.800.000,0	42.800.000,0	42.800.000,0	42.800.000,0
6271	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	254.800.471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254.800.471,0	254.800.471,0	254.800.471,0	254.800.471,0
6272	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan	62.000.000,0	25.000.000,0	62.790.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.790.000,0	149.790.000,0	149.790.000,0	149.790.000,0
<b>Total</b>		806.398.563,0	25.000.000,0	84.470.000,0	0,0	65.410.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	981.278.563,0	981.278.563,0	981.278.563,0	981.278.563,0

Jakarta, 09 Februari 2021



**LAMPIRAN**  
Capaian IKU



**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

**DEPUTI BIDANG EKONOMI**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup bidang ekonomi yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup bidang ekonomi	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	4.699.475.000	4.685.260.355	99,70
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter	1.633.500.000	1.616.469.037	98,96
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	1.834.551.000	1.789.807.367	97,56
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	3.671.775.000	3.530.174.125	96,14
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.566.500.000	3.409.859.146	95,61

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan RKP	100%	71,79%	71,79%
		5. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pengembangan regional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		7. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMD dengan RPJMN lingkup pengembangan regional	100%	67,16%	67,16%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup pengembangan regional	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	5.071.946.000	4.973.983.780	98,07
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	11.151.695.000	10.716.446.198	96,10
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah	5.714.370.000	5.129.371.997	89,76
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	17.732.725.000	16.519.911.946	93,16
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	3.428.728.000	3.285.930.890	95,84

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	13.233.807.000	13.018.267.106	98,37
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	6.090.000.000	5.936.616.960	97,48
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	8.910.000.000	8.882.044.391	99,69
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	10.656.941.000	10.402.385.424	97,61
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	5.005.690.000	4.954.369.773	98,97

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

**DEPUTI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	3.783.235.000	3.692.492.347	97,60
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.179.772.000	5.157.610.618	99,57
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial	3.604.990.000	3.509.237.340	97,34
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan	3.683.071.000	3.648.703.288	99,07

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

**DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan yang ditindaklanjuti K/L	100%	97,05%	97,05%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	3.017.500.000	2.984.508.036	98,91
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, dan Iptek	2.549.335.000	2.493.625.208	97,81
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	6.726.361.000	6.568.924.287	97,66
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	22.886.354.000	13.379.248.030	58,46



**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

**DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	2.045.689.000	2.021.404.320	98,81
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	2.061.839.000	2.021.793.966	98,06
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	1.834.868.000	1.792.375.644	97,68
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	2.818.461.000	2.815.247.868	99,89
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	3.293.364.000	3.284.851.069	99,74

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pendanaan pembangunan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) penyiapan regulasi sistem pendanaan pembangunan sesuai rencana	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan rancangan pendanaan RPJMN dengan muatan RPJPN	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup pendanaan pembangunan	1 dok	1 dok	100%
3.	Keselarasan antara RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	Tersusunnya konsep rencana pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	4 dok	7 dok	175%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	6.935.610.000	6.684.077.071	96,37
2. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	12.195.000.000	12.012.072.520	98,50
3. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.103.206.000	2.004.654.082	95,31
4. Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	1.706.782.000	1.665.465.280	97,58
5. Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	6.184.422.000	5.937.903.892	96,01

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

**DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L/D	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) pemanfaatan sistem/regulasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional	100%	100%	100%
		3. Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	7.275.000.000	7.155.006.528	98,35
2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	6.265.431.000	6.226.614.859	99,38
3. Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	4.610.000.000	4.457.047.483	96,68

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2021 lingkup sarana dan prasarana	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	10.952.000.000	10.802.495.270	98,63
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi Telekomunikasi dan Informatika	8.596.484.000	8.207.962.281	95,48
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kerjasama Pemerintah – Swasta dan rancang Bangun	22.850.373.000	22.690.013.397	99,30
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	27.147.653.000	26.986.998.153	99,41
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perumahan dan Permukiman	17.732.725.000	16.519.911.946	93,16

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1. % Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%
		2. Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	1.300 orang	1.618 orang	124,46%
2.	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih				
	a. Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	1. Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik	Baik	100%
		2. Skor RB K/L	A	A	100%
		3. Opini BPK	WTP	WTP	100%
		4. Skor Evaluasi AKIP	A	A	100%
		5. % Penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%
	b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	% Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	19.448.053.000	19.437.468.704	99,95
Pembinaan dan Pelayanan Hukum	1.955.448.000	1.907.911.884	97,57
Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	2.525.508.000	2.385.673.011	94,46
Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	8.915.000.000	8.599.742.456	96,46
Pelayanan Umum dan Keuangan	323.899.134.000	272.279.327.095	84,06
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	50.929.482.000	50.528.368.465	99,21
Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	13.600.065.000	13.293.851.753	97,75
Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	2.857.111.000	2.706.388.303	94,72
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	115.810.347.000	109.165.684.967	94,26
Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	7.418.152.000	6.915.718.181	93,23
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	183.348.216.000	172.383.555.815	94,02

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020  
INSPEKTORAT UTAMA**

Sasaran Strategis K/L :  
Meningkatnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	1. Tingkat Persepsi <i>Stakeholder</i> Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	100%
2. Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas		100%	100%	100%	
3. Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas		Level 3	Level 3	100%	
4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas		Level 3	Level 3	100%	

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	4.256.250.000	4.221.525.049	99,18
2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	2.073.276.000	2.035.596.592	98,18



**LAMPIRAN**  
Capaian Keselarasan



**PRIORITAS NASIONAL 1**

**Keselerasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024**

Mitra Bappenas	KL Mitra	RPJMN 2020-2024			RKP 2021							Keselerasan
		Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran	Indikator KP	ProP	Indikator ProP	Proyek (RO)	Target Proyek	
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing Perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	01 - Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Produksi kopi 02 - Produksi kakao	003 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing Perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kementerian Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi melalui peningkatan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	1. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN 2. Kontribusi realisasi investasi luar Jawa 3. Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	02 - Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I, II, III, dan IV	001 - Kajian Perbaikan Iklim Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) dan Investasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi melalui peningkatan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	02 - Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KIKEK Industri)	1 - Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	Pertumbuhan PDB industri Logam Dasar (%)	024 - Rekomendasi Peraturan Perizinan Investasi Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah yang Disimplifikasi, Diharmonisasi, dan Disinkronisasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri	04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	05 - Pengembangan 'Start-Up Parks' dan Center of Excellence	01 - Jumlah 'start-up parks' dan dan Center of Excellence	001 - Implementasi Nota Kesepahaman World Conference on Creative Economy	1 Kesepakatan	Selaras
Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri	04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	07 - Pengembangan Kawasan BeCreative District (BCD)	01 - Jumlah Kawasan Be Creative District (BCD)	003 - Be Creative District (BCD) yang Dikembangkan	1 Kegiatan	Selaras
Direktorat Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Meningkatnya penciptaan startup dan peluang usaha	Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	02 - Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	Jumlah wirausaha yang dilatih	30 - Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya	400 orang	Selaras



**PRIORITAS NASIONAL 1**

**Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021**

Mitra Bappenas	KL Mitra	RKP 2021						Renja K/L 2021				Keselerasan
		Kegiatan Prioritas (KP)	Indikator KP	ProP	Indikator ProP	Target	Alokasi (Rp Juta)	Kegiatan K/L	RO	Target Ro	Alokasi	
Direktorat Pangan dan Pertanian	Kementerian Pertanian	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Peningkatan produksi kopi	01 -Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	Produksi kopi	9364 Unit	151962,3	1777- Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	001-Kawasan Kopi	9364	151962,25	Selaras
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman Pertumbuhan PDB perkebunan Peningkatan produksi kakao Peningkatan produksi	03 - Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Pertumbuhan PDB Industri Furnitur	1 Rekomendasi Kebijakan	800	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	1 Rekomendasi Kebijakan	800	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 1**

**Keselarasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025**

Unit Kerja	RPJP 2005-2025			RPJMN 2020-2024			Keselarasan
	Visi	Sasaran	Arah Pembangunan	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	
Kedeputan Bidang Ekonomi	Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.	Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat</li> <li>2. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan</li> <li>3. Daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi</li> </ol>	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<p>Sasaran Sisi Produksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan Industri 4.0</li> <li>2. Meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian</li> <li>3. Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi</li> <li>2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi</li> <li>3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</li> </ol>	Selaras

## PRIORITAS NASIONAL 1

### Keselarasn Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024

Unit Kerja Sektor Bappenas	K/L Mitra	RPJMN 2020-2024			Renstra K/L 2020-2024		Keselarasan
		Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator	Target 2021	
Kedeputan Bidang Ekonomi	Kementerian Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio perpajakan terhadap PDB</li> <li>- Rasio perpajakan terhadap PDB</li> <li>- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*</li> </ul> *termasuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) yang merupakan target RPJMN tahun 2020-2024.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8,51-8,69%</li> <li>- Naik</li> <li>- 85%</li> </ul>	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 1**

**Keselerasan RKP 2021 dengan RKA K/L**

Mitra Bappenas	KL Mitra	RKP 2021									Keselerasan
		Kegiatan Prioritas (KP)	Indikator KP	ProP	Indikator ProP	Target	Alokasi (Rp Juta)	RO	Target Ro	Alokasi	
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kemeko Perekonomian	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi	03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	1000	001 - Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1000	Selaras
Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kemeko Perekonomian	05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi	03 - Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	5000	001 - Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	5000	Selaras

### PRIORITAS NASIONAL 3

#### Keselarasn RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024				RKP 2021		Keselarasn
Agenda Pembangunan	Prioritas Naional	Program Prioritas	Sasaran	Program Prioritas (PP)	Sasaran	
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya layanan dasar (kesehatan)	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan	Selaras
		Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Terpenuhinya layanan dasar (pendidikan)	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Selaras
		Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha	Selaras
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Selaras

### PRIORITAS NASIONAL 3

#### Keselarasn Renja K/L dengan RKP 2021

RKP 2021			Renja K/L 2021			Keselarasn
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output RKP	Kegiatan K/L	Output Renja K/L	K/L Mitra Pelaksana	
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Pembinaan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Kemendagr	Selaras
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Kemensos	Selaras
	Kesejahteraan Sosial	Kartu Penyandang Disabilitas	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Kartu Penyandang Disabilitas	Kemensos	Selaras
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Pembinaan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Kemenkes	Selaras
	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Kemenkes	Selaras

### PRIORITAS NASIONAL 3

#### Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

RKP 2021			Renja K/L 2021				Keselerasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output K/L	Kegiatan K/L	Output K/L	Alokasi Rp. Juta)	K/L Mitra Pelaksana	
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	Pembinaan Administrasi Kependudukan	Akta Kematian yang diterbitkan Akta Kelahiran yang diterbitkan	449,2 800	Kemendagri	Selaras
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.782.227,70	Kemensos	Selaras
	Kesejahteraan Sosial	Kartu Penyandang Disabilitas	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Kartu Penyandang Disabilitas	722.250,00	Kemensos	Selaras
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Pembinaan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	127.612,80	Kemenkes	Selaras
	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	60.619,70	Kemenkes	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 3**

**Keselarasn RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025**

RPJP 2005-2025				RPJMN 2020-2024				Keselarasan
Visi	Arah Pembangunan	Sasaran	Σ Sasaran Renstra K/L	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Sasaran RPJMN	
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur	Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.	Terwujudnya bangsa yang berdayasaing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia.	1	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya layanan dasar</li> <li>• Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing</li> <li>• Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda</li> </ul>	3	Selaras



## PRIORITAS NASIONAL 4

### Keselaran RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024				RKP 2021		Keselaran
Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Program Prioritas (PP)	Sasaran	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk Memantapkan ketahanan budaya	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	Selaras
		Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkat-nya pemajuan kebudayaan untuk meningkat-kan peran kebudayaan dalam pembangun-an</li> <li>Meningkat-nya ketahanan keluarga untuk memper-kukuh karakter bangsa</li> <li>Meningkat-nya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial</li> </ul>	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	Selaras
		Memperkuat Moderasi Beragama	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	Selaras
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat ber-pengetahuan, inovatif dan kreatif	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 4**

**Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021**

RKP 2021			Renja K/L 2021			Keselerasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output RKP	Kegiatan K/L	Output Renja K/L	K/L Mitra Pelaksana	
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Kebijakan Penguatan Karakter	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Kemendikbud	Selaras
	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Rembug Nasional Bela Negara	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Rembug Nasional Bela Negara	Kemenhan	Selaras
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	BPIP	Selaras
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Kemendikbud	Selaras
		Even Festival Budaya Indonesiana	Pelestarian Nilai Budaya	Even Festival Budaya Indonesiana	Kemendikbud	Selaras
	Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Kemendikbud	Selaras
		Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Kemendikbud	Selaras
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	Kemenag	Selaras
		Kerukunan umat beragama di daerah	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kerukunan umat beragama di daerah	Kemendagri	Selaras
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	Kemenag	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 4**

**Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021**

RKP 2021			Renja K/L 2021				Keselerasan
Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Output K/L	Kegiatan K/L	Output K/L	Alokasi Rp. Juta)	K/L Mitra Pelaksana	
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Kebijakan Penguatan Karakter	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	30.605,00	Kemendikbud	Selaras
	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Rembug Nasional Bela Negara	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Rembug Nasional Bela Negara	1.250,00	Kemenhan	Selaras
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	8.395,20	BPIP	Selaras
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	49.423,10	Kemendikbud	Selaras
		Even Festival Budaya Indonesiana	Pelestarian Nilai Budaya	Even Festival Budaya Indonesiana	22.957,90	Kemendikbud	Selaras
	Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	4.550,00	Kemendikbud	Selaras
		Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat	7.400,00	Kemendikbud	Selaras
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Konflik Intra Umat Beragama Islam yang ditindaklanjuti	8.946,40	Kemenag	Selaras
		Kerukunan umat beragama di daerah	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kerukunan umat beragama di daerah	1.000,00	Kemendagri	Selaras
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Penghulu yang ditingkatkan kompetensinya	19.762,00	Kemenag	Selaras

## PRIORITAS NASIONAL 4

### Keselerasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

RPJP 2005-2025				RPJMN 2020-2024				Keselerasan
Visi	Arah Pembangunan	Sasaran	Σ Sasaran Renstra K/L	Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Sasaran RPJMN	
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.	Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut: (1) Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Makin mantapnya budaya bangsa.	1	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya</li> <li>• Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial</li> <li>• Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan</li> <li>• Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa</li> <li>• Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan</li> </ul>	6	Selaras

PRIORITAS NASIONAL 5

Keselarasn RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024

KL Mitra	RPJMN 2020-2024			RKP 2021							Keselarasn
	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	KP	Sasaran KP	Indikator KP	Target	Pro P	Indikator Pro P	Target	
Kementerian PUPR	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun	223.180 Unit	Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah (unit)	18.417	Selaras
						Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	85.000 Rumah Tangga		Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	
						Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan	197.496 Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)		197.496	
						Jumlah pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	5.779 Hektar	Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh		Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (ha)	5.779

**PRIORITAS NASIONAL 5**

**Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021**

KL Mitra	RKP 2021					RENJA K/L 2021			Target	Keselerasan		
	Kegiatan Prioritas (KP)		Proyek Prioritas			Program						
	KP	Sasaran	ProP	Indikator	Target	Kegiatan/Sasaran Kegiatan K/L	KRO	RO				
Kemenkominfo	Penuntasan Infrastruktur TIK	Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2417 Desa	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	Sarana Pengembangan Kawasan	Palapa Ring	1 Unit	Selaras		
								BTS/Lastmile	2417 Unit	Selaras		
								Penyediaan Kapasitas Satelit	1 Unit	Selaras		
								Akses Internet	4940 Unit	Selaras		
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk masyarakat dan pemerintah	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Solusi Ekosistem	20 Kelompok Masyarakat	Selaras		
									Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Kerjasama Badan Usaha	4 Badan usaha
						Pengembangan jaringan fixed broadband dan mobile broadband	Pelayanan Publik Lainnya	Pusat Monitoring Telekomunikasi	1 Lembaga	Selaras		
									Operasional Perangkat SMFR	Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Tranportable, SMFR Bergerak dan Transportable	1 layanan	Selaras
											1 layanan	Selaras
											1 layanan	Selaras
Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan SFR dan SOR	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras								

				Pengembangan akses next generation broadband	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Roadmap 5G	2 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
						Rekomendasi Pemerintah atas Revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran dan aturan turunannya	18 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
				Digitalisasi penyiaran	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi Terkait Kebutuhan Infrastruktur dan Rencana Teknis Penggelaran Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital	3 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
					Bantuan Peralatan / Sarana	Satuan Transmisi LPP TVRI Menerima Perangkat Sistem Headend	10 Unit	Selaras
				Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan SFR dan SOR	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk digitalisasi penyiaran	1 Rekomendasi Kebijakan	Selaras
				Pengembangan Infrastruktur Penyiaran		Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital	10 Unit	
				Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan		Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network)	15 Persen	
				Pengembangan infrastruktur dan layanan aplikasi pemerintahan	Layanan Data dan Informasi	Data Center Nasional	2 Layanan	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 5**

**Keselerasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025**

KL Mitra	RPJPN 2005-2025			RPJMN 2020-2024			Keselerasan
	Visi	Sasaran	Arah Pembangunan Jangka Panjang	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	
KESDM	Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa	<p>1. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh:</p> <p>a. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi.</p> <p>b. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia.</p> <p>2. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh:</p>	<p>a. Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi</p> <p>b. Peningkatan prasarana dan sarana produksi, peningkatan fungsi kelembagaan, peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi</p> <p>c. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, penggunaan bahan bakar yang lebih murah</p> <p>d. Sistem jaringan transmisi dan distribusi ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan sistem jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi</p>	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan	Selaras



a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh:

a. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua

pulau dan kepulauan Indonesia.

e. Restrukturisasi industri ketenagalistrikan dilanjutkan dengan menerapkan

mekanisme pasar dan rasionalisasi tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta dan redefinisi peran pemerintah

f. Kemandirian penyediaan tenaga listrik ditingkatkan dan diperluas terutama untuk pulau pulau dan daerah-daerah terpencil, terisolir, serta daerah perbatasan.

			<p>g. Tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri dimanfaatkan melalui pengembangan teknologi ketenagalistrikan nasional dan sumberdaya manusia</p>				
<p>- Kominfo</p>			<p>Pembangunan telematika diarahkan dengan:</p> <p>a. mendorong persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan mempersiapkan tahapan migrasi alamiah dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh yang setara dan berimbang</p>		<p>Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Mendukung penuntasan infrastruktur TIK</p>	
<p>- LPP TVRI</p>			<p>b. menciptakan leadership dalam penyelenggaraan telematika yang mampu memberikan arahan jelas bagi pengembangan sektor ini selanjutnya</p>				
<p>- LPP RRI</p>			<p>c. mengantisipasi implikasi dari konvergensinya telekomunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi; hak atas kekayaan intelektual; serta legalitas</p>				
			<p>d. mengoptimalkan dan mensinergikan pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika guna menciptakan efisiensi termasuk efisiensi investasi yang pada akhirnya akan menentukan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna</p>				
			<p>e. memanfaatkan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada</p>				<p>Selaras</p>

			f. meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika;				
			g. mendorong pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi				
						Mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK	Selaras
						Mendukung fasilitas pendukung transformasi digital	Selaras

**PRIORITAS NASIONAL 5**

**Keselarasn Renja K/L 2021 dengan RKA K/L**

KL Mitra	RENJA K/L 2021			RKA K/L 2021					Keselarasn
	Program			Kegiatan					
	Kegiatan/Sasaran Kegiatan K/L	KRO	RO	KRO	RO	Lokasi RO	Target	Alokasi (Ribu)	
<b>KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau</b>									
Kementerian PUPR	4978 - Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	CBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	CBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Tersebar di 21 provinsi	2278	861.865.300	Selaras
			Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan		Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Tersebar di 15 provinsi	2040	443.744.587	Selaras
		RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Khusus	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Khusus	Tersebar di 30 provinsi	2423	548.443.931	Selaras
			Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI		Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Tersebar di 27 provinsi	2831	1.371.063.202	Selaras
			Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja		Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Tersebar di 14 provinsi	1134	1.165.002.312	Selaras
			Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera		Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera	-	0	0	Selaras
			Bantuan Perumahan Swadaya Usaha		Bantuan Perumahan Swadaya Usaha	Tersebar di 5 provinsi	900	51.500.000	Selaras
	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	-	0	0	Selaras			
	4976 - Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	PEA - Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	PEA - Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Pusat	1	500.000	Selaras
		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Pusat	1	4.500.000	Selaras
			Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pusat	1	5.000.000	Selaras
			Fasilitasi Penyaluran FLPP		Fasilitasi Penyaluran FLPP	Pusat	1	5.600.000	Selaras
	QFC - Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	QFC - Subsidi kepada Keluarga	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pusat	312	10.000.000	Selaras	
	4978 - Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tersebar di 33 provinsi	114000	2.315.715.000	Selaras
	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pemugaran Permukiman Kumuh	CBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersebar di 26 provinsi	1218,12	342.716.543	Tidak Selaras
			Peremajaan Permukiman Kumuh		Peremajaan Permukiman Kumuh	-	0	0	Selaras
			Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh		Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	-	0	0	Selaras
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan		Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	Pusat	1	580.566.989	Tidak Selaras			

**PRIORITAS NASIONAL 7**

**Keselerasan RKP 2021 dengan RPJMN 2020-2024**

Agenda Pembangunan	RPJMN 2020-2024		RKP 2021				Keselerasan
	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas (PP)	Sasaran PP	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran KP	
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola melalui Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terbangunnya Manajemen Talenta Nasional ASN	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optima	Konsolidasi Demokrasi melalui Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	Penguatan Kapasitas lembaga demokrasi	Terwujudnya Penguatan Kapasitas lembaga demokrasi	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya stabilitas keamanan nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral	Penegakan Hukum Nasional melalui Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, Penguatan Sistem Anti Korupsi, dan Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Penegakan Hukum Nasional	Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap	Penataan Regulasi	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Selaras
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri Indonesia	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dengan memperkuat kerja sama pembangunan internasional	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Selaras

## PRIORITAS NASIONAL 7

### Keselerasan Renja K/L dengan RKP 2021

Unit Sektor Bappenas	KL Mitra	RKP 2021			Renja K/L 2021			Keselerasan
		Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Sasaran KP	Kegiatan K/L	RO	Target Ro	
Direktorat Aparatur Negara	Kementerian PAN dan RB	RB dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terwujudnya Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Perumusan Kebijakan PANRB	PP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	1 PP	Selaras
Direktorat Politik dan Komunikasi	Kementerian Dalam Negeri	Konsolidasi Demokrasi	Peningkatan kapasitas Lembaga Demokrasi	Terwujudnya kapasitas lembaga demokrasi	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan organisasi	Bantuan Keuangan bagi Partai Politik	126.418 Suara Sah	Selaras
Direktorat Hukum dan Regulasi	Kementerian Hukum dan HAM	Penegakan Hukum Nasional	Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	5699 Orang	Selaras
Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI	Kementerian Luar Negeri	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Terwujudnya Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	23862 Orang	Selaras
Direktorat Pertahanan dan Keamanan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan	2 unit	Selaras

## PRIORITAS NASIONAL 7

### Keselerasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP 2005-2025

Unit Kerja	RPJP 2005-2025			RPJMN 2020-2024			Keselarasan
	Visi	Sasaran	Arah Pembangunan	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	
Direktorat Aparatur Negara	Terwujudnya Aparatur Negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD '45.	Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral;	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN</li> <li>2. Transformasi Pelayanan Publik</li> <li>3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis</li> <li>4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja</li> </ol>	Selaras
Direktorat Politik dan Komunikasi	Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	Arah pembangunan politik diwujudkan melalui penyempurnaan struktur politik; penataan peran negara dan masyarakat; pengembangan budaya politik; perbaikan proses politik; peningkatan peran hubungan luar negeri; serta peningkatan peran komunikasi dan informasi.	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi</li> <li>2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan</li> <li>3. Peningkatan kualitas komunikasi publik</li> </ol>	Selaras
Direktorat Hukum dan Regulasi	Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas	Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan, yang ditunjukkan oleh terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat,	Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia;	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Regulasi</li> <li>2. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata</li> <li>3. Penguatan sistem anti korupsi</li> <li>4. Peningkatan akses terhadap keadilan</li> </ol>	Selaras

<p>Direktorat Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tentram masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.</p>	<p>Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan keamanan dalam negeri;</li> <li>2. Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM;</li> <li>3. Penguatan keamanan laut;</li> <li>4. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat;</li> <li>5. Penguatan ketahanan dan keamanan siber</li> </ol>	<p>Selaras</p>
<p>Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI</p>	<p>Terwujudnya Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional</p>	<p>Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional</p>	<p>Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global. Berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk ZEE dan laut bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.</p>	<p>Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepemimpinan Indonesia di Forum Regional dan Global</li> <li>2. Penguatan Kerjasama pembangunan internasional</li> <li>3. Peningkatan citra positif di dunia internasional;</li> <li>4. Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri</li> </ol>	<p>Selaras</p>



**PRIORITAS NASIONAL 7**

**Keselerasan Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024**

Unit Kerja Sektor Bappenas	K/L Mitra	RPJMN 2020-2024			Renstra K/L 2020-2024		Keselarasan
		Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator	Target 2021	
Direktorat Aparatur Negara	Kemenpan-RB	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola	Transformasi pelayanan publik melalui Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi, Penguatan ekosistem inovasi, Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan Penguatan pelayanan terpadu	Jumlah Kebijakan/Peraturan Pelaksanaan PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	1 Kebijakan	Selaras

## PRIORITAS NASIONAL 7

### Keselerasan RKP 2021 dengan RKA K/L

Mitra Bappenas	KL Mitra	RKP 2021					RKA K/L		Keselerasan
		Program Prioritas (PP)	Sasaran PP	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek K/L Ooutput Prioritas	Alokasi (Rp miliar)	RO	Alokasi (Rp miliar)	
Direktorat Aparatur Negara	BKN	RB dan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB instansi pemerintah	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Penerapan Pola Karier Instansi Pemerintah	2,3	Penerapan Pola Karier Instansi Pemerintah	2,3	Selaras
Direktorat Politik dan Komunikasi	KPU	Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi public yang efektif, integratif dan partisipatif	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	16,5	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	16,5	Selaras
Direktorat Pertahanan dan Keamanan	Badan Narkotika Nasional	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya stabilitas keamanan nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3,3	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3,3	Selaras
Direktorat Politik Luar Negeri dan KPI	Kementerian Luar Negeri	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama internasional	Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	4	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	4	Selaras
Direktorat Hukum dan Regulasi	Kemenkumham	Penegakan Hukum Nasional	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	Penataan Regulasi	Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak	0,3	RUU Jaminan Benda Bergerak yang disusun	0,3	Selaras